



LAPORAN KINERJA 2024



STASIUN PSDKP BELAWAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kata Pengantar

Syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nyalah Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2024 dapat terselesaikan. Pelaksanaan kegiatan pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) di Tahun 2024 telah diwarnai oleh sejumlah keberhasilan yang dicerminkan dengan pencapaian indikator kinerja sasaran sesuai target. Informasi kinerja tersebut disajikan dalam sebuah Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2024 Unit Pelaksana Teknis Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan (UPT Stasiun PSDKP Belawan).

Laporan ini disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi, misi yang dibebankan kepada UPT Stasiun PSDKP Belawan dalam kurun waktu Tahun 2024. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ke depan.

Kami berharap, Laporan ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja sekaligus tolak ukur peningkatan kinerja bagi seluruh staff UPT Stasiun PSDKP Belawan dan semua pihak yang terkait. Semoga motivasi yang telah tumbuh dan kerjasama yang telah dibangun dalam membangun kinerja pengawasan SDKP dapat terus ditingkatkan.

Belawan, 15 Januari 2025
Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan Belawan



Muhammad Syamsu Rokhman, S.Pi, M.H
NIP. 19830730 200801 1 003

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja (LKj) UPT Stasiun PSDKP Belawan Tahun 2024 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Ditjen. PSDKP Tahun 2020 – 2024 dan Rencana Kinerja Tahun 2024 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Penyusunan LKj pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2024.

Sejalan dengan semangat reformasi birokrasi, UPT Stasiun PSDKP Belawan telah menyusun perjanjian kinerja Tahun 2024 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsinya, selain merupakan pemenuhan amanat kebijakan pengelolaan kinerja yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), juga ditujukan untuk:

1. Menterjemahkan strategi organisasi ke dalam rencana operasional dengan baik, sehingga manajemen kinerja organisasi akan selaras dengan strategi organisasi;
2. Membangun organisasi yang terus menerus melakukan perbaikan (*continuous improvement*)
3. Membangun keselarasan antar unit kerja dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi organisasi.

Sasaran Program UPT Stasiun PSDKP Belawan bermuara pada 8 Sasaran Kegiatan , yaitu:

1. Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif;
2. Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif;
3. Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan;
4. Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan;
5. Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan;
6. Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas;
7. Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang berkualitas;
8. Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP.

Penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian Sasaran Program, diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Pada Tahun 2024, terdapat 25 Indikator Kinerja yang menjadi komitmen kinerja UPT Stasiun PSDKP Belawan dengan nilai NKO 106,43. Selama

Tahun 2024 Stasiun PSDKP Belawan telah melakukan perhitungan atas capaian 25 indikator kinerja, sebagai berikut:

1. Indeks kualitas pembinaan pokmaswas lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (indeks) dengan target 81 dan capaian sebesar 100;
2. Indeks kinerja operasi kapal pengawas lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (indeks) dengan target 91 dan capaian sebesar 97,6;
3. Indeks kinerja operasi speedboat pengawas lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (indeks) dengan target 91 dan capaian sebesar 100;
4. Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (%) dengan target 100% dan capaian sebesar 100%;
5. Persentase sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%) dengan target 100% dan capaian sebesar 100%;
6. Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP (%) dengan target 100% dan capaian sebesar 100%;
7. Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (Nilai) dengan target 100 dan capaian sebesar 100;
8. Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (Nilai) dengan target 100 dan capaian sebesar 100;
9. Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (indeks) dengan target 80 dan capaian sebesar 80;
10. Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (Indeks) dengan target 80 dan capaian sebesar 100;
11. Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan PerikananLingkup Stasiun PSDKP Belawan (Indeks) dengan target 93 dan capaian sebesar 100;
12. Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (indeks) dengan target 80 dan capaian 88,41;
13. Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (nilai) dengan target 75 dan capaian 82,45;
14. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Stasiun PSDKP Belawan (nilai) target 70 dan capaian 81,48;

15. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%) target 100 dan capaian 100;
16. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Belawan (indeks) dengan target 82 dan capaian 90,97;
17. Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (nilai) dengan target 84 dan capaian 85,45;
18. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%) dengan target 80% dan capaian sebesar 100%;
19. Nilai implementasi program budaya kerja Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (nilai) dengan target 70 dan capaian sebesar 75,11;
20. Inovasi Pelayanan Publik Yang Diterapkan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (inovasi) target 1 dan capaian sebesar 1;
21. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%) dengan target 94% dan capaian sebesar 130%;
22. Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%) dengan target 80 dan capaian sebesar 100;
23. Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%) dengan target 80 dan capaian sebesar 89,11;
24. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PSDKP Belawan dengan (Nilai) target 93,76 dan capaian sebesar 93,98;
25. Nilai kinerja pelaksanaan anggaran Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (nilai) dengan (Nilai) target 71 dan capaian sebesar 84,49;

Realisasi anggaran tahun 2024 yang telah dicapai oleh Stasiun Pengawasan SDKP Belawan sampai 31 Desember 2024 sebesar 99,78% atau sebesar Rp 39.139.606.512,- (*Tiga Puluh Sembilan Milyar Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Enam Ribu Lima Ratus Dua Belas Rupiah*) dari total anggaran yang di alokasikan yaitu Rp. 39.223.972.000,- (*Tiga Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Dua Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah*). Laporan Kinerja Tahun 2024 ini diharapkan dapat menjadi bahan pembandingan sehingga pencapaian kinerja pada tahun kedepan dapat lebih optimal. Untuk mempertahankan dan memperbaiki capaian Indikator kinerja pada tahun 2025, Stasiun PSDKP Belawan akan melakukan monitoring dan evaluasi setiap kegiatan atau Indikator Kinerja Stasiun PSDKP Belawan pada Tahun 2025.

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Isu AkBelawan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	2
D. Data Umum Organisasi	3
E. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja	7
BAB II	8
PERENCANAAN KINERJA	8
A. Rencana Strategis Ditjen. PSDKP 2020-2024	8
B. Rencana Strategis Stasiun Pengawasan SDKP Belawan Tahun 2020 – 2024	10
C. Program Kerja Pengawasan SDKP	10
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	11
E. Pengukuran Capaian Kinerja	15
BAB III	16
AKUNTABILITAS KINERJA	16
A. Capaian Kinerja Pembangunan Kelautan dan Perikanan Bidang Pengawasan SDKP Tahun 2024	16
1. Capaian Sasaran Kegiatan Stasiun PSDKP Belawan Tahunan Tahun 2024	16
2. Capaian Kinerja Utama Stasiun PSDKP Belawan Tahun 2024 Tahunan	16
B. Analisis Pencapaian Kinerja	19
1. Sasaran Kegiatan 2: Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif	19
2. Sasaran Kegiatan 3: Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan	34
3. Sasaran Kegiatan 4: Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan	61
4. Sasaran Kegiatan 6: Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas	79
5. Sasaran kinerja 8: Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP	84

C. Realisasi Anggaran	103
BAB IV	108
PENUTUP	108
A. Kesimpulan.....	108
B. Saran dan Rekomendasi.....	108

Daftar Tabel

Tabel 1 Data Armada Armada Kapal Pengawas, <i>Speedboat</i> dan RIB siap operasi.....	6
Tabel 2. Komposisi Pegawai Stasiun Pengawasan SDKP Belawan berdasarkan Unit Kerja	7
Tabel 3 Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Belawan Tahun 2024.....	12
Tabel 4 Capaian Kinerja Stasiun PSDKP Belawan Tahun 2024	17
Tabel 5 Realisasi Anggaran Stasiun PSDKP Belawan Tahun 2024.....	18
Tabel 6 capaian IK 1.....	20
Tabel 7 Perbandingan IK 1 antar UPT	20
Tabel 8 Capaian IK 2	24
Tabel 9 Perbandingan IK 2 antar UPT	24
Tabel 10 Perhitungan capaian IKU 2.....	25
Tabel 11. Capaian Hari Operasional Kapal Pengawas Tahun 2024.....	26
Tabel 12 Capaian IKU 3	29
Tabel 13 Perbandingan IK 3 antar UPT	29
Tabel 14 Perhitungan capaian IKU 3.....	30
Tabel 15 Realisasi armada speedboat lingkup Stasiun PSDKP Belawan.....	31
Tabel 16 Capaian IK 4.....	33
Tabel 17 Perbandingan IK 4 antar UPT	33
Tabel 18. Capaian IKU 5	35
Tabel 19. Perbandingan IKU 5 antar UPT	35
Tabel 20 Capaian IKU 6	37
Tabel 21. Perbandingan IKU 6 antar UPT	37
Tabel 22. Tahapan pemeriksaan IKU 7.....	40
Tabel 23. Capaian IKU 7	40
Tabel 24. Perbandingan IK 7 antar UPT	40
Tabel 25 Rekap pemeriksaan SDK Tahunan	41
Tabel 26. Rekap Pengawasan Pencemaran.....	44
Tabel 27. Rekap Pengawasan PRL.....	52
Tabel 28 Rekap pengawasan jenis ikan dilindungi	57
Tabel 29. Rekap pengawasan pelaku usaha pemanfaatan produk dan jasa kelautan	58
Tabel 30. Rekap pengawasan DF	60
Tabel 31. Pemeriksaan IKU 8.....	61
Tabel 32. Capaian IK 8.....	62
Tabel 33 Perbandingan IKU 8 antar UPT	63
Tabel 34. Pengawasan penangkapan kapal perikanan.....	65
Tabel 35. Rekap Pengawasan Pengolahan.....	73
Tabel 36 Rekap Pengawasan Distribusi/ Pemasaran	75
Tabel 37 Rekap pengawasan budidaya	76
Tabel 38. kriteria indeks sanksi adm.....	80
Tabel 39. Rekapitulasi Sanksi Administrasi Stasiun PSDKP Belawan Tahun 2024.....	80
Tabel 40. Capaian IK 9.....	80
Tabel 41 Perbandingan IKU 9 antar UPT	81
Tabel 42 kriteria indeks.....	82
Tabel 43 Rekapitulasi SPKP	83
Tabel 44 Capaian IKU 10	83

Tabel 45 Perbandingan IKU 10 antar UPT	83
Tabel 46 Rekapitulasi Kasus TPKP Stasiun PSDKP Belawan Tahun 2024	85
Tabel 47. Capaian IKU 11	85
Tabel 48. Perbandingan IKU 11 antar UPT	85
Tabel 49 Capaian IK 12.....	88
Tabel 50. Perbandingan IK 12 dengan UPT Sejenis	88
Tabel 51 Capaian IK 12.....	90
Tabel 52 Perbandingan IK 12 antar UPT	90
Tabel 53 Capaian IK 14.....	91
Tabel 54 Perbandingan IK 14 antar UPT	91
Tabel 55 Capaian IK 15.....	92
Tabel 56 Perbandingan IK 15 antar UPT	93
Tabel 57 Capaian IK 16.....	94
Tabel 58 Perbandingan IK 16 antar UPT	94
Tabel 59 Capaian IK 17.....	95
Tabel 60. Perbandingan IK 17 antar UPT	95
Tabel 61 Capaian IK 18.....	96
Tabel 62. Perbandingan IK 18 antar UPT	96
Tabel 63 Capaian IK 19.....	98
Tabel 64 Perbandingan IK 19 antar UPT	98
Tabel 65 Capaian IK 20.....	99
Tabel 66 Perbandingan IK 20 antar UPT	99
Tabel 67 Capaian IK 21.....	100
Tabel 68. Perbandingan IK 21 antar UPT	100
Tabel 69 Capaian IK 22.....	101
Tabel 70. Perbandingan IK 22 antar UPT	102
Tabel 71 Capaian IK 23.....	103
Tabel 72 Perbandingan IK 23 antar UPT	103
Tabel 73 Capaian IKPA Stasiun PSDKP Belawan	104
Tabel 74 Capaian IK 24.....	104
Tabel 75 Perbandingan IK 24 antar UPT	104
Tabel 76 Capaian IK 25.....	105
Tabel 77 Perbandingan IK 25 antar UPT	105
Tabel 78. Realisasi Anggaran Stasiun PSDKP Belawan Tahun 2024	107
Tabel 79 Saran dan Rencana Tindak Lanjut atas pencapaian kinerja Stasiun PSDKP Belawan Periode Tahun 2024.....	108

Daftar Gambar

Gambar 1 Struktur Organisasi Stasiun PSDKP Belawan	5
Gambar 2 Wilayah Kerja Stasiun Pengawasan SDKP Belawan	6
Gambar 3 Sistematika Penyusunan Lkj Stasiun PSDKP Belawan	7
Gambar 4 Rata-rata Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan (NPSK) Stasiun PSDKP Belawan.....	16
Gambar 5 Gedung yang diselesaikan	36
Gambar 6 Pengawasan perizinan berusaha sektor penangkapan ikan	73
Gambar 7 Pengawasan perizinan berusaha sektor pengolahan ikan	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam konteks pembangunan kelautan dan perikanan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) berperan dalam penegakan hukum dan peraturan perundangan-undangan di bidang kelautan dan perikanan guna menjamin terselenggaranya pemanfaatan dan pengelolaan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab. Peran tersebut diimplementasikan melalui pelaksanaan program/kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui terwujudnya kepatuhan (*compliance*) pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Kinerja (LKj) Tahunan, UPT Stasiun Pengawasan SDKP Belawan Tahun 2024 merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan diseminasi capaian kinerja dalam satu tahun anggaran berdasarkan komitmen yang telah ditetapkan sebelumnya. LKj ini menginformasikan kegiatan- kegiatan yang menjadi fokus Stasiun Pengawasan SDKP Belawan untuk mencapai target kinerja yang telah disusun dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana aturan tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengawasan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan dalam rangka perwujudan "*good governance*".

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud :

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Stasiun PSDKP Belawan Tahun 2024 adalah sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja pengawasan SDKP setiap tahun anggaran kepada masyarakat dan *stakeholders* lainnya.

2. Tujuan :

Tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari penerapan manajemen kinerja UPT Stasiun Pengawasan SDKP Belawan dari tahun sebelumnya dan memperbaiki kinerja kearah yang lebih baik dimasa datang, yang dimulai dari proses perencanaan secara benar, pelaksanaan dan evaluasinya. Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi yang dilakukan pada setiap tahun, akan dirumuskan beberapa rekomendasi sebagai masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi pencapaian target yang lebih baik di tahun berikutnya.

C. Isu Aktual Belawan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Isu aktual Belawan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang menuntut perlunya dilakukan pengawasan terhadap pemanfaatan SDKP di Wilayah Kerja Stasiun PSDKP Belawan, antara lain:

1. Bidang Perikanan Tangkap

- a. Masih maraknya kegiatan *illegal fishing* di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) baik yang dilakukan oleh Kapal Ikan Indonesia (KII) dan Kapal Ikan Asing (KIA) di Wilayah Stasiun PSDKP Belawan;
- b. Adanya dugaan kegiatan *transshipment* di laut;
- c. Tidak terpantaunya kapal – kapal perikanan melalui radar VMS;
- d. Hasil tangkapan yang tidak dilaporkan kepada Pengawas Perikanan.
- e. Masih terdapat kegiatan penangkapan yang merusak.

2. Bidang Perikanan Budidaya

- a. Pengangkutan ikan hidup yang tidak terkontrol dengan baik.
- b. Masih terdapat pelaku usaha yang belum memiliki perizinan dasar yaitu PKKPR.

3. Bidang Pengolahan Hasil Perikanan

- a. Masih banyak UPI yang tidak memiliki SIUP dan SKP.

4. Bidang pengelolaan sumber daya kelautan

- a. Kerusakan terumbu karang akibat penambangan karang dan penggunaan alat tangkap yang merusak habitat ikan, seperti: bom, racun, dan *stroom*.
- b. Eksploitasi mangrove.
- c. Penambangan pasir besi dan pasir laut yang menyebabkan rusaknya ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil.
- d. Kegiatan perikanan yang menyebabkan pencemaran perairan pesisir dan laut.
- e. Ketidaksesuaian Lokasi pemanfaatan ruang laut.

D. Data Umum Organisasi

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Stasiun Pengawasan SDKP Belawan merupakan Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Stasiun PSDKP Belawan menyelenggarakan beberapa fungsi yaitu:

- a) Penyusunan rencana, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, serta laporan;
- b) Pelaksanaan operasional pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- c) Pelaksanaan bimbingan kepada Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS);
- d) Pelaksanaan penyiapan logistik dan pemeliharaan Kapal Pengawas Perikanan;
- e) Pelaksanaan penanganan pelanggaran pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan;
- f) Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengawasan; dan

g) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

2. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi (TUSI) organisasi yang telah ditetapkan, perlu dilakukan pembagian tugas dan kewenangan yang digambarkan dalam struktur organisasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, maka dalam menjalankan tugasnya Kepala Stasiun membawahi Kepala Sub Bagian Umum serta membawahi Kelompok Jabatan Fungsional, dimana masing-masing mempunyai tugas dan kewenangan seperti berikut :

a. Kepala Stasiun:

Merumuskan kebijakan operasional, mengkoordinasikan, mengarahkan dan melaksanakan manajerial dibidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan serta melakukan pembinaan kepada bawahan di lingkungan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan untuk mencapai kelancaran pelaksanaan tugas.

b. Kepala Subbagian Umum:

Melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan. Sesuai Peraturan MENPAN RB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi maka untuk membantu tugas Kepala Subbagian Umum maka dibentuklah tim kerja pada lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan yang terdiri atas

1. Ketua Tim Kerja Intelijen dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan;
2. Ketua Tim Kerja Intelijen dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan;
3. Ketua Tim Kerja Penanganan Pelanggaran;
4. Ketua Tim Kerja Prasarana, Sarana dan Operasi Kapal Pengawas.

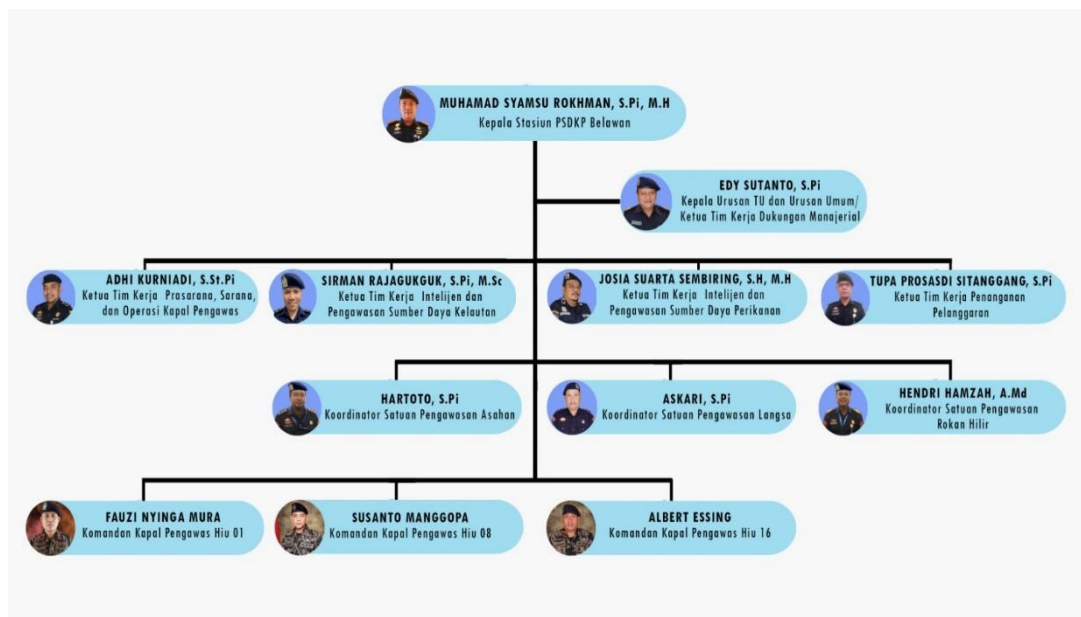
c. Kelompok Jabatan Fungsional:

Fungsional Pengawas melaksanakan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan serta kegiatan lain sesuai dengan tugas jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan untuk

fungsional lainnya disesuaikan dengan bidang tugas fungsional yang diembannya berdasarkan SK fungsional yang telah ditetapkan.

f. Satuan Pengawasan SDKP:

Melaksanakan kegiatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, pembinaan kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) serta evaluasi, dokumentasi, informasi dan pelaporan dibidang pengawasan dan penanganan pelanggaran sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah kerja masing-masing dan dipimpin oleh seorang Koordinator. Untuk mendukung terlaksananya kegiatan pengawasan SDKP secara baik sampai ke daerah, maka telah dibentuk Satuan Pengawasan SDKP dan Wilker dibawah koordinasi UPT Stasiun Pengawasan SDKP Belawan meliputi 5 Satuan Pengawasan (Satwas) dan 10 Wilayah Kerja (Wilker) sebagaimana Struktur Organisasi pada Gambar 1 dibawah ini :



Gambar 1 Struktur Organisasi Stasiun PSDKP Belawan

3. Wilayah Kerja

Wilayah kerja Stasiun Pengawasan SDKP Belawan meliputi 3 Propinsi (Aceh, Sumatera Utara dan Riau) dan 1 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), yakni WPP 571, meliputi perairan Selat Malaka. Untuk lebih jelasnya ditunjukkan pada Gambar berikut:

5. Kepegawaian

Jumlah keseluruhan pegawai Stasiun Pengawasan SDKP Belawan sampai Tahun 2024 sebanyak 128 orang, yang terdiri dari PNS Pusat Direktorat Jenderal Pengawasan SDKP sebanyak 69 orang, 25 orang PPPK, 9 orang PPNPN dan PJLP sebanyak 25 orang, untuk lebih jelasnya ditunjukkan pada Tabel di bawah:

Tabel 2. Komposisi Pegawai Stasiun Pengawasan SDKP Belawan berdasarkan Unit Kerja

No	Unit Kerja	PNS	PPPK	PPNPN	PJLP	Jumlah
1	Stasiun PSDKP Belawan	28	7	5	13	53
2	Satwas SDKP Langsa	3			1	4
3	Wilker PSDKP Idi	2			2	4
4	Wilker PSDKP Lhokseumawe	1	1			2
5	Wilker PSDKP Biureun	1				1
6	Wilker PSDKP Sigli		1			1
7	Satwas SDKP Asahan	5	3	3	1	12
8	Wilker PSDKP Batubara				1	1
9	Satwas SDKP Rokan Hilir	3		1	1	5
10	Wilker PSDKP Panipahan				1	1
11	Wilker PSDKP Dumai	1			1	2
12	Wilker PSDKP Kepulauan Meranti	2				2
13	Wilker PSDKP Tembilahan	2				2
14	Hiu 01	8	3		1	12
15	Hiu 08	6	5		1	12
16	Hiu 16	7	3		2	12
	Luar Belawan		2			2
Jumlah Total		69	25	9	25	128

Sumber: Bagian Kepegawaian Sub Bagian Umum Stasiun PSDKP Belawan

E. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

Secara garis besar sistematika penyajian Laporan Kinerja Stasiun PSDKP Belawan Tahun 2024 diuraikan sebagai berikut :



Gambar 3 Sistematika Penyusunan Lkj Stasiun PSDKP Belawan

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdiri dari: ⁽¹⁾Rencana Strategis Ditjen. PSDKP Tahun 2020 - 2024; ⁽²⁾Manual Indikator Kinerja Tahun 2024; ⁽³⁾Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024; ⁽⁴⁾Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Belawan Tahun 2024.

A. Rencana Strategis Ditjen. PSDKP 2020-2024

Rencana Strategis (Renstra) Ditjen. PSDKP 2020 - 2024 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai tugas dan fungsi yang diamanatkan.

Renstra tersebut disusun selaras dengan arah kebijakan strategis nasional bidang kelautan dan perikanan 2020 – 2024 sebagaimana tertuang dalam Renstra KKP 2020 - 2024. Renstra tersebut juga disusun dengan menggunakan berbagai asumsi serta kombinasi pendekatan *bottom up* dan *top down* dengan keterlibatan Eselon I, Eselon II, Eselon III dan Eselon IV lingkup Ditjen PSDKP. Pendekatan *top down* mengandung makna bahwa perencanaan ini memperhatikan pula ketersediaan anggaran sesuai dengan estimasi APBN. Sedangkan pendekatan *bottom up* dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan pendanaan guna mewujudkan kondisi ideal.

Secara ringkas substansi Renstra Ditjen. PSDKP periode 2020 – 2024 diuraikan sebagai berikut:

1. Pernyataan Visi dan Misi

Dalam rangka memberikan arah pandangan kedepan terkait dengan kinerja dan peranan Ditjen. PSDKP serta untuk memberikan gambaran tentang kondisi masa depan yang ingin diwujudkan oleh Ditjen. PSDKP, maka dirumuskan visi Ditjen PSDKP yang mencerminkan keadaan yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan.

Visi :

"Pengawasan SDKP yang tangguh dan efektif untuk mewujudkan pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab menuju terwujudnya Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan"

Sejalan dengan visi Ditjen. PSDKP, diperlukan rumusan mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang mencerminkan apa yang akan dapat dicapai (pada level dampak) dan bagaimana mencapainya dalam periode tertentu, beserta ukuran-ukuran pencapaiannya. Misi yang dirumuskan menggambarkan tindakan atau upaya sesuai dengan tugas dan fungsi Ditjen. PSDKP.

Misi :

- a. Meningkatkan kualitas SDM pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui pengokohan budaya kerja dan pengembangan inovasi;
- b. Mendukung peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional melalui upaya peningkatan kepatuhan para pemangku kepentingan kelautan dan perikanan;
- c. Mendukung peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan dengan memastikan setiap kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dilakukan secara bertanggung jawab;
- d. Meningkatkan tata Kelola pemerintahan pada lingkup Ditjen PSDKP

2. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 s/d 5 tahun. Perumusan tujuan menggambarkan hasil-hasil serta manfaat yang akan diberikan oleh Ditjen. PSDKP. Berdasarkan pada hasil analisis lingkungan internal dan eksternal, maka tujuan Ditjen. PSDKP dirumuskan sebagai berikut:

Tujuan Strategis:

- a. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan melalui meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan

perikanan terutama berkaitan dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;

- b. Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional melalui meningkatnya pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
- c. Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan melalui optimalnya pengelolaan kawasan konservasi perairan dan optimalnya pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- d. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP melalui peningkatan tata kelola pemerintahan lingkup Ditjen PSDKP.

B. Rencana Strategis Stasiun Pengawasan SDKP Belawan Tahun 2020 – 2024

UPT Stasiun Pengawasan SDKP Belawan menitik beratkan kegiatan operasional pengawasan dengan cara memadukan kebijakan pusat dan UPT Stasiun PSDKP Belawan adalah pemokus kegiatan pengawasan kepada perlindungan sumberdaya kelautan dan perikanan untuk mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal PSDKP.

Adapun visi dan misi UPT Stasiun Pengawasan SDKP Belawan mengacu pada visi dan misi Ditjen PSDKP, yang dijabarkan oleh UPT Stasiun Pengawasan SDKP Belawan melalui tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Tujuan : Melakukan pengawasan dalam pengelolaan sumber daya kelautan perikanan secara berkelanjutan di wilayah kerja Stasiun Pengawasan SDKP Belawan.

Sasaran : Indonesia bebas *illegal fishing* serta kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan dan perikanan.

C. Program Kerja Pengawasan SDKP

1. Program

Program merupakan instrument kebijakan yang berisikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh kementerian/Lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran. Program kerja Stasiun Pengawasan SDKP Belawan 2020 – 2024 yaitu: PROGRAM PENGAWASAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN.

2. Kegiatan

Rumusan kegiatan tingkat UPT Stasiun Pengawasan SDKP Belawan, yang merupakan turunan dari fungsi eselon II Ditjen PSDKP, meliputi:

- Kegiatan Pemantauan dan Operasi Armada;
- Kegiatan Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan;
- Kegiatan Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan;
- Kegiatan Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan; dan
- Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Stasiun PSDKP Belawan.

Selain kegiatan di atas Stasiun PSDKP Belawan juga berperan aktif dan terlibat dalam mendukung program ekonomi biru Menteri kelautan dan perikanan

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk: ⁽¹⁾ Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; ⁽²⁾ Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; ⁽³⁾ Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Stasiun PSDKP Belawan telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2024 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsinya. Selain merupakan pemenuhan amanat kebijakan pengelolaan kinerja yang telah ditetapkan oleh KKP, juga ditujukan untuk:

1. Menerjemahkan strategi organisasi ke dalam rencana operasional dengan baik, sehingga manajemen kinerja organisasi akan selaras dengan strategi organisasi;
2. Membangun organisasi yang terus menerus melakukan perbaikan (*continuous improvement*);
3. Membangun keselarasan antar unit kerja dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi organisasi.

Arah kebijakan pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan Tahun 2020-2024 merupakan penjabaran lebih detail arah kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 khususnya pada kebijakan "membangun kedaulatan yang mampu menopang kemandirian ekonomi dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan

perikanan”. Sehingga kebijakan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan Tahun 2020-2024, ditetapkan yaitu “Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan guna menegakkan perundang-undangan bidang kelautan dan perikanan dalam rangka mewujudkan kedaulatan dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan”. Guna mewujudkan kebijakan tersebut ditetapkan melalui 6 strategi *implementatif* yaitu :

1. Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Pengawasan SDKP, Peningkatan Kapasitas SDM dan Pemenuhan Regulasi
2. Pemberian sanksi yang tegas bagi pelaku pelanggaran dan penguatan koordinasi dengan lintas institusi penegak hukum di laut
3. Penguatan Sistem Pengawasan Terpadu (*Integrated Surveillance System/ISS*).
4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan SDKP.
5. Meningkatkan Pengawasan Kepatuhan dalam Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
6. Meningkatkan Kerjasama Pengawasan SDKP di tingkat Nasional, Regional dan Internasional.

Indikator Kinerja Stasiun PSDKP Belawan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja sebagaimana tabel berikut;

Tabel 3 Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Belawan Tahun 2024

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
SK. 1	Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif	01	Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (indeks)	81
SK. 2	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif	02	Indeks kinerja operasi kapal pengawas lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (indeks)	91
		03	Indeks kinerja operasi speedboat pengawas lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (indeks)	91
		04	Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (%)	100
SK. 3	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	05	Persentase sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (%)	100

		06	Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan(%)	100%
SK. 4	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan	07	Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (Nilai)	100
SK. 5	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan	06	Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (Nilai)	100
SK. 6	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas	09	Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (indeks)	80
		10	Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (Indeks)	80
SK. 7	Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang berkualitas	11	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (Indeks)	93
SK. 8	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP	20	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan	80
		12	Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan	75
		14	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (nilai)	70
		13	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (%)	100
		15	Indeks profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan	82
		16	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan	84
		17	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup UPT Stasiun	80%

			PSDKP Belawan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	
		18	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan	70
		19	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (inovasi)	1
		21	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan	94%
		22	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan	80%
		23	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa Lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan	80%
		24	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan	93,76
		25	Nilai kinerja anggaran (NKA) lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan	71

Selama tahun 2024 terdapat 3 kali revisi terhadap perjanjian kinerja Stasiun PSDKP Belawan, berikut perubahan disetiap revisi perjanjian kinerja dengan penjelasan revisi dilakukan;

1. 15 Februari 2024, revisi perjanjian kinerja I terhadap penandatanganan pihak kedua yang sebelumnya Laksamana Muda TNI Dr. Adin Nurawaluddin, M.Han ke Dr. Pung Nugroho Saksono, A.Pi., MM. Selaku Plt. Direktur Jenderal PSDKP;
2. 8 Oktober 2024, revisi perjanjian kinerja II berupa perubahan target IKM NKA yang semula 82 diubah menjadi 71, berdasarkan nota dinas Sekretariat Jenderal nomor 3250/SJ.2/TU.210/IX/2024 tanggal 12 September 2024 perihal Revisi Target dan Manual IKU NKA KKP TA. 2024;
3. 27 Desember 2024, revisi perjanjian kinerja III berupa perubahan nomenklatur IKM Nilai Kinerja Anggaran menjadi Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran dan perubahan target IKM Nilai Implementasi Program Budaya Kerja dari 21 menjadi 70 berdasarkan surat Sekretaris Ditjen PSDKP nomor B.5322/PSDKP.1/RC.210/XII/2024 tanggal 27 Desember 2024 perihal Revisi Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

E. Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran tingkat capaian IKU dilakukan dengan berpedoman pada formula penghitungan yang telah ditetapkan dalam Informasi Indikator Kinerja atau Manual Indikator Kinerja. Selanjutnya nilai capaian tersebut dihitung dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala melalui penyusunan laporan kinerja Tahunan didukung dengan pengukuran pada aplikasi “Kinerjaku” yang merupakan aplikasi Pengelolaan Kinerja berbasis informasi teknologi (dapat diakses di www.kinerjaku.kkp.go.id).

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Pembangunan Kelautan dan Perikanan Bidang Pengawasan SDKP Tahun 2024

1. Capaian Sasaran Kegiatan Stasiun PSDKP Belawan Tahunan Tahun 2024

Berdasarkan perjanjian kinerja Tahun 2024, Stasiun PSDKP Belawan telah menyempurnakan dan menetapkan 8 Sasaran Kegiatan dengan 25 Indikator Kinerja yang terdiri atas 11 IKU dan 14 IKM. Nilai Rata-rata Nilai Pencapaian Sasaran Program (NPSS) Stasiun PSDKP Belawan sebesar 106,43% untuk tahun 2024, capaian dapat dilihat pada Gambar di bawah ini



Sumber: SAPK (kinerjaku.kkp.go.id)

Gambar 4 Rata-rata Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan (NPSK) Stasiun PSDKP Belawan

Rata-rata NPSK diperoleh dari akumulasi penghitungan capaian seluruh sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dan menjadi kontrak kinerja antara Kepala Stasiun PSDKP Belawan dengan Direktur Jenderal PSDKP. Adapun Nilai setiap sasaran kegiatan merupakan hasil penghitungan atas 25 indikator kinerja utama yang menjadi parameter tercapainya sasaran kegiatan. Capaian masing-masing sasaran kegiatan dan IKU serta IKM pembentuk NPSK akan diuraikan lebih lanjut.

2. Capaian Kinerja Utama Stasiun PSDKP Belawan Tahun 2024 Tahunan

Sebagaimana telah diuraikan pada Bab sebelumnya pada Tahun 2024 Stasiun PSDKP Belawan telah menyempurnakan dan menetapkan 8 Sasaran Kegiatan dengan 25 Indikator Kinerja. Capaian kinerja Tahunan Tahun 2024 ditabulasikan seperti tercantum dalam Tabel berikut.

Tabel 4 Capaian Kinerja Stasiun PSDKP Belawan Tahun 2024

Kode		Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	Perhitungan	Target	Target	Capaian	%
						2024	DESEMBER	DESEMBER	
SK1		Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif						120	
	1	Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	81	81	100	120
SK2		Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif						104,9	
	2	Indeks kinerja operasi kapal pengawas	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	91	91	97,6	107,25
	3	Indeks kinerja operasi speedboat pengawas	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	91	91	100	109,89
	4	Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100	100	100	100
SK3		Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan						100	
	5	Persentase Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100	100	100	100
	6	Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100	100	100	100
SK4		Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan						100	
	7	Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100	100	100	100
SK5		Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan						100	
	8	Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100	100	100	100
SK6		Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas						108	
	9	Indeks penganan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	80	80	80	100
	10	Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	80	80	100	120
SK7		Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang berkualitas						107,53	
	11	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan PerikananLingkup Stasiun PSDKP Belawan	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	93	93	100	107,53
SK8		Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP						110,98	
	12	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Lingkup Stasiun PSDKP Belawan	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	80	80	88,41	110,51
	13	Nilai Minimal yang Diperyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Lingkup Stasiun PSDKP Belawan	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	75	75	82,45	109,93
	14	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Stasiun PSDKP Belawan	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	70	70	81,48	116,4
	15	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup UPT Pengawasan SKDP Lingkup Stasiun PSDKP Belawan	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100	100	100	100

16	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Pengawasan SDKP Lingkup Stasiun PSDKP Belawan	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	82	82	90,97	110,94
17	Penilaian Mandiri SAKIP SAKIP Lingkup Stasiun PSDKP Belawan	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	84	84	85,45	101,73
18	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	80	80	100	120
19	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja Lingkup Stasiun PSDKP Belawan	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	70	70	75,11	107,3
20	Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan	Inovasi	Maximize	Nilai Posisi Akhir	1	1	1	100
21	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Lingkup Stasiun PSDKP Belawan	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	94	94	130	120
22	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP Belawan	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	80	80	100	120
23	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Stasiun PSDKP Belawan	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	80	80	89,11	111,39
24	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PSDKP Belawan	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	93,76	93,76	93,98	100,23
25	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Stasiun PSDKP Belawan	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	71	71	84,49	119

Pada tahun 2024 Stasiun PSDKP Belawan menetapkan 25 Indeks Kinerja dan dalam aktualisasinya 25 IK telah dilaksanakan dengan kriteria 15 IK dengan predikat baik dan, 10 IK dengan predikat istimewa. Pelaksanaan kegiatan dalam pemenuhan IK dimaksud terdapat kendala maupun faktor pendukung yang mendorong tercapainya kegiatan atas IK yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan sepanjang tahun 2024. Realisasi anggaran pada Triwulan IV Tahun 2024 yang telah dicapai oleh Stasiun Pengawasan SDKP Belawan sebesar 99,78% atau sebesar Rp 39.139.606.512,- (*Tiga Puluh Sembilan Milyar Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Enam Ribu Lima Ratus Dua Belas Rupiah*) dari alokasi anggaran Rp. 39.223.972.000,- (*Tiga Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Dua Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah*).

Tabel 5 Realisasi Anggaran Stasiun PSDKP Belawan Tahun 2024

No	Nama Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
1	Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan	20,590,716,000	20,561,705,982	99,86%
2	Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	720,422,000	679,586,765	94,33%
3	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	512,707,000	512,398,719	99,94%
4	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	1,072,000,000	1,071,076,387	99,91%
5	Dukungan Manajemen	16,328,127,000	16,314,838,659	99,92%
Total		39,223,972,000	39,139,606,512	99,78%

B. Analisis Pencapaian Kinerja

Selama tahun 2024 Stasiun PSDKP Belawan telah melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Terdapat 25 indeks kinerja yang telah dicapai oleh Stasiun PSDKP Belawan pencapaian terhadap evaluasi dan analisis pada setiap sasaran kegiatan diuraikan sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan 1: Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif

Sasaran kegiatan pertama menghasilkan 1 indikator kinerja utama yang ditetapkan Stasiun PSDKP Belawan yaitu "Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas Lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (Indeks)"

a. IKU 1: Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas Lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (Indeks)

Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) merupakan Sistem Pengawasan SDKP berbasis Masyarakat (SIMSWASMAS). Indeks kualitas pembinaan POKMASWAS digunakan untuk menentukan kualitas pelaksanaan pembinaan POKMASWAS oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Stasiun PSDKP Belawan. Pembinaan POKMASWAS adalah kegiatan pemberian pedoman, standar pelaksanaan, bimbingan, konsultasi, dan evaluasi pelaksanaan pengawasan, yang dilakukan melalui pembekalan, sosialisasi dan/atau bimbingan teknis kepada anggota POKMASWAS guna meningkatkan pengetahuan dan partisipasi aktif POKMASWAS dalam membantu pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, kegiatan tersebut kemudian dituangkan dalam sebuah laporan. Komponen penilaian kegiatan pembinaan POKMASWAS antara lain:

- Rencana kerja kegiatan pembinaan;
- Pendataan keaktifan POKMASWAS;
- Pelaksanaan kegiatan pembinaan.

Formula:

$$x = \frac{(a+b+c)}{100} \times 100\%$$

Keterangan:

- x : Indeks Kualitas Supervisi Pembinaan POKMASWAS (%)
 a : Rencana kerja kegiatan pembinaan (bobot: 20)
 b : Pendataan keaktifan POKMASWAS (bobot: 30)
 c : Pelaksanaan kegiatan pembinaan (bobot: 50)

Selama tahun 2024 Stasiun PSDKP Belawan memperoleh capaian atas IKU ini sebesar 100 dari target 81, capaian tersebut dikarenakan semua tahapan pelaksanaan kegiatan pembinaan telah dijalankan sesuai dengan mekanisme yang tertuang dalam manual indikator kinerja. Perencanaan, pendataan keaktifan POKMASWAS dan diakhiri dengan pelaksanaan kegiatan pembinaan. Kegiatan

$$x = \frac{a + b + c}{100} \times 100\%$$

$$x = \frac{20 + 30 + 50}{100} \times 100\% = 100\%$$

Berikut kami sajikan capain dalam bentuk tabel

Tabel 6 capaian IK 1

Indikator Kinerja				Target		Realisasi				
				2024	2024	2023	2022	2021	2020	Renstra
Indeks	kualitas	pembinaan	Pokmaswas	81	100	100	-	-	-	-
Lingkup	UPT	Stasiun	PSDKP Belawan							
(Indeks)										

Tabel 7 Perbandingan IK 1 antar UPT

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		Belawan	Cilacap	Biak	Ambon	Pontianak	Kupang	Tarakan	Tahuna
SK.1	Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif	IKU 1	Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas Lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (Indeks)	100	100	-	100	100	100	100	-

Kegiatan pembinaan POKMASWAS dilaksanakan di otel Grand MalakaTanjung Tiram BatuBara, Jl. Selamat Datang Simpang, Jl. Imam Bonjol, Labuhan Ruku,Kec.Tj.Tiram, Kabupaten Batu Bara,Sumatera Utara 21253 pada tanggal 7 Agustus 2024. Adapun Kegiatan tersebut dihadiri oleh Pokmaswas Nibung Hangus, Pokmaswas Bintang Laut, Pokmaswas Fajar Sentosa, dan Pokmaswas Deras Bersatu, Ketua DPRD Kab. Batubara,Kadis Perikanan Batubara, Syahbandar Perikanan di Pelabuhan Perikanan Tanjung Tiram, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kuala Tanjung, Kanit Polairud Batu Bara, Danposal Tanjung Tiram, Anggota Kapolres Batu Bara (diwakili), Danramil 05 Tanjung Tiram, Camat TanjungTiram,

Sekjen HNSI Batu Bara. Kegiatan berjalan dengan khidmat dengan materi yang dibawakan oleh

Jika kita melihat tabel yang telah disajikan maka IK 1 merupakan IK yang baru dilaksanakan Stasiun PSDKP Belawan pada tahun 2023 dan 2024. Selama dua tahun mengemban IKU tersebut capaian tetap dipertahankan dengan nilai yang maksimal. Capaian IK pembinaan POKMASWAS tidak dapat kita bandingkan dengan target renstra dikarenakan terdapat penyesuaian terhadap IK tersebut sehingga tidak relevan untuk dibandingkan.

Analisa penyebab keberhasilan IK 1 diantaranya;

- UPT Stasiun PSDKP Belawan melalui Satwas Tanjung Balai Asahan turut serta memantau keaktifan POKMASWAS, dengan membangun komunikasi yang intens dengan pokmaswas maupun lembaga terkait;
- Aktif membangun komunikasi dengan pusat dan daerah dalam hal ini Direktorat POA dan DKP terkait penyelenggaraan kegiatan baik pemateri dan lokasi serta mobilisasi kehadiran POKMASWAS dalam kegiatan dimaksud;
- Stasiun PSDKP Belawan merespon cepat pelaksanaan kegiatan pembinaan POKMASWAS diawal tahun 2024 sehingga meminimalisir adanya benturan pelaksanaan dengan kegiatan lainnya;
- Stasiun PSDKP Belawan turut mendelegasikan perwakilan ke Satwas Tanjung Balai Asahan untuk memantau dan turut serta ikut mensukseskan kegiatan pembinaan POKMASWAS.

Kegiatan yang menunjang keberhasilan adalah perencanaan dan program dimana berdasarkan estimasi dan kalkulasi yang telah dilaksanakan selama penganggaran untuk tahun 2024 Stasiun PSDKP Belawan telah mampu menyediakan anggaran yang sesuai dan efisien dalam penyelenggaraan kegiatan pembinaan POKMASWAS. Realisasi yang dicapai untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 99,993,050 dari total anggaran sebesar Rp. 100.000.000 atau nyaris mendekati angka 100%.

2. Sasaran Kegiatan 2: Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif

Sasaran kegiatan kedua menghasilkan 3 Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan Stasiun PSDKP Belawan diantaranya;

1. Indeks kinerja operasi kapal pengawas lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (Indeks);

2. Indeks kinerja operasi speedboat pengawas lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (Indeks);
3. Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (%)

Penjabaran sasaran kegiatan pada 3 indikator kinerja telah dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan tugas serta fungsi Stasiun PSDKP Belawan dalam melakukan pengelolaan terhadap armada yaitu Kapal Pengawas Hiu 02, Hiu 08 dan Hiu 16, dalam melakukan pengawasan pada WPPNRI 571.

a. IKU 2: Indeks kinerja operasi kapal pengawas lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (indeks)

Indeks kinerja operasi kapal pengawas lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan merupakan salah satu indikator kinerja yang dipakai untuk menentukan sejauh mana Stasiun PSDKP Belawan mengoptimalkan armada pengawasan dalam hal ini kapal pengawas di wilayah kerja Stasiun PSDKP Belawan terutama di WPP NRI 571. Secara sederhana dalam informasi indikator kinerja IKU ini didefinisikan sebagai sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap operasional kapal pengawas agar terwujudnya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif.

Indeks Kinerja Operasional Kapal Pengawas terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni:

- a. Pemeriksaan yang terdiri dari pemeriksaan Kapal Perikanan dan pemeriksaan Kelautan;
- b. Cakupan wilayah pengawasan;
- c. Tindak Lanjut Target Operasi yang terdiri dari Intercept indikasi pelanggaran Kelautan dan Perikanan dan Dukungan Kegiatan SAR;
- d. Hasil Dukungan kegiatan operasi lainnya yang terdiri dari Penyitaan Alat Tangkap Terlarang, Pemutusan Rumpon Illegal, dan Dukungan Operasi Bersama, Terkoordinasi, Interdiksi.

Formula:

$$i_{kp} = \sum_{i=1}^4 \text{Bobot (\%)} \times \left(\frac{\text{Capaian}}{\text{Target}} \right) \times 100$$

Keterangan:

Ikp = Indeks kinerja Kapal Pengawas

Bobot (%) = Persentase pembagian Indikator yang mempengaruhi

Capaian = Realisasi capaian kinerja Kapal Pengawas
Target = Sasaran kinerja Kapal Pengawas

Variabel Pembentuk:

1. Pemeriksaan : Bobot 40%

- Pemeriksaan Kapal Perikanan (unit kapal) : Bobot 70%
- Pemeriksaan Kelautan (kali) : Bobot 30%
- Pemeriksaan Kelautan antara lain: [Pemeriksaan Kawasan Konservasi, Kawasan Mangrove, Pemanfaatan Ruang Laut (Reklamasi), Pengawasan PPKT, Pencemaran SDI dan lingkungan, Sedimentasi, dll]*
- Setiap Kapal Pengawas diberikan target pemeriksaan kapal perikanan sebanyak 3 (tiga) unit kapal per hari dan pemeriksaan kelautan sebanyak 1 (satu) objek per periode operasi.
- Target tersebut diatas dikecualikan untuk KP Akar Bahar yang dikhususkan untuk pengawasan sumber daya kelautan dengan target sebanyak 1 (satu) objek kelautan per hari.

2. Cakupan wilayah pengawasan (Bobot 40%)

- Cakupan Wilayah Pengawasan merupakan cakupan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara;
- Republik Indonesia (WPPNRI) dengan luas 1.928.506 NM2 (Sumber: BIG, 2015).
- Masing-masing kapal pengawas diberikan target cakupan per tahun. Dasar penentuan tersebut dilakukan berdasarkan kemampuan teknis kapal dan alokasi kapal setiap WPPNRI.

3. Tindak Lanjut Target Operasi (Bobot 15%)

- Intercept indikasi pelanggaran Kelautan dan Perikanan : Bobot 60%
- Dukungan kegiatan SAR : Bobot 40%
- Komponen ini bersifat situasional, apabila salah satu tidak terpenuhi dikarenakan memang tidak ada penugasan, maka dianggap memenuhi bobot/target tercapai.

4. Hasil dukungan operasi lainnya (Bobot 5%)

- Penyitaan Alat Tangkap terlarang : Bobot 30%
- Pemutusan Rumpon Illegal : Bobot 30%
- Dukungan Operasi Bersama, Terkoordinasi, Interdiksi : Bobot 40%
- Komponen ini bersifat situasional, apabila salah satu tidak terpenuhi dikarenakan memang tidak ada penugasan, maka dianggap memenuhi bobot/target tercapai.

Keterangan pola perhitungan

- TW I = TW I
- TW II = (TW I + TW II)/2
- TW III = (TW I + TW II + TW III)/3
- TW IV = (TW I + TW II + TW III + TW IV)/4

Selama tahun 2024 Stasiun PSDKP Belawan berhasil memperoleh capaian **97,6** dengan persentasi **107,25%** sampai dengan akhir tahun 2024 dari target Tahunan sebesar **91**. Berikut kami sajikan dalam bentuk tabel.

Tabel 8 Capaian IK 2

Indikator Kinerja	Target		Realisasi				
	2024	2024	2023	2022	2021	2020	Renstra
Indeks kinerja operasi kapal pengawas lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (Indeks)	91	97,6	99,41	89,7	-	-	89

Tabel 9 Perbandingan IK 2 antar UPT

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Belawan	Cilacap	Biak	Ambon	Pontianak	Kupang	Tarakan	Tahuna
SK.2	Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP yang efektif	IKU 2 Indeks kinerja operasi kapal pengawas lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (Indeks)	97,60	99,64	100	95,08	100,00	100,00	100,00	98,44

Jika dilihat pada tabel yang tersaji di atas maka capaian indeks kinerja operasi kapal pengawas lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan telah mencapai target. Perhitungan atas capaian indeks kinerja ini kami sampaikan pada tabel berikut:

Tabel 10 Perhitungan capaian IKU 2

No	Satker	Kapal Pengawas	Pemeriksaan Kapal Perikanan (70%)			Pemeriksaan Kelautan (30%)			Jumlah Pemeriksaan Kelautan dan Perikanan (40%)			Persentase Cakupan Wilayah Pengawasan (40%)			Intercept Indikasi Pelanggaran (60%)			Dukungan Kegiatan SAR (40%)			Tindak Lanjut Target Operasi (15%)			Penyitaan Alat Tangkap Terlarang (30%)			Pemutusan Rumpon Ilegal (30%)			Dukungan Operasi Bersama (40%)			Dukungan Operasi Lainnya (5%)			Total Nilai Indeks	Nilai per Satker
			TW IV			TW IV			TW IV			TW IV			TW IV			TW IV			TW IV			TW IV			TW IV			TW IV			TW IV				
			Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai		
1	Stasiun PSDKP Belawan	KP. HIU 01	135	136	70,00	5	2	12,00	32,80	0,15	0,15	40,00	0	0	60	0	0	40	15	0	0	30	0	0	30	0	0	30	0	0	40	5	92,80	97,60			
		KP. HIU 08	135	137	70,00	5	6	30,00	40,00	0,15	0,18	40,00	0	0	60	0	0	40	15	0	0	30	0	0	30	0	0	30	0	0	40	5	100,00				
		KP. HIU 16	135	148	70,00	10	13	30,00	40,00	0,50	0,57	40,00	0	0	60	0	0	40	15	0	0	30	0	0	30	0	0	30	0	0	40	5	100,00				

Realisasi anggaran operasi kapal pengawas tahun 2024 sebesar Rp 11,989,203,316,- atau sekitar 100% dari anggaran yang di sediakan sebesar Rp. 11,989,556,000,-. Realisasi hari operasi kapal pengawas Hiu 01, Hiu 08 dan Hiu 16 dapat di lihat pada tabel 11 berikut.

Tabel 11. Capaian Hari Operasional Kapal Pengawas Tahun 2024

Bulan	Kapal Pengawas		
	Hiu 01	Hiu 08	Hiu 16
Januari	0	0	5
Februari	0	0	3
Maret	10	10	4
April	0	0	5
Mei	10	10	0
Juni	0	0	8
Juli	7	7	5
Agustus	0	0	3
September	6	0	3
Oktober	0	6	4
November	0	0	0
Desember	12	12	5
TOTAL	45	45	45

Analisa penyebab keberhasilan, capaian indikator kinerja Indeks kinerja operasi kapal pengawas lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan dipengaruhi beberapa faktor antara lain;

1. **Pemeriksaan melebihi target yang ditetapkan.** Pencapaian terhadap indeks kinerja operasi kapal pengawas salah satunya berasal dari target pemeriksaan objek kelautan dan perikanan. Kapal pengawas diwajibkan melakukan pemeriksaan terhadap 3 kapal perikanan per hari operasi dan 1 objek kelautan per periode operasi. Pemeriksaan yang melewati target menjadi salah satu aktualisasi Belawan sehingga dalam suatu periode operasi jika KP tidak mampu memenuhi target operasi dikarenakan cuaca dan faktor lainnya maka kelebihan dari target dapat menjadi semacam tabungan yang mengamankan perhitungan indeks kinerja pada komponen pemeriksaan kapal perikanan.
2. Menyusun rencana operasi yang matang dan tepat sasaran, penyusunan rencana operasi dibuat dengan memperhitungkan aspek pendukung seperti wilayah potensi pelanggaran, pemeriksaan atas aktifitas pada Kawasan konservasi maupun data analisis SPKP;
3. Melakukan pemetaan terhadap wilayah operasi berdasarkan peta kerawanan dan laporan masyarakat, terus mengupdate data kerawanan yang berbasis pelaporan maupun pemantauan;

4. Melakukan evaluasi terhadap capaian hari operasi dan hasil pengawasan yang dilakukan, hal ini dimaksudkan agar Stasiun PSDKP Belawan dapat membantu dan menilai pada saat operasi dilaksanakan apa saja yang menyebabkan kegiatan operasi tidak optimal dan dapat menentukan langkah pencegahannya.

Analisa kegiatan yang menunjang keberhasilan, diantara kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian indikator kinerja adalah **Perawatan dan pemeliharaan kapal pengawas**, walaupun kegiatan tersebut merupakan indikator kinerja yang berbeda tetapi merupakan aspek yang berjalan beriringan mendorong keberhasilan indeks operasi kapal. Pelaksanaan dan penjadwalan terkait perawatan rutin, darurat, serta docking maupun pembelian suku cadang direncanakan sematang dan sesuai kebutuhan kapal pengawasan sehingga operasi dapat berjalan optimal.

b. IKU 3: Indeks kinerja operasi speedboat pengawas lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (Indeks)

Indeks kinerja operasi speedboat pengawas lingkup Stasiun PSDKP Belawan merupakan indeks kinerja yang dipakai untuk mengukur optimalitas dari armada *speedboat* yang berada di wilayah kerja Stasiun PSDKP Belawan. Indeks kinerja operasi speedboat pengawas lingkup Stasiun PSDKP Belawan dapat didefinisikan sebagai sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap operasional Speedboat Pengawas agar terwujudnya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif.

Indeks Kinerja Operasional Speedboat Pengawas terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni:

- 1) Pemeriksaan yang terdiri dari Pemeriksaan Kapal Perikanan dan Pemeriksaan Kelautan;
- 2) Cakupan wilayah pengawasan;
- 3) Tindak Lanjut Target Operasi yang terdiri dari Intercept indikasi pelanggaran Kelautan dan Perikanan dan Dukungan Kegiatan SAR;
- 4) Hasil Dukungan kegiatan operasi lainnya yang terdiri dari Penyitaan Alat Tangkap Terlarang, Pemutusan Rumpon Illegal, dan Dukungan Operasi Bersama, Terkoordinasi, Interdiksi.

Formula:

$$i_{sp} = \sum_{i=1}^4 \text{Bobot (\%)} \times \left(\frac{\text{Capaian}}{\text{Target}} \right) \times 100$$

Keterangan:

Isp	=	Indeks kinerja Speedboat Pengawas
Bobot (%)	=	Persentase pembagian Indikator yang mempengaruhi
Capaian	=	Realisasi capaian kinerja Speedboat Pengawas
Target	=	Sasaran kinerja Speedboat Pengawas

VARIABEL PEMBENTUK

Daftar Faktor Penghitung Indeks Kinerja Speedboat Pengawas

1. Jumlah Pemeriksaan [Bobot 40%] yang terdiri dari:
 - Pemeriksaan Kapal (unit kapal) : Bobot 50%
 - Pemeriksaan Kelautan (kali) : Bobot 50%
 - Setiap Speedboat Pengawas diberikan target pemeriksaan sebanyak 1 unit kapal ikan atau objek kelautan per hari.
2. Persentase Cakupan Wilayah Pengawasan [Bobot 40%];
 - Cakupan Wilayah Pengawasan merupakan cakupan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) dengan luas 1.928.506 NM2 (Sumber: BIG, 2015)
 - Masing-masing speedboat pengawas diberikan target cakupan per tahun, dasar penentuan tersebut dilakukan berdasarkan kemampuan teknis speedboat pengawas.
3. Jumlah Tindak Lanjut Target Operasi [Bobot 15%] yang terdiri dari:
 - Intercept indikasi pelanggaran kelautan dan perikanan : Bobot 60%
 - Dukungan kegiatan SAR : Bobot 40%
 - Dukungan kegiatan SAR bersifat situasional, bagi Kapal Pengawas yang tidak mendapat tugas melakukan SAR dianggap memenuhi bobot/mencapai target.
4. Jumlah dukungan operasi lainnya [Bobot 5%] yang terdiri dari:
 - Penyitaan Alat Tangkap Terlarang : Bobot 40%
 - Pemutusan Rumpon Illegal : Bobot 40%
 - Dukungan Operasi Bersama : Bobot 20%
 - Komponen bersifat situasional, apabila salah satu tidak terpenuhi dikarenakan memang tidak ada penugasan, maka dianggap memenuhi bobot/target tercapai.

Keterangan pola perhitungan

- $TW\ I = TW\ I$
- $TW\ II = (TW\ I + TW\ II)/2$
- $TW\ III = (TW\ I + TW\ II + TW\ III)/3$

- $TW\ IV = (TW\ I + TW\ II + TW\ III + TW\ IV)/4$

Dalam kurun waktu tahun 2024 Stasiun PSDKP Belawan telah melaksanakan operasi *speedboat* pengawasan yang berada dan tersebar diseluruh wilayah kerja Stasiun PSDKP Belawan. Capaian yang diperoleh sebesar **100** dengan persentase sebesar **109,89%** dari **target sebesar 91 pada tahun 2024**. Capaian indeks kinerja dimaksud kami sajikan dalam bentuk tabel berikut:

Tabel 12 Capaian IKU 3

Indikator Kinerja				Target		Realisasi				
				2024	2024	2023	2022	2021	2020	Renstra
Indeks	kinerja	operasi	speedboat	91	100	100	92,13	-	-	89
pengawas lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (indeks)										

Tabel 13 Perbandingan IK 3 antar UPT

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		Belawan	Cilacap	Biak	Ambon	Pontianak	Kupang	Tarakan	Tahuna
SK.2	Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP yang efektif	IKU 3	Indeks kinerja operasi speedboat pengawas lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (indeks)	100,00	97,26	98,94	96,67	100,00	98,85	100,00	100,00

Selama tahun 2024 capaian indeks kinerja operasi speedboat melebihi target yang ditentukan yaitu 91. Perhitungan terhadap capaian indeks kinerja speedboat disajikan sebagaimana tabel berikut

Tabel 14 Perhitungan capaian IKU 3

Lokasi UPT	Nama Speedboat	Pemeriksaan Kapal Perikanan (50%)				Pemeriksaan Kelautan (50%)				Jumlah Pemeriksaan Kelautan dan Perikanan (40%)	Persentase Cakupan Wilayah Pengawasan (40%)				Intercept Indikasi Pelanggaran (60%)				Dukungan Kegiatan SAR (40%)				Tindak Lanjut Target Operasi (15%)	Penyitaan Alat Tangkap Terlarang (40%)				Pemutusan Rumpon Ilegal (40%)				Dukungan Operasi Bersama (20%)				Dukungan Operasi Lainnya (5%)				Total Nilai Indeks	Nilai per Satker
		TW II				TW II					Nilai	TW II				TW II				TW II				Nilai	TW II				TW II				TW II								
		Target	Realisasi	Nilai		Target	Realisasi	Nilai				Target	Realisasi	Nilai		Target	Realisasi	Nilai		Target	Realisasi	Nilai			Target	Realisasi	Nilai		Target	Realisasi	Nilai		Target	Realisasi	Nilai						
Stasiun PSDKP Belawan	Dolphin 14	30	58	50,0	2	2	50,0	40,00	0,0003	0,0003	40,00	0	0	60	0	0	40	15	0	0	40	0	0	40	0	0	40	0	0	20	5	100,00	100								
	Napoleon 28	30	57	50,0	0	0	50,0	40,00	0,0003	0,0003	40,00	0	0	60	0	0	40	15	0	0	40	0	0	40	0	0	40	0	0	20	5	100,00									

Analisa penyebab keberhasilan capaian IKU dimaksud, diantaranya:

1. Menyusun rencana pengawasan yang matang dan tepat sasaran, rencana pengawasan dengan speedboat dilaksanakan dengan memperhitungkan data pengawasan terdahulu sebagai informasi awal dalam penetapan RO;
2. Melakukan pemetaan terhadap wilayah operasi, hal ini dimaksudkan agar memudahkan menentukan target operasi ataupun potensi wilayah pengawasan baik pengawasan perikanan maupun kelautan berdasarkan data pengawasan yang terlebih dahulu telah dilaksanakan sesuai pola dan kebiasaan pada kurun waktu tertentu, sehingga wilayah operasi dapat disesuaikan dengan wilayah potensi pelanggaran berdasarkan waktu ideal terjadinya;
3. Memenuhi kebutuhan logistik awak *speedboat* dalam menunjang kegiatan selama melaksanakan operasi, dengan melengkapi awak dengan perbekalan berupa makanan, minuman, air bersih, maupun sarana keselamatan sehingga pelaksanaan patrol lebih optimal.

Analisa kegiatan yang menunjang keberhasilan indeks kinerja operasi speedboat antara lain:

1. Melaksanakan perawatan dan pemenuhan suku cadang dalam menjaga performa armada. Secara teori, keberhasilan atas IKU ini bergantung kepada kelayakan operasi armada speed sehingga perlu diperhatikan komponen yang menunjang semisal performa mesin maupun suku cadang, kondisi ini akan menentukan sejauh mana perawatan dan pemeliharaan akan dilakukan;
2. Memenuhi kebutuhan logistic awak *speedboat* dalam menunjang kegiatan operasi, dengan melengkapi awak dengan perbekalan maupun sarana keselamatan sehingga pelaksanaan patrol lebih optimal;

Realisasi anggaran yang dicapai dalam mendukung capaian Indeks kinerja operasi speedboat pengawas lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan adalah sebesar Rp 386,339,200,- atau 99,57% dari total pagu yang dianggarkan sebesar Rp 387,990,000,-. Capaian hari seluruh armada *speedboat* yang tersebar di seluruh satwas dan wilker Stasiun PSDKP Belawan selama tahun 2024 telah melaksanakan 30 hari operasi dari total keseluruhan 2 armada speedboat Pengawasan. 1 Armada Stasiun PSDKP Belawan berada dalam kondisi performa yang siap operasi dan 1 dalam kondisi siap terbatas. Realisasi hari operasi armada speedboat lingkup Stasiun PSDKP Belawan akan kami sajikan dalam tabel berikut.

Tabel 15 Realisasi armada speedboat lingkup Stasiun PSDKP Belawan

Bulan	Hari Operasi Speedboat	
	Dolphin 014	Napoleon 028
Januari	0	0
Februari	0	0
Maret	3	2
April	0	0
Mei	6	3
Juni	0	0
Juli	0	0
Agustus	4	4
September	3	8
Oktober	5	3
November	5	4
Desember	4	5
Total	30	30

c. IKU 4: Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (%)

Indeks kinerja persentase pemenuhan logistik kapal pengawas merupakan IKU yang berbicara tentang asoek pemenuhan kebutuhan logistik kapal pengawas meliputi logistik kapal dan logistik personal. Logistik kapal antara lain, BBM, Pelumas, dan Alat Pelayanan, sedangkan logistik personil meliputi, bahan makanan AKP, air bersih, senjata api.

Kegiatan pemenuhan logistik dilaksanakan oleh Stasiun PSDKP Belawan dan dikatakan tercapai dengan beberapa kriteria yaitu tersedianya berita acara sisa BBM akhir bulan, dokumen pembelian pelumas atau berita acara sisa pelumas, dokumen pemenuhan bahan makanan, dokumen pemenuhan air bersih, dokumen pemenuhan atk dan bahan komputer, serta dokumen laporan senjata api dan amunisi.

FORMULA:

$$Xp = (30\%.x_a) + (20\%.x_b) + (25\%.x_c) + (15\%.x_d) + (5\%.x_e) + (5\%.x_f)$$

Keterangan:

X_a : Pemenuhan Kebutuhan BBM KP (bobot: 30)

X_b : Pemenuhan Kebutuhan Pelumas KP (bobot: 20)

X_c : Pemenuhan Bahan Makanan AKP (bobot: 25)

X_d : Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih KP (bobot: 15)

X_e : Pemenuhan Kebutuhan Alat Pelayanan KP (bobot: 5)

X_f : Pemenuhan Kebutuhan Senjata Api (bobot : 5)

Pada tahun 2024 Stasiun PSDKP Belawan berhasil memperoleh **capaian sebesar 100%**, sesuai dengan target yang ditetapkan pada PK 2024. Capaian ini diperoleh dengan ketentuan bahwa Stasiun PSDKP Belawan telah memenuhi setiap komponen logistik kapal maupun logistik personal. Untuk komponen logistik seperti pemenuhan BBM dan pelumas Stasiun PSDKP telah melaksanakan pemenuhan yang dibuktikan dengan dokumen permintaan maupun berita , untuk pemenuhan natura, atk/cs, air bersih maka Stasiun PSDKP telah melaksanakan pemenuhan yang dibuktikan dengan dokumen permintaan maupun SPJ pembelian, serta untuk ketersediaan senjata dan amunisi didasarkan pada laporan ketersediaan senpi maupun amunisi oleh kapal pengawas. Indikator kinerja utama ini merupakan indikator baru sehingga belum dapat dibandingkan. Berikut tabel capaian indeks kinerja persentase pemenuhan logistik kapal pengawas.

Capaian IKU 4

$$X_p = (30\% \times 100) + (20\% \times 100) + (25\% \times 100) + (15\% \times 100) + (5\% \times 100) + (5\% \times 100)$$

$$X_p = 30 + 20 + 25 + 15 + 5 + 5$$

$$X_p = 100$$

Tabel 16 Capaian IK 4

Indikator Kinerja				Target		Realisasi				
				2024	2024	2023	2022	2021	2020	Renstra
Persentase Pemenuhan Logistik Kapal				100	100	100	100	-	-	-
Pengawas lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (%)										

Tabel 17 Perbandingan IK 4 antar UPT

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Belawan	Cilacap	Biak	Ambon	Pontianak	Kupang	Tarakan	Tahuna
SK.2	Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP yang efektif	IKU 4 Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan	100	100	100	100	100	100	100	100

Analisis penyebab keberhasilan atas IKU persentase pemenuhan logistik kapal pengawas antara lain dikarenakan;

- Melaksanakan monitoring atas kebutuhan kapal pengawas, monitoring dapat dilaksanakan melalui pengajuan kebutuhan logistik yang berasal dari awak kapal pengawas;
- Memastikan pemenuhan kebutuhan logistik kapal pengawas maupun logistik personil, telah memiliki dokumen yang sesuai. Stasiun PSDKP Belawan melalui mekanisme maupun petugas yang diberikan wewenang harus memastikan pemenuhan logistik atas kebutuhan kapal dan awak kapal terdokumentasikan dengan baik berupa pelaporan maupun pertanggung jawaban;
- Memastikan kebutuhan logistik kapal pengawas dapat terpenuhi minimal dalam setiap triwulan, Stasiun PSDKP Belawan melalui tim kerja Prasarana, sarana dan operasi kapal pengawas wajib memastikan kebutuhan logistik kapal terpenuhi

dengan monitoring dan tindak lanjut atas permohonan kebutuhan logistik yang diajukan kapal.

Analisa kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian IKU antara lain:

- Pemetaan kebutuhan kapal terkait pembiayaan, hal ini maksudkan agar Stasiun PSDKP Belawan dapat melakukan plot terhadap kebutuhan logistik kapal yang pembiayaannya dapat ditanggulangi dengan menggunakan mekanisme GUP, TUP ataupun LS, sehingga skala prioritas tetap dapat berjalan pemenuhan dapat terlaksana;
- Monitoring dan evaluasi kebutuhan kapal pengawas akan ketepatan dokumen yang dihasilkan dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Pelaksanaan pemenuhan kebutuhan logistik kapal pengawas selama Tahunan tahun anggaran 2024 telah menghasilkan realisasi sebesar Rp10,048,458,696,- atau sebesar 100% dari total anggaran yang dianggarkan sebesar Rp10,048,462,000,-.

3. Sasaran Kegiatan 3: Terselenggaranya Pembangunan Serta Perawatan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP yang Sesuai Ketentuan

Sasaran kegiatan ini menurunkan 2 IKU pada Stasiun PSDKP Belawan yang berorientasi pada Pembangunan dan perawatan diantaranya:

1. Persentase sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (%);
2. Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan(%).

a. IKU 5: Persentase sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (%)

Persentase sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang diselesaikan adalah penilaian kemajuan fisik/konstruksi pengadaan pembangunan prasarana pengawasan SDKP sebanyak 2 unit yang dilaksanakan oleh Stasiun PSDKP Belawan. Penyelesaian terhadap pembangunan prasarana dilaksanakan di Kantor Stasiun PSDKP Belawan berupa renovasi pos pengawasan Stasiun PSDKP Belawan dan Penimbunan, Perataan dan Pematangan Lahan Stasiun PSDKP Belawan. Pembangunan tersebut ditargetkan akan selesai dalam tahun anggaran 2024 dengan indikator penyelesaian sebesar 100% untuk ketiga gedung tersebut.

Formula

$$P_{sp} = \left(\frac{\sum a1 + a2}{b} \right)$$

Keterangan:

P_{sp} = Persentase sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang diselesaikan (%)

$\sum a1 + a2$ = Jumlah persentase penyelesaian sarana dan prasarana pengawasan SDKP (%)

B = Jumlah sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang diselesaikan (Unit)

Capaian IKU 5 dicapai dengan nilai 100% dari target 100% dengan 2 kegiatan di Stasiun PSDKP Belawan telah diselesaikan dengan laporan pengawasan, dokumen pembayaran, dan BAST dengan penyedia dimana:

- BAST Hasil Pekerjaan Renovasi Pos Pengawasan Stasiun PSDKP Belawan dengan nomor 339/PSDKPSta.2/PL.430/XII/2024 Tanggal 30 Desember 2024;
- BAST Hasil Pekerjaan Penimbunan, Perataan dan Pematangan Lahan Stasiun PSDKP Belawan dengan nomor 299/PSDKPSta.2/PL.430/XII/2024 Tanggal 8 Desember 2024;

Berikut data capaian kami sajikan dalam tabel berikut :

Tabel 18. Capaian IKU 5

Indikator Kinerja	Target		Realisasi					
	2024	2024	2023	2022	2021	2020	Renstra	
Persentase sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (%)	100	100	57,04	-	100	-	-	

Tabel 19. Perbandingan IKU 5 antar UPT

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Belawan	Cilacap	Biak	Ambon	Pontianak	Kupang	Tarakan	Tahuna
SK.5	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	IKU 5 Persentase sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (%)	100	100	100	100	100	100	100	100

Analisa penyebab keberhasilan IKU Persentase sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang diselesaikan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (%) antara lain:

1. PPK melakukan kontrol terhadap progress pembangunan dengan teliti dan cermat kemudian mengambil solusi sebagai langkah pencegahan;
2. Peran konsultas pengawas sebagai mitra dalam membantu melaporkan kesesuaian spesifikasi teknis dengan kondisi real lapangan menjadi masukan bagi PPK dalam memantau pembangunan;
3. Peran Katimja Prasarana, Sarana dan Operasi Kapal Pengawas dalam mendelegasikan tugas kepada tim untuk secara berkala bersama dengan PBJ untuk melakukan pengawasan baik secara fisik, maupun kelengkapan administrasi pembayaran.

Kegiatan pembangunan di Stasiun PSDKP Belawan berhasil direalisasikan sebesar Rp.3,721,696,025,- atau 99,34% dari total pagu Rp.3,746,240,000,-.

Analisa kegiatan yang menunjang dalam pencapaian IKU dimaksud adalah dengan tertibnya pengawasan dan administrasi dari PPK, PBJ Stasiun PSDKP Belawan beserta tim yang dengan responsif bergerak cepat menyikapi persoalan yang terjadi di lapangan dan mengambil jalan alternatif. KPA juga turut aktif dalam melakukan kontrolling baik secara administrasi ataupun secara faktual kondisi di lapangan.



Gambar 5 Gedung yang diselesaikan

b. IKU 6: Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan(%)

Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP adalah Jumlah persentase kegiatan Pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP yang dapat diselesaikan dalam mendukung kesiapan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Stasiun PSDKP Belawan memiliki 3 unit Kapal Pengawas dan 2 unit speedboat pengawasan yang dirawat dengan ketentuan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP terdiri dari :

- perawatan pencegahan (preventive maintenance **50%**),
- perawatan prediktif (predictive maintenance **40 %**)
- perawatan darurat (breakdown maintenance **10%**).

Formula:

$$X_p = (50\% \cdot x_a) + (40\% \cdot x_b) + (10\% \cdot x_c)$$

Keterangan:

X_p = Persentase Perawatan Sarana

x_a = Preventive

x_b = Predictive

x_c = Darurat

Tabel 20 Capaian IKU 6

Indikator Kinerja	Target		Realisasi				
	2024	2024	2023	2022	2021	2020	Renstra
Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan(%)	100	100	100	100	100	-	-

Tabel 21. Perbandingan IKU 6 antar UPT

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Belawan	Cilacap	Biak	Ambon	Pontianak	Kupang	Tarakan	Tahuna
SK.3	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	IKU 8 Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan(%)	100	100	100	100	100	100	100	100

Stasiun PSDKP Belawan berhasil memperoleh capaian yang baik dengan melaksanakan perawatan baik preventif, prediktif, maupun darurat dengan baik dan dibuktikan realisasi atas kebutuhan perawatan serta adanya pelaporan tentang kegiatan perawatan yang dilakukan. IKU ini telah tercapai dan sesuai dengan target, akan tetapi data hanya dapat dibandingkan hingga tahun 2021 dikarenakan IKU dimaksud baru ditetapkan sejak 2021 hingga 2024. Capaian 100 pada IKU ini dikarenakan beberapa **analisa penyebab keberhasilan** antara lain:

1. Memantau seluruh kebutuhan dan kesiapan operasi armada baik di Stasiun PSDKP Belawan maupun yang tersebar pada satwas dan wilker serta melaksanakan Upaya perawatan dengan skala prioritas dan mengatur kebutuhan penganggarnya dengan pembiayaan lewat mekanisme LS kontrak Belawan, non kontrak Belawan, ataupun swakelola dengan mekanisme GUP maupun TUP sehingga perawatan armada dapat dijalankan secara merata;
2. Adanya monitoring dan evaluasi terhadap kondisi armada yang telah dilaksanakan perawatan oleh Stasiun PSDKP Belawan dan evaluasi melalui capaian kegiatan PN bersama sesditjen PSDKP. Kegiatan evaluasi secara internal akan menguatkan kegiatan perawatan dikarenakan akan berdampak pada capaian hari ops dan kinerja armada sedangkan evaluasi ditingkat sesditjen akan memacu percepatan kegiatan perawatan apabila terdapat kerusakan karena data akan disandingkan dengan seluruh UPT lingkup ditjen PSDKP.

Realisasi atas kegiatan perawatan armada sebesar Rp. 4,364,474,391,- atau sebesar 99,94% dari total anggaran Rp4,366,930,000,-. Terdapat juga beberapa kegiatan yang secara langsung berkontribusi dalam pencapaian IKU ini antara lain:

1. Melaksanakan docking KP. Hiu 01 dan KP. Hiu 08;
2. Melaksanakan pengadaan kelengkapan kapal pengawas;
3. Melaksanakan pengadaan sarana pendukung operasional kapal pengawas;
4. Pengadaan Docking Speedboat Dolphin 014;
5. Penyediaan logistik kapal pengawas;

4. Sasaran Kegiatan 4: Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan

Sasaran kegiatan terselenggaranya pengawasan pelaku usaha kelautan menurunkan 1 Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan Stasiun PSDKP Belawan yaitu "Nilai Kualitas

penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (Nilai)".

a. IKU 7: Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (Nilai)

IKU Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha kelautan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan merupakan IKU yang berbicara tentang tupoksi organisasi dalam pengawasan kelautan. Pemeriksaan pelaku usaha kelautan dilaksanakan oleh Polsus PWP3K. Pelaksanaan pengawasan pelaku usaha kelautan berpedoman pada Peraturan yang berlaku sebagaimana jenis kegiatan pengawasan yang dilaksanakan. IKU ini terdiri atas beberapa jenis pengawasan kelautan diantaranya:

1. Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya;
2. Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha pemanfaatan ruang laut yang diperiksa kepatuhannya;
3. Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Apendiks Cites yang diperiksa kepatuhannya;
4. Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha pemanfaatan produk dan jasa kelautan;
5. Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha perikanan dari kegiatan penangkapan ikan yang merusak.

Formula:

$$x_{sdk} = \sum_{i=1}^n \frac{(Xi + \dots + Xn)}{n}$$

Keterangan:

- x_{sdk} : Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya kelautan
- Xi : Nilai penyelesaian pemeriksaan terhadap komponen objek pengawasan sumber daya kelautan ke-i
- n : Jumlah komponen objek pengawasan sumber daya kelautan yang diperiksa

Keterangan pola perhitungan

- $TW\ I = TW\ I$
- $TW\ II = (TW\ I + TW\ II)/2$
- $TW\ III = (TW\ I + TW\ II + TW\ III)/3$
- $TW\ IV = (TW\ I + TW\ II + TW\ III + TW\ IV)/4$

Penentuan nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya kelautan mengacu pada tabel berikut ini:

Tabel 22. Tahapan pemeriksaan IKU 7

No.	Kegiatan	Nilai	Output
1.	Persiapan, meliputi : 1. Membuat jadwal pemeriksaan; 2. Berkoordinasi dengan pelaku usaha yang akan diperiksa; 3. Menyusun administrasi pemeriksaan; dan/atau 4. Rapat persiapan pemeriksaan.	10	Surat Tugas, Surat Pemberitahuan Kepada Pelaku Usahan (tergantung sifat pengawasan), Daftar Pertanyaan (tergantung sifat pengawasan)
2.	Pelaksanaan pemeriksaan pelaku usaha	70	Hasil pengawasan, Form pengawasan dan/atau data dukung
3.	Penyusunan laporan hasil pengawasan ditembuskan kepada Direktur PPSDK	20	Laporan Pemeriksaan Pelaku Usaha
Jumlah Nilai		100	

Tahun 2024 capaian IKU ini berhasil dicapai dengan nilai yang baik yaitu 100, sebagaimana target tahunan yang ditetapkan. Capaian dapat diraih dengan memenuhi tahapan pemeriksaan sebagaimana dijelaskan pada tabel di atas. Berikut kami tampilkan capaian indikator kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 23. Capaian IKU 7

Indikator Kinerja	Target		Realisasi				
	2024	2024	2023	2022	2021	2020	Renstra
Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (Nilai)	100	100	100	100	100	-	-

Tabel 24. Perbandingan IK 7 antar UPT

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Belawan	Cilacap	Biak	Ambon	Pontianak	Kupang	Tarakan	Tahuna
SK.4	terselenggara nya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan	IKU 7 Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya	100	100	100	100	100	100	100	100

Tabel 25 Rekap pemeriksaan SDK Tahunan

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
1	Jumlah pelaku usaha pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau <i>Apendiks Cites</i> yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan	2	4
2	Jumlah pelaku usaha pengelolaan produk dan jasa kelautan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan	6	6
3	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan ruang laut yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan	0	25
4	Jumlah Pelaku usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan	11	31
5	Jumlah pelaku usaha perikanan yang diperiksa kepatuhannya dari kegiatan penangkapan ikan yang merusak	0	27
Total Jumlah Pelaku Usaha Kelautan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan		19	93

Analisa penyebab keberhasilan yang dilaksanakan Stasiun PSDKP Belawan agar mendapatkan capaian yang sempurna dalam memenuhi IKU dimaksud antara lain:

1. Melakukan rapat perencanaan yang baik terkait objek pengawasan, sehingga pelaksanaan pengawasan sesuai dengan regulasi yang berlaku;
2. Mengumpulkan informasi pendahuluan, yang bertujuan agar meminimalisir masalah yang terjadi dalam pelaksanaan pengawasan misalnya lokasi unit usaha, transportasi yang akan digunakan, potensi persoalan yang timbul karena pengawasan;
3. Melakukan pemantapan terhadap peraturan yang berhubungan langsung dengan objek pengawasan, dengan internalisasi peraturan maupun kebijakan terbaru yang berkaitan dengan objek pengawasan;

4. Melakukan *sharing session* dengan dinas terkait guna menyamakan persepsi dan penguasaan kondisi terhadap objek pengawasan agar pelaksanaan pengawasan lebih profesional dan bertanggungjawab;
5. Segera melakukan pulbaket terkait laporan yang masuk, hal ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan prima dan meningkatkan kepercayaan Masyarakat serta menambah target pengawasan insidentil yang dilaksanakan;
6. Memenuhi tahapan pelaksanaan sebagaimana yang termuat dalam informasi indikator kinerja, agar pelaksanaan pengawasan terstruktur serta pengukuran kinerja dapat terlaksana.

Adapun kendala dalam melaksanakan IKU Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha kelautan lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%) antara lain:

1. Wilayah pengawasan yang jauh;
2. Kurangnya informasi pendahuluan terkait objek yang diawasi;
3. Adanya perbedaan persepsi terkait peraturan yang berlaku;
4. Benturan tradisi dengan peraturan yang masih perlu dilakukan pendekatan secara kekeluargaan maupun jalur keagamaan.

Analisa kegiatan lain yang menunjang pencapaian yaitu:

1. *Briefing* rutin yang dilakukan sebagai upaya dalam meneruskan informasi serta teknis pengawasan maupun isu terkini di wilayah kerja Stasiun PSDKP Belawan, sehingga distribusi informasi menjadi merata dan pengawasan dapat dilaksanakan dengan optimal, kegiatan ini disampaikan langsung oleh Ketua Tim Kerja Intelijen dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan baik pada apel bagi ataupun pertemuan khusus;
2. Perencanaan dan penganggaran, kegiatan tersebut erat kaitannya dengan capaian organisasi mengingat alokasi anggaran terhadap kebutuhan pengawasan dan yang menunjang pengawasan perlu direncanakan dan ditetapkan dengan perhitungan yang sesuai.

Pengawasan dilaksanakan secara rutin maupun insidentil dengan menggunakan speedboat atau dengan kunjungan yang dapat diakses melalui perjalanan darat. Pengawasan perlu ditingkatkan dengan upaya komunikatif maupun dengan langkah sanksi administratif. Realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun 2024 untuk mendukung IKU ini sebesar Rp. 512,398,719 atau 99,94% dari pagu sebesar Rp. 512,707,000.

a.1 Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya

Pencapaian kinerja sampai dengan Tahunan tahun 2024 diperoleh dari kegiatan Pengawasan terhadap 31 Pelaku usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan. Pada tahun 2024 target pencemaran yang harus dicapai sebanyak 30 lembaga.

Kegiatan pendukung utama pengawasan Pelaku usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan meliputi pengawasan pencemaran perairan akibat kegiatan perikanan dan non perikanan.

Tabel 26. Rekap Pengawasan Pencemaran

No	Tanggal Pengawasan	Nama Perusahaan	Jenis Usaha	Alamat	Dokumen Perizinan	Ketaatan		Keterangan
						Ya	Tidak	
1	14 Maret 2024	PT. Medan Tropical Canning Industries and Frozen	Unit Pengolahan Ikan	Jl. KL. Yos Sudarso KM. 10.5, Kota Medan	NIB 8120101920359, PKKPR, IMB, UKL/UPL	^		Unit pengolahan Ikan pada saat Pemeriksaan tidak ditemukan adanya indikasi Pelanggaran
2	14 Maret 2024	PT. Suryawindu Pertiw	usaha Hatchery pembenihan vaname	Dusun Barat Gampong Lipah Rayeuk Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh	NIB 812010191248928, Izin Lingkungan dan SPPL	^		Usaha Hatchery Pembenihan Udang Vaname pada saat Pemeriksaan tidak ditemukan adanya indikasi Pelanggaran
3	26 - 28 Maret 2024	PT. Aquafarm Nusantara	Pembudidaya Ikan	Jl. Mess Pemda No 30. Desa Perdamean. Kec, Ajibrata, Kab, Toba Prov, Sumatera Utara	NIB 8120015280138, UKL-UPL/DPPL, Persetujuan Lingkungan	^		Unit Pembudidaya Ikan pada saat Pemeriksaan tidak ditemukan adanya indikasi Pelanggaran
4	26 Maret 2024	PT. Fuda Sari Laut	Unit Pengolahan Ikan	M. Yakub Lubis Dusun III, Desa/Kelurahan Bandar Khalipah, kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara	NIB 8120315120371, Izin Lingkungan, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Dokumen UKL-UPL	^		Unit pengolahan Ikan pada saat Pemeriksaan tidak ditemukan adanya indikasi Pelanggaran

5	27 Maret 2024	PT. Seafood Sumatera Perkasa	Unit Pengolahan Ikan	Jl. Titi Pahlawan No. 38 Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan	NIB 8120002962402, Izin Lingkungan, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), UKL-UPL	^		Unit pengolahan Ikan pada saat Pemeriksaan tidak ditemukan adanya indikasi Pelanggaran
6	27 Maret 2024	PT. Anugerah Global Maju	Pembudidaya Ikan	Desa Buruk Bakul, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau	NIB 0222000941478, SPPL	^		Unit Pembudidaya Ikan pada saat Pemeriksaan tidak ditemukan adanya indikasi Pelanggaran
7	27 Maret 2024	Koperasi Produsen Bumi Sukses Bersama	Pembudidaya Ikan	Desa Sepahat, Kecamatan Bandar Laksamana, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau	NIB 0112230024743, SPPL	^		Unit Pembudidaya Ikan pada saat Pemeriksaan tidak ditemukan adanya indikasi Pelanggaran
8	25-Apr-24	PT. Marindo Utana Lestari	Pembudidaya Ikan	Desa Sungai Cingam, Kecamatan Rupert, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau	NIB 9120209992037, UKL/UPL, Persetujuan Lingkungan	^		Unit pembudidaya Ikan pada saat Pemeriksaan tidak ditemukan adanya indikasi Pelanggaran
9	25-Apr-24	CV. Prima Vaname Sejahtera	Pembudidaya Ikan	Desa Sri Tanjung, Kecamatan Rupert, Kabupaten Bengkalis,Provinsi Riau	NIB 0806220072952	^		Unit pembudidaya Ikan pada saat Pemeriksaan tidak ditemukan adanya indikasi Pelanggaran
10	8 Mei 2024	PT. Halindo Berjaya Mandiri	Industri Pembekuan Ikan	Jl. Burhanuddin Lk. II, Kel. Perjuangan, Kec. Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai, Prov. Sumatera Utara	NIB 9120209992037, UKL/UPL, Persetujuan Lingkungan	^		Agar PT. Halindo Berjaya Mandiri rutin melakukan uji sampel air limbah dan melaporkannya keinstansi Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai atau OPD yang membidangi Lingkungan Hidup Kota

								Tanjungbalai.
11	19 Juni 2024	PT. Mutiara Laut Abadi	Industri Pembekuan Ikan	Jl. Pulau Buton, Kawasan Industri Medan-2 (KIM-2), MABAR, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara.	NIB 8120216151849, UKL/UPL, Izin Lingkungan	^		Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan PT. Mutiara Laut Abadi sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak ditemukan indikasi pelanggaran.
12	21 Juni 2024	PT. Winson Prima Sejahtera	Industri Pembekuan Ikan	KIM 2 Jl. P Solor II, No. 11/12, Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara	NIB 9120303362805, Izin Lingkungan, UKL/UPL.	^		Berdasarkan hasil pengawasan, dokumen rencana pencegahan pencemaran telah sesuai dan tidak ditemukan indikasi pelanggaran. Pada lokasi/lingkungan/kegiatan tidak ada pencemaran.
13	25 - 26 Juni 2024	PT Suri Tani Pemuka	Pembenihan Ikan Laut (Udang Vaname)	Dusun Kuthang Desa Sagoe Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh	NIB 8120001702648, UKL/UPL dan Izin Lingkungan	^		Berdasarkan hasil pengawasan tidak ditemukan indikasi pelanggaran pencemaran sumber daya ikan dan lingkungannya
14	26 Juni 2024	PT. Global Pasific Seafood Industry	Industri Pembekuan Ikan	Jl. Pulau Sumbawa II, Kawasan Industri Medan-2 (KIM-2), Mabar, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara	NIB 8120108860184, UKL/UPL dan Izin Lingkungan	^		Berdasarkan hasil pengawasan PT. Global Pasific Seafood Industry sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak ditemukan indikasi pelanggaran.
15	27 - 28 Juni 2023	PT. Suri Tani Pemuka	Pengolahan ikan Tilapia.	Janggir Leto, Kecamatan Panei, Kabupaten Simalungun	NIB 8120001702648, UKL/UPL dan Izin Lingkungan	^		Tidak ditemukan indikasi pelanggaran

16	22 - 23 Juli 2024	PT. Suri Tani Pemuka	pembesaran ikan nila	KJA Tambun Raya, Kecamatan Pematang Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara	NIB 8120001702648, UKL/UPL, Izin Lingkungan	^		Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan di PT. Suri Tani Pemuka sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak ditemukan indikasi pelanggaran.
17	24 - 25 Juli 2024	UD Pangkai Na	Industri Pengolahan dan pengawetan lainnya.	Dusun Barat Gampong Lipah Rayeuk Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh	NIB 03082300937840001, SPPL.	^		Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan di UD Pangkai Na sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak ditemukan indikasi pelanggaran.
18	24 Juli 2024	PT. Bumi Menara Internusa	Pengolahan Ikan	Jln. Pulau Sumbawa Kawasan Industri Medan 2, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara	NIB 81202029990554, UKL/UPL dan Izin Lingkungan	^		Berdasarkan hasil pengawasan tidak ditemukan indikasi pelanggaran pencemaran sumber daya ikan dan lingkungannya
19	26 Juli 2024	PT. Red Ribbon Indonesia	Pengolahan Ikan	Jalan Sulawesi Kawasan Industri Medan I (KIM), Mabar, Medan Deli, Sumatera Utara	NIB 8120004872553, UKL/UPL dan Izin Lingkungan	^		Berdasarkan hasil pengawasan tidak ditemukan indikasi pelanggaran pencemaran sumber daya ikan dan lingkungannya
20	20 Agustus 2024	PT Ayu Bumi Sejati	industry pembekuan ikan	Jl. Medan Belawan KM 17,5 Pekan Labuhan, Kec. Medan Belawan, Kota Medan	NIB : 0220107641955, DPLH, Izin Lingkungan	^		Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan di PT. Ayu Bumi Sejati Pemuka sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak ditemukan indikasi pelanggaran.

21	21 Agustus 2024	PT. Sumber Utama Nusantara	aktivitas cold storage	Jl. Rahmadbudin, Gg. Puskesmas Lk.13, Kel. Terjun, Kec. Medan Marelan, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara	NIB 022010422534, PKPLH dan SPPL	^		Berdasarkan hasil pengawasan pencemaran yang dilakukan PT. SUN sudah melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak ditemukan indikasi pelanggaran dan pencemaran akibat kegiatan perikanan.
22	27 Agustus 2024	PT. Anugerah Alam Industri	industry pembekuan ikan	Jl. Jala IV No.32, Rengas Pulau, Kec. Medan Marelan, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara	NIB 9120204200489, UKL/UPL dan Izin Lingkungan	^		Berdasarkan hasil pengawasan tidak ditemukan indikasi pelanggaran pencemaran sumber daya ikan dan lingkungannya
23	28 Agustus 2024	PT. Bahari Makmur Sejati	industry pembekuan ikan	Jl. Pulau Sumatera No. 13 KIM-I, Medan, Provinsi Sumatera Utara	NIB 8120316002347, UKL/UPL dan Izin Lingkungan	^		Berdasarkan hasil pengawasan tidak ditemukan indikasi pelanggaran pencemaran sumber daya ikan dan lingkungannya
24	4 September 2024	PT. Sorby Internasional Medan	industry pembekuan ikan	Jl. Pulau Irian, Kawasan Industri Medan, Kel. Saentis, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara	NIB : 9120105192189, DPLH, Izin Lingkungan	^		Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan di PT. Sorby Internasional Medan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak ditemukan indikasi adanya pelanggaran.
25	12 September 2024	PT. Toba Surimi Industries	aktivitas cold storage	Jalan Pulau Sumatera, MABAR, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Sumatera Utara	NIB 8120316002347, UKL/UPL dan Izin Lingkungan	^		Berdasarkan hasil pengawasan pencemaran yang dilakukan PT. Toba Surimi Industries sudah melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak ditemukan indikasi pelanggaran dan pencemaran akibat kegiatan perikanan.

26	13 September 2024	PT. Seafood Samudera Pasific	industry pembekuan ikan	Jl.Gabion No. 15, Kel, Bagan Deli, Kec. Medan Belawan, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara	NIB 8120108841644, DPLH dan Izin Lingkungan	^		Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan PT. SSP sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak ditemukan indikasi pelanggaran
27	19 September 2024	PT. Marine Maju Perkasa	industry pembekuan ikan	Jl. Pulau Solor, KIM 2, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara.	NIB 0109220000393, UKL/UPL dan Izin Lingkungan	^		Berdasarkan hasil pengawasan tidak ditemukan indikasi pelanggaran pencemaran sumber daya ikan dan lingkungannya
28	29 September 2024	PT. Aneka Sari Utama	industry pembekuan ikan	JL.Pulau Halmahera Kawasan Industri Medan 3, Kel/Desa Pematang Johar, Kec.Labuhan Deli, Kab.Deli Serdang. Prov Sumatera Utara.	NIB 8120012110246, RKL-RPL dan PKPLH	^		Berdasarkan hasil pengawasan tidak ditemukan indikasi pelanggaran pencemaran sumber daya ikan dan lingkungannya
29	3 Oktober 2024	CV Golden Seafresh	industry pembekuan ikan	Jalan Kapten Rahmad Buddin LK.14 Desa/Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;	NIB : 8120017221293, UKL/UPL, Izin Lingkungan	^		Dari hasil kegiatan pengawasan pencemaran ini disimpulkan tidak ditemukan indikasi pencemaran perairan dan pelaku usaha sudah patuh dalam menjalankan usaha kegiatan perikananannya.

30	15 Oktober 2024	PT. Toba Surimi Industries	Pembekuan dan Pengalengan Ikan	Jl. Pulau Pinang II, Kawasan Industri Medan II, Kel. Saentis, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara	NIB 8120316002347, UKL/UPL dan Izin Lingkungan	^		Berdasarkan hasil pengawasan pencemaran yang dilakukan PT. Toba Surimi Industries sudah melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak ditemukan indikasi pelanggaran dan pencemaran akibat kegiatan perikanan.
31	13 November 2024	PT. Aquafarm Nusantara	Pengolahan dan Budidaya Ikan	Dusun VII NagaKisar, Kec. Pantai Cermin, Kab. Serdang Bedagai Prov, Sumatera Utara.	NIB : 8120015280138, DPPLH, Izin Lingkungan	^		Dari hasil kegiatan pengawasan pencemaran ini disimpulkan tidak ditemukan indikasi pencemaran perairan dan pelaku usaha sudah patuh dalam menjalankan usaha kegiatan perikanannya.

a.2. aKualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha pemanfaatan ruang laut yang diperiksa kepatuhannya

Pencapaian kinerja Tahun 2024 diperoleh dari kegiatan Pengawasan terhadap 27 pelaku usaha yang memanfaatkan ruang laut. Dari sejumlah unit usaha tersebut, masih ada yang belum sesuai ketentuan peraturan perundangan dalam melaksanakan kegiatannya. Kegiatan pengawasan terhadap pemanfaatan ruang laut adalah kegiatan yang tidak berdiri sendiri, dimana PKKPRL adalah perizinan dasar, selama pelaku usaha memanfaatkan ruang laut. pengawasan PKKPRL erat kaitannya dengan pengawasan budidaya dan pengawasan perikanan lainnya sehingga kedudukan perizinan PKKPRL sangat urgent diawasi untuk memastikan kelaikan dokumen lainnya.

Tabel 27. Rekap Pengawasan PRL

No	Tanggal Pengawasan	Nama Perusahaan	Jenis Usaha	Alamat	Dokumen Perizinan	Ketaatan		Keterangan
						Ya	Tidak	
1	16 Februari 2024	PT. Kawasan Industri Dumai (KID)	Terminal Khusus	Jl. Pulau Sumatera No.1 Kawasan Industri Dumai, Desa/Kelurahan Pelintung, Kec. Medang Kampai, Kota Dumai, Provinsi Riau	NIB 8120202951843, PKKPR, Izin Lingkungan, Izin Operasional Tersus	^		Sesuai dengan Kepdirjen nomor 94 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Sanksi Administratif, maka sebelum dilakukan penetapan akan diagendakan ekspos hasil identifikasi dan permintaan keterangan terhadap PT. KID melibatkan jajaran Itjen KKP, Biro Hukum KKP, dan Ditjen PKRL KKP
2	27 Februari 2024	BUT EMP Gebang	Pengembangan Lapangan Migas	di Desa Bubun Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara	NIB 8120017111763, PKKPR, Izin Lingkungan,	^		Segera Membuat Laporan tertulis tentang pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang laut secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Menteri Kelautan dan Perikanan
3	2 s.d 4 April 2024	PT. Pertamina Patra Niaga FT Krueng Raya	Submarine Pipeline	Desa Meunasah Mon Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh	NIB 8120200840621, PKKPR, Izin Lingkungan	^		PT Pertamina segera melaporkan pendirian dan/atau penempatan bangunan dan instalasi di laut kepada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hidrografi dan oseanografi
4	23-Apr-24	PT ADHITYA SERAYAKORITA,	terminal khusus (TERSUS).	Kota Dumai Provinsi Riau.	NIB 8120315111055, PKKPR, Izin Lingkungan, Izin Operasional Tersus	^		Pelaku usaha agar tetap melaksanakan enam belas kewajiban yang tercantum dalam dokumen PKKPR dengan baik dan jangan terlewat perihal laporan 1 (satu) tahun sekali kepada Menteri Kelautan dan Perikanan.
5	24-Apr-24	PT. PLN UP3 Binjai	Interkoneksi kabel laut 20kV Pulau Sumatera - Pulau Sembilan	Kelurahan Desa Pulau Sembilan, Kec. Pangkalan Susu, Kab. Langkat, Provinsi Sumatera Utara	NIB, persetujuan KKPRL, Izin lingkungan, dan izin pembangunan dengan titik koordinat	^		menyampaikan laporan secara tertulis setiap 1 (satu) tahun kepada Menteri sebelum tanggal 16 Desember 2024
6	29-Apr-24	PT. Semen Padang	Terminal Khusus	di jalan Cut Nyak Dien, Kel. Lubuk Gaung, Sungai Sembilan, Kota Dumai, Riau	NIB 8120202951843, PKKPR, Izin Lingkungan, Izin Operasional Tersus, dan IPAL	^		menyampaikan laporan secara tertulis setiap 1 (satu) tahun kepada Menteri sebelum tanggal 21 Desember 2024

7	6-Mei-2024	PT. Pertamina Patra Niaga AFT Kuala Namu	Submarine Pipeline	Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara	NIB 9120309310613, PKKPR, Izin Lingkungan	^		Segera menyampaikan Laporan Tahunan sesuai dengan Peraturan Menteri KP no 28 tahun 2021 Pasal 137 sebelum masa berlaku pelaporan tahunan berakhir pada tanggal 27 Desember 2024.
8	7 s.d 8 Mei 2024	PT. Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal(FT) Medan Group, Medan-Belawan	Submarine Pipeline	Medan – Belawan.	NIB 9120309310613, PKKPR, Izin Lingkungan,	^		Menyampaikan Laporan Tahunan sesuai dengan Peraturan Menteri KP no 28 tahun 2021 Pasal 137 Setiap Tahunnya sebelum 03 Desember.
9	08 Mei 2024	PT. Marita Makmur Jaya	Terminal Khusus	Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau	NIB 9120007111706, Izin Operasional Tersus, PKKPR, Izin Lingkungan Hidup		^	Selanjutnya akan dilakukan Pemanggilan pada pihak PT.MMJ guna permintaan keterangan, untuk melengkapi data dan memperoleh keterangan tertulis lebih jelas.
10	14 Mei 2024	PT. Pertamina Patra Niaga LPG Terminal Pangkalan Susu	Terminal Khusus	Kab. Langkat, Prov. Sumatera Utara	NIB, persetujuan KKPR, Izin lingkungan dari KemenLHK, DLKR-DLKPP, Surat Izin Usaha Sementara Niaga Minyak dan Gas Bumi	^		Segera menyampaikan Laporan Tahunan Sesuai dengan Peraturan Menteri KP no 28 tahun 2021 Pasal 137 sebelum masa berlaku pelaporan tahunan berakhir pada tanggal 27 Desember 2024, serta melaporkan apabila ada rencana untuk pengembangan kegiatan di wilayah dalam perizinan PKKPR
11	15 Mei 2024	PPS Belawan	Pengembangan Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) di Belawan	Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan, Prov. Sumatera Utara	KKRL, Izin Lingkungan		^	Segera menyampaikan Laporan Tahunan Sesuai dengan Peraturan Menteri KP no 28 tahun 2021 Pasal 137 sebelum masa berlaku pelaporan tahunan berakhir pada tanggal 22 Oktober 2024, serta melaporkan apabila ada rencana untuk pengembangan kegiatan di wilayah KKRL.
12	18 Mei 2024	BUT. Zaratex. NV	Pengembangan Lapangan Minyak dan Gas Bumi	Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe Prov. Aceh	NIB 0209210000029, PKKPR, Izin Lingkungan	^		Tetap menyampaikan Laporan Tahunan secara rutin pertahunnya Sesuai dengan Peraturan Menteri KP no 28 tahun 2021 Pasal 137 karena BUT Zaratex N.V Lhokseumawe telah menyampaikan laporan tahunan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan pada tanggal 21 Februari 2024.
13	14 Mei 2024	PT. Multimas Nabati Asahan	TERMINAL UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI (TUKS)	Desa Lalang, Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara Propinsi Sumatera Utara.	NIB 9120503102224., PKKPR, Izin Lingkungan	^		Diperlukan pemantauan dan/atau pencarian informasi secara berkala terhadap aktivitas pemanfaatan ruang laut ini; dan Rekomendasi kepada PT. Multimas Nabati Asahan agar dalam operasionalnya selalu mematuhi ketentuan (hak dan kewajiban) yang tercantum dalam dokumen PKKPR, khususnya memberikan akses pada nelayan kecil dan menyampaikan laporan tertulis setiap tahun.

14	11 Juni 2024	PT. RIAU ANDALAN PULP AND PAPER (RAPP)	Kegiatan Dermaga dan Reklamasi	Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak Provinsi Riau	NIB 8120013181654, PKKPR		^	Polsus PWP3K dan tim akan melakukan pemanggilan permintaan keterangan terhadap PT.RAPP segera terkait indikasi pelanggaran berupa 2 Jetty dan 1 Kegiatan Reklamasi yang kemudian akan dilakukan ekspose terkait dengan dugaan pelanggaran yang ditemukan.
15	11 Juni 2024	PT. Samudera Siak	Pelayanan Logistic	Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak Provinsi Riau	NIB 8120001940553,	Perlu Di Klarifikasi		Akan memintai keterangan ke KSOP Kelas II Tanjung Buton terkait kepemilikan Lokasi Dermaga/Pelabuhan yang disewa oleh PT. Samudera Siak.
16	12 - 14 Juni 2024.	PT. Imbang Tata Alam	Penambangan Minyak Bumi, Pembangunan Dermaga	Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau.	NIB 1276000371105, PKKPR, SK PKPLH		^	Mendorong adanya komunikasi antara Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan dengan Kepala Divisi Formalitas, SKK Migas yang dilanjutkan dengan membuat Surat Dinas yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal PSDKP/Direktur PSDK kepada Kepala SKK Migas, yang isinya permohonan agar SKK Migas memerintahkan seluruh K3S yang ada di Indonesia, yang kegiatannya memanfaatkan ruang laut, untuk mengajukan PKKPR pada Tahun 2024 ini.
17	28 Juli s.d 1 Agustus 2024	Pelindo Regional I, Cab. Tanjungbalai Karimun, Kawasan Selat Panjang	Terminal Khusus	Kawasan Selat Panjang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau.	NIB 8120109982359, Izin Lingkungan,		^	Terdapat dugaan pelanggaran pemanfaatan ruang laut di Pelindo Regional I, Cab.Tanjungbalai Karimun, Kawasan Selat Panjang berupa eksisting 2 dermaga dan trestle dengan luas 1.585 m2 atau 0,158 ha tanpa PKKPR. Kegiatan pemanfaatan ini melanggar ketentuan Pasal 18 angka 12 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang jo Pasal 101 Ayat (3) PP 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pemanfaatan Ruang.
18	28 Juli s.d 1 Agustus 2024	PT. National Sago Prima (NSP)	Terminal Khusus	Dusun I, Tanjung Bandul, Desa Kepau Baru, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Kep. Meranti, Provinsi Riau.	Izin usaha industri, Izin Lingkungan, Izin Pembangunan, Izin Operasi Tersus		^	Terdapat dugaan pelanggaran pemanfaatan ruang laut di PT. NSP berupa 2 Dermaga dengan luas 1.026 m2 atau 0,102 ha tanpa PKKPR, melanggar ketentuan Pasal 18 angka 12 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang jo Pasal 101 Ayat (3) PP 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pemanfaatan Ruang.
19	30 Juli 2024	PT. Energi Unggul Persada	Terminal Khusus	Kota Dumai Provinsi Riau	NIB 8120103921509, Izin Pembangunan Terminal Khusus, Izin Operasional Terminal Khusus		^	Pelaku usaha dalam kegiatan pemanfaatan ruang laut belum memiliki perizinan yang sah dari pemerintah Indonesia sehingga dapat mengakibatkan kerusakan sumber daya ikan karena belum melakukan mitigasi lingkungan serta kegiatan tersebut tidak terdata oleh KKP.

								Sehingga diduga melanggar dua ketentuan,yaitu; Pasal 18 angka 13 Jo Pasal 18 angka 12, UU Nomor 6 Tahun 2023 untuk pelanggaran tidak memiliki dokumen KKPR.
20	30 Juli 2024	PT IVO MAS TUNGGAL,	Terminal Khusus	Kota Dumai Provinsi Riau	NIB 8120214051791, (SKKLH)		^	Pelaku usaha dalam kegiatan pemanfaatan ruang laut belum memiliki perizinan yang sah dari pemerintah Indonesia sehingga dapat mengakibatkan kerusakan sumber daya ikan karena belum melakukan mitigasi lingkungan serta kegiatan tersebut tidak terdata oleh KKP. Sehingga diduga melanggar dua ketentuan, yaitu; Pasal 18 angka 13 Jo Pasal 18 angka 12, UU Nomor 6 Tahun 2023 untuk pelanggaran tidak memiliki dokumen KKPR.
21	28 Juli s.d 1 Agustus 2024	PT. PELINDO I SEI PAKNING	Terminal Khusus (TERSUS).	Sei Pakning Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau	NIB 8120109982359		^	Polsus PWP3K dan tim akan melakukan tindakan lebih lanjut dan akan Melakukan koordinasi ke PT. Pelindo Regional I Cabang Pekan Baru untuk memastikan kepemilikan dan pengelolaan Dermaga di Pelindo Sei Pakning.
22	28 Juli s.d 1 Agustus 2024	PT. MESKOM AGRI SARIMAS	Perusahaan sawit dan olahannya	Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau	NIB 81200029952726,		^	Polsus PWP3K dan tim menyampaikan segala bentuk kegiatan yang memanfaatkan ruang laut di luar garis Pantai terluar wajib memiliki izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2021, Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2021 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021
23	28 Juli s.d 1 Agustus 2024	CV. Bestari Jaya	Perusahaan Logistik	Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau	NIB 9120009722259, Izin lingkungan		^	Polsus PWP3K dan tim menyampaikan segala bentuk kegiatan yang memanfaatkan ruang laut di luar garis Pantai terluar wajib memiliki izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2021, Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2021 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021
24	26 s.d 27 November 2024	PT. Swadaya Mitra Perkasa	Pembenihan udang vaname	Kabupaten Bireun Provinsi Aceh	NIB 9120211261081, UKL/UPL.		^	Telah dilakukan pengambilan bahan keterangan terhadap manager PT Swadaya Mitra Perkasa Hachtcery Kab. Bireun dan akan segera dibuatkan laporan untuk bahan supervisi/ekspose dalam penganan sanksi administrasi

25	28 s.d 30 November 2024	PT. NTT	Telekomunikasi dengan Kabel	Wisma 46-Kota BNI, Lantai 5, Jl. Jenderal Sudirman Kav.1, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta	NIB 8120100832237, PKKPRL	^		Berdasarkan hasil pengawasan Tahun 2024 ini, PT NTT Indonesia telah melakukan kewajiban dalam dokumen PKKPRL, Adapun Laporan Tahun 2023 dilakukan secara manual dan Laporan Tahun 2024 dilakukan melalui aplikasi e-sea. Sehingga tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran
----	-------------------------------	---------	--------------------------------	--	------------------------------	---	--	---

a.3 Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Apendiks Cites yang diperiksa kepatuhannya

Pencapaian kinerja sampai dengan Tahunan Tahun 2024 diperoleh dari kegiatan Pengawasan terhadap 4 pelaku usaha pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Apendiks CITES. Apabila mengacu kepada target yang diberikan, Stasiun PSDKP Belawan sudah memenuhi target yang ditetapkan yaitu 2 untuk pengawasan pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Apendiks CITES.

Kegiatan pendukung utama jumlah pelaku usaha pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Apendiks Cites yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan meliputi Pengawasan Pengelolaan Jenis ikan yang dilindungi. Pengawasan ini belum termasuk dengan adanya laporan warga atau nelayan kecil yang mendapati adanya jenis ikan dilindungi yang tidak sengaja masuk dalam jaring atau tertangkap saat memancing.

Berbagai upaya telah dilakukan Stasiun PSDKP Belawan terhadap kegiatan pengawasan jenis ikan dilindungi sebagai bagian penyadartahuan kepada masyarakat terkait larangan dan tujuan pelarangan tersebut dan dampaknya bagi ekologi sekitar. Berikut merupakan tabel pengawasan jenis ikan dilindungi

Tabel 28 Rekap pengawasan jenis ikan dilindungi

No	Tanggal	Nama Pelaku Usaha	Nama Perusahaan	Jenis Usaha	Alamat	Dokumen Perizinan	Ketaatan		Rekomendasi
							Ya	Tidak	
1	25 Maret 2024	Sehat	PT. DAHLIA MEKAR LESTARI	Pengembangbiakan Ikan Bersirip (Pisces) yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES	JL. DAHLIA NO. 88, Desa/Kelurahan Kedung Sari, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau	NIB 9120104202128, Surat Izin Pemanfaatan jenis ikan, Dokumen Izin Edar Dalam Negeri	^		Tidak ditemukan adanya pelanggaran pada saat pengawasan ini. Seluruh dokumen perizinan milik PT. DML masih berlaku. Namun semua dokumen untuk dua farm site lainnya berada di Kota Pekanbaru.
2	25-Apr-24	Indra Syaifu	PT. ALAM BIRU INDONESIA	Perdagangan Besar Hasil Perikanan	Jl. Ladang, Gang Perjuangan No.42 B, Kel Kedai Durian Kec. Medan Johor, Kota Medan	NIB 1217000462639, SIPJI DALAM NEGERI, SIPJI LUAR NEGERI, SIUP	^		Dari hasil pengawasan terhadap PT. Alam Biru Indonusa disimpulkan perizinan lokasi, jenis kegiatan, pemanfaatan, jenis dan jumlah ikan yang dimanfaatkan telah selesai dan lengkap sehingga pelaksanaan usaha telah memenuhi ketentuan dan persyaratan.
3	27 Juni 2024	Ferry Angriawan	-	Jenis ikan yang diperdagangkan adalah Sirip Hiu	Gampong Sungai Pauh Firdaus Kec. Langsa Barat Kota Langsa	NIB 01112200908670001 SIPJI Dalam Negeri, SAJI DN	^		Dari hasil pengawasan terhadap Bapak Ferry Angriawan disimpulkan perizinan lokasi, jenis kegiatan, pemanfaatan, jenis dan jumlah ikan yang dimanfaatkan telah selesai dan lengkap sehingga pelaksanaan usaha telah memenuhi ketentuan dan persyaratan
4	16 Agustus 2024	Muhammad Risky	-	jenis ikan yang dilindungi	Dusun Tgk. Muda Leube Gp. Paya Bieng Kec. Jangka Kabupaten Bireun Prov. Aceh	NIB (1239000210498), SIPJI Dalam Negeri (161/1/KKP/2021), SAJI DN (00846/SAJI/DN/BPSPL 1/IV/2024) dan KBLI 46216.1 Perdagangan	^		Dari hasil pengawasan terhadap Bapak Muhammad Risky disimpulkan perizinan lokasi, jenis kegiatan, pemanfaatan, jenis dan jumlah ikan yang dimanfaatkan telah selesai dan lengkap sehingga pelaksanaan usaha telah memenuhi ketentuan dan persyaratan

a.4 Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha pemanfaatan produk dan jasa kelautan

Pencapaian kinerja sampai dengan Tahun 2024 diperoleh dari kegiatan Pengawasan terhadap 7 pelaku usaha pemanfaatan produk dan jasa kelautan dari 1 target yang ditetapkan.

Kegiatan pendukung utama pengawasan Pelaku usaha pemanfaatan produk dan jasa kelautan meliputi pengawasan Pelaku usaha pemanfaatan produk dan jasa kelautan serta supervisi kegiatan pengawasan di Satwas dan Wilker lingkup Stasiun PSDKP Belawan. Berikut data pengawasan pelaku usaha pemanfaatan produk dan jasa kelautan yang dilaksanakan lingkup Stasiun PSDKP Belawan Tahun 2024.

Tabel 29. Rekap pengawasan pelaku usaha pemanfaatan produk dan jasa kelautan

No	Pelaku Usaha	Waktu Pengawasan	Lokasi	Jenis kegiatan	Dokumen perizinan
1	PT. Anugerah Nelayan Andalan	26-Apr-24	Dusun Mesjid Timur, Desa Lalang, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara	Pengelolaan Objek Wisata	NIB 1508230055919, Pengelolaan Objek Wisata,
2	R.M Pondok DangDangna	28 Mei 2024	Desa Lancok Pantai Lancok Bayu, Kecamatan Syamtalira Bayu, Kabupaten Aceh Utara,	Pengelolaan Objek Wisata	NIB 1705240088152, SPPL,
3	PT. Musim Mas	12 Juni 2024	JL. K.L.Yos Sudarso KM. 7,8, Desa/Kelurahan Tanjung Mulia, Kec. Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara	Pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE)	NIB 8120304772353, PPKPLH, Izin Lingkungan
4	PT. Intibenua Perkasatama	12 Juni 2024	Spring Tower 02-21 JL. K.L. Yos Sudarso, Desa/Kelurahan Tanjung Mulia, Kec. Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara	Pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE)	NIB 8120108803912, PPKPRL, Izin Lingkungan
5	Mansur	10 Juli 2024	Desa Matang Rayeuk , Kecamatan Idi Timur, Kabupaten Aceh Timur,	Wisata Pantai	NIB 0606240063037, SPPL, Izin Lingkungan
6	Muhammad Khairullah Ikhsan	29 Agustus 2024	Wisata Alam Datuk, Dusun IV Pantai, Desa Kuala Indah, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara, Propinsi Sumatera Utara	Pengelolaan Objek Wisata	"NIB 9120109852211,
7	PT. Intibenua Perkasatama	16 - 19 November 2024	Jalan Raya Lubuk Gaung, Desa/Kelurahan Lubuk Gaung, Kec. Sungai Sembilan, Kota Dumai, Provinsi Riau	Pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE)	Izin Lingkungan, "

a.5 Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha perikanan dari kegiatan penangkapan ikan yang merusak

Pencapaian kinerja sampai dengan Tahun 2024 diperoleh dari kegiatan Pengawasan terhadap 27 unit kapal Pelaku Usaha perikanan yang bebas dari kegiatan *Destructive Fishing*. Kegiatan pendukung utama pengawasan Pelaku Usaha perikanan yang bebas dari kegiatan Destructive Fishing meliputi pengawasan pada kapal – kapal dibawah 10 GT, dan supervisi kegiatan pengawasan di Satwas dan Wilker lingkup Stasiun PSDKP Belawan.

Berikut akan ditampilkan kumpulan data nelayan yang telah diperiksa dalam rangka pengawasan penangkapan ikan merusak :

Tabel 30. Rekap pengawasan DF

No	Nama Pelaku Usaha	Nama Perusahaan	Jenis Usaha	Alamat	Dokumen Perizinan	Ketaatan		Rekomendasi
						Ya	Tidak	
1	Bustalami, Mistar, Aidi, Nurdin, Agung Saputra, Hasni, Arbain, Saini, Imran, Harahap, Junaidi, Rahmat, Abd Gofar	-	Penangkapan Ikan	Sungai Indragiri Kelurahan Kempas Jaya Kecamatan Kempas dan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau	-	^		Dibutuhkan peran aktif kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS) dalam menjaga dan mengawasi perairan dan dapat memberikan informasi kepada petugas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan terkait kegiatan destructive fishing
2	Amin Rahul, Abdullah Samad, Benni, Syafe'i, Azizul Fahmi, Hasroni, Aluwi, Baizar, Kamarudin, Kamarudin, Salamuddin, Mukhtar	-	Penangkapan Ikan	Selat Air Hitam dan Sungai Suir Kabupaten Kepulauan Meranti.	-	^		Perlu adanya kerja sama antara Instansi terkait dan masyarakat dalam memberantas kegiatan penangkapan ikan yang merusak (destructive fishing) yang terjadi di Kabupaten Indragiri Hilir. Dibutuhkan peran aktif kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS) dalam menjaga dan mengawasi perairan dan dapat memberikan informasi kepada petugas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan terkait kegiatan destructive fishing.
3	Karya Efendi	Karya Efendi	Penangkapan Ikan	Sungai Indragiri, Kecamatan Kempas, Kabupaten Inhil, Provinsi Riau	-	^		Hasil pemeriksaan ditemukan 1 (satu) unit perahu motor milik Karya Efendi memiliki alat tangkap sondong dan perangkat setrum yang merupakan alat tangkap yang dilarang dan berbahaya. Nelayan an. Karya Efendi beserta alat tangkap yang dilarang dibawa ke kantor UPT PSDKP Wilayah I DKP Provinsi Riau di Tembilahan untuk dimintai keterangan dan diberikan surat peringatan agar yang bersangkutan tidak melakukan kegiatan penangkapan ikan yang merusak serta mengajak berpartisipasi dalam upaya pencegahan destructive fishing.
4	-	-	Penangkapan Ikan	Sungai Indragiri , Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau	-	^		Tidak Ditemukan Adanya Kegiatan Destructive Fishing

5. Sasaran Kegiatan 5: Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan

Sasaran kegiatan Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha perikanan menurunkan 1 IKU yang ditetapkan Stasiun PSDKP Belawan yaitu "Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (Nilai)". IKU ini merupakan IKU lama yang sudah berjalan sejak tahun 2023. IKU ini merupakan penjabaran atas tugas pengawasan dan satu-satunya indikator kinerja pada bidang pengawasan sumber daya perikanan.

a. IKU 6: Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (Nilai)

IKU Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (Nilai) merupakan IKU lama yang merupakan indikator untuk mengukur kinerja Stasiun PSDKP Belawan dalam tugas pengawasan sumber daya perikanan. Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan merupakan penjumlahan dari nilai penyelesaian tahapan pemeriksaan untuk setiap pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan.

Formula:

$$x_{sdp} = \sum_{i=1}^n \frac{(Xi + \dots + Xn)}{n}$$

Keterangan:

- x_{sdp} : Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan
 Xi : Nilai penyelesaian pemeriksaan terhadap komponen objek pengawasan sumber daya perikanan ke-i
 n : Jumlah komponen objek pengawasan sumber daya perikanan yang diperiksa

Tabel 31. Pemeriksaan IKU 8

No.	Kegiatan	Nilai	Output
1.	Persiapan, meliputi : a. Membuat jadwal pemeriksaan; b. Berkoordinasi dengan pelaku usaha yang akan diperiksa; c. Menyusun administrasi pemeriksaan; dan/atau d. Rapat persiapan pemeriksaan.	10	Surat Tugas, Surat Pemberitahuan Kepada Pelaku Usaha (pengawasan rutin perizinan berusaha berbasis resiko), Daftar Pertanyaan
2.	Pelaksanaan pemeriksaan pelaku usaha	70	Hasil pengawasan, Form pengawasan dan/atau data dukung
3.	Penyusunan laporan hasil pengawasan ditembuskan kepada Direktur PPSDP	20	Laporan Pemeriksaan Pelaku Usaha
Jumlah Nilai		100	

Keterangan pola perhitungan

- $TW\ I = TW\ I$
- $TW\ II = (TW\ I + TW\ II)/2$
- $TW\ III = (TW\ I + TW\ II + TW\ III)/3$
- $TW\ IV = (TW\ I + TW\ II + TW\ III + TW\ IV)/4$

Pelaksanaan pengawasaan terhadap IKU ini terbagi atas 4 (empat) kegiatan pengawasan diantaranya:

1. Kualitas penyelesaian pemeriksaan kapal penangkap ikan;
2. Kualitas penyelesaian pemeriksaan unit pengolahan ikan;
3. Kualitas penyelesaian pemeriksaan distribusi ikan;
4. Kualitas penyelesaian pemeriksaan budidaya perikanan.

IKU ini dapat dicapai Stasiun PSDKP Belawan dengan nilai yang sangat memuaskan yaitu dengan nilai 100 dan persentasi 100% sesuai dengan target yang ditetapkan. Dalam melaksanakan pengawasan yang mendukung IKU ini pengawas perikanan berpedoman kepada Perdirjen 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko Bidang Perikanan.

Perdirjen tersebut menjadi pedoman dalam pelaksanaan IKU persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan lingkup Stasiun PSDKP Belawan secara teknis, dan terdapat berbagai peraturan lainnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengawasan yang erat hubungannya dengan IKU persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan lingkup Stasiun PSDKP Belawan. Berikut tabel capaian indikator kinerja 8.

Tabel 32. Capaian IK 8

Indikator Kinerja	Target		Realisasi				
	2024	2024	2023	2022	2021	2020	Renstra
Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (Nilai)	100	100	100	100	-	-	-

Tabel 33 Perbandingan IKU 8 antar UPT

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Belawan	Cilacap	Biak	Ambon	Pontianak	Kupang	Tarakan	Tahuna
SK.5	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan	IKU 8 Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (Nilai)	100	100	100	100	100	100	100	100

$$\text{Capaian IKU 6} = \frac{tw \text{ I} + tw \text{ II} + tw \text{ III} + tw \text{ IV}}{4} = \frac{100+100+100+100}{4} = \frac{400}{4} = 100$$

Analisa penyebab keberhasilan diantaranya;

1. Membangun komunikasi yang baik dengan *stakeholder* sehingga pengawasan dapat berjalan dengan lancar, hal ini dimaksudkan pengawas perikanan harus memiliki kemampuan verbal yang baik sehingga penyampaian pesan dan maksud serta tujuan pengawasan dapat dipahami dengan baik, serta meminimalisir konflik mengingat kegiatan pengawasan berpotensi mewajibkan pengawasan perikanan berinteraksi dengan berbagai kalangan masyarakat dengan berbagai latar belakang;
2. Melakukan rapat perencanaan yang baik terkait objek pengawasan sehingga kegiatan pengawasan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan lancar dikarenakan informasi dan persiapan telah ditetapkan pada saat kegiatan perencanaan;
3. Mengumpulkan informasi pendahuluan yang bersumber dari kegiatan pengawasan sebelumnya ataupun dari informasi yang telah dikumpulkan pengawas perikanan dari masyarakat atau dari dinas terkait tentang unit yang akan diawasi;
4. Melakukan pemantapan terhadap peraturan yang berhubungan langsung dengan objek pengawasan, seperti internalisasi regulasi maupun kebijakan terbaru yang telah ditetapkan;
5. Melakukan *sharing session* dengan dinas terkait guna menyamakan persepsi dan penguasaan kondisi terhadap objek pengawasan sehingga tidak ada benturan ketika pengawasan dilaksanakan;

6. Memenuhi tahapan pelaksanaan sebagaimana yang termuat dalam informasi indikator kinerja.

Analisa kegiatan yang menunjang dalam pencapaian IKU ini diantaranya;

1. Pelaksanaan internalisasi dan sosialisasi terkait regulasi terkini, serta isu terkait pengawasan sumber daya perikanan;
2. Melakukan perencanaan dan revisi atas perubahan kegiatan atau adanya penambahan yang sifatnya urgent.

Sampai dengan akhir tahun 2024 Stasiun PSDKP Belawan telah melakukan pemeriksaan terhadap 167 lembaga. Pengawasan sumber daya perikanan yang kegiatannya mendukung pencapaian IKU ini turut menyumbang realisasi sebesar 99,91% atau sebesar Rp.1,071,076,387,- dari total pagu yang dianggarkan sebesar Rp.1,072,000,000,-.

a.1 Kualitas penyelesaian pemeriksaan kapal penangkap ikan

Kualitas penyelesaian pemeriksaan kapal perikanan dalam kurun waktu sampai dengan akhir tahun 2024 telah melaksanakan pemeriksaan kepada 81 pelaku usaha, yang terbagi di Stasiun PSDKP Belawan maupun di satwas. Salah satu kendala dalam pemeriksaan ini adalah banyaknya kapal perikanan yang melakukan penangkapan di wilayah kerja Stasiun PSDKP Belawan namun pemilik kapal tidak tinggal atau tidak berkantor pada wilayah kerja Stasiun PSDKP Belawan.

Tabel 34. Pengawasan penangkapan kapal perikanan

No.	Nama Perusahaan/Perorangan	Nomor Kode Proyek	Status Pelaporan	Subsektor	Jenis Pengawasan (OSS/Lainnya/Atensi Pimpinan)	Rekomendasi (BAP)
1	SIE TJENG TJHAI	202112-2810-2412-4351-536	II	Penangkapan Ikan	OSS	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
2	SIE BENG KHUN	202201-1915-2748-5509-466	II	Penangkapan Ikan	OSS	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
3	ANTON CHANDRA	202311-2510-4756-5833-735	II	Penangkapan Ikan	OSS	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
4	ANTON CHANDRA	202310-2110-0804-3457-055	II	Penangkapan Ikan	OSS	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
5	ANTON CHANDRA	202308-1215-2438-1734-757	II	Penangkapan Ikan	OSS	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
6	TONDI HARYONO- cek KBLI	202202-0209-1320-4163-318	II	Penangkapan Ikan	OSS	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
7	TONDI HARYONO	202202-1513-0004-0374-280	II	Penangkapan Ikan	OSS	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
8	SENG HUAT	202202-2209-0102-0695-140	II	Penangkapan Ikan	OSS	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
9	TONG TEK SAMAN	202312-0908-1916-4069-987	II	Penangkapan Ikan	OSS	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha

10	TONG TEK SAMAN	202312-0908-2022-8856-251	II	Penangkapan Ikan	OSS	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
11	TONG TEK SAMAN	202312-1011-0118-6134-554	II	Penangkapan Ikan	OSS	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
12	TONG TEK SAMAN	202312-1011-0001-3042-134	II	Penangkapan Ikan	OSS	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
13	SUBANDI	202309-1821-2329-6412-221	II	Penangkapan Ikan	OSS	Pembinaan dan Perbaikan
14	SANDIMAN	202312-1211-2048-1453-047	II	Penangkapan Ikan	OSS	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
15	SANDIMAN	202308-1216--2021-9539-952	II	Penangkapan Ikan	OSS	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
16	SIE BENG KHUN	202401-3013-5441-8623-378	II	Penangkapan Ikan	OSS	Pembinaan dan Perbaikan
17	SUBANDI	202309-1820-5743-9419-763	II	Penangkapan Ikan	OSS	Pembinaan dan Perbaikan
18	AMAN SAHLAN	202310-1107-5524-7416-483	II	Penangkapan Ikan	OSS	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
19	AMAN SAHLAN	202310-1107-5041-6072-174	II	Penangkapan Ikan	OSS	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
20	hasni	202308-2912-3900-4675-983	II	Penangkapan Ikan	OSS	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha

21	hasni	202307-3115-2534-1423-013	II	Penangkapan Ikan	OSS	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
22	SITI ZAHARAH	202310-1107-3407-3704-834	II	Penangkapan Ikan	OSS	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
23	SITI ZAHARAH	202310-1107-2652-9922-822	II	Penangkapan Ikan	OSS	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
24	FERIANTO	202312-0909-1913-3821-843	II	Penangkapan Ikan	OSS	Pembinaan dan Perbaikan
25	WILLYAM WIJAYA	202312-0715-1255-4954-644	II	Penangkapan Ikan	OSS	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
26	SURIANI	202302-0320-3247-6392-248	II	Penangkapan Ikan	OSS	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
27	SAIDUL BAKHRI	202308-2515-0303-9073-639	II	Penangkapan Ikan	OSS	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
28	SAIDUL BAKHRI	202308-2915-4550-6744-323	II	Penangkapan Ikan	OSS	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
29	SAIDUL BAKHRI	202308-2514-5821-7359-718	II	Penangkapan Ikan	OSS	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
30	PO TJAI	202309-2914-1702-7014-027	III	Penangkapan Ikan	OSS	Dokumen Perizinan Berusaha. SKK Nahkoda
31	RAHWANI	202308-2514-5556-3743-993	III	Penangkapan Ikan	OSS	Kosong

32	SONTEL SUKARDI	202301-3116-3028-4264-579	III	Penangkapan Ikan	OSS	Telah melakukan pemenuhan persyaratan perizinan berusaha dan pelaksanaan kegiatan usaha
33	HUGO SIGIARTO ASALLI	202309-2511-5332-4738-258	III	Penangkapan Ikan	OSS	Telah melakukan pemenuhan persyaratan perizinan berusaha dan pelaksanaan kegiatan usaha
34	MITRA MAJU LESTARI	202309-0413-3855-3756-868	III	Penangkapan Ikan	OSS	sudah sesuai dan telah memenuhi persyaratan
35	LADY FRISTANTI	202208-2214-1755-1973-159	III	Penangkapan Ikan	OSS	sudah sesuai dan telah memenuhi persyaratan
36	CALVIN CHANG	202310-1109-4827-1945-375	III	Penangkapan Ikan	OSS	sudah sesuai dan telah memenuhi persyaratan
37	LADY FRISTANTI	202311-3011-3930-4699-763	III	Penangkapan Ikan	OSS	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
38	HOTMAN	202303-0311-4617-4518-654	III	Penangkapan Ikan	OSS	pengisian rekomendasi belum sesuai dengan kriteria rekomendasi pada perdirjen 6 tahun 2021
39	TONGDY HAIDIR	202302-0318-5036-4476-225	III	Penangkapan Ikan	OSS	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
40	TIONG KIAN	202301-3016-4946-2403-063	III	Penangkapan Ikan	OSS	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
41	YOHAN	202201-1113-4952-3647-507	III	Penangkapan Ikan	OSS	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
42	TAN IE ING	202302-0910-5749-7206-160	III	Penangkapan Ikan	OSS	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha

43	YUNAN ALIAS TOBENG	202310-2715-2040-7262-386	III	Penangkapan Ikan	OSS	Perbaikan untuk melengkapi CPIB dan Buku Pelaut
44	KELVIN	202310-0614-0517-4718-656	III	Penangkapan Ikan	OSS	tidak sesuai
45	WENDY	202402-2009-3823-7742-321	III	Penangkapan Ikan	OSS	pengisian rekomendasi seharusnya telah memenuhi persyaratan, perbaikan melengkapi sertifikat CPIB masukan dalam analisa hasil pengawasan
46	WENDY	202402-2014-1046-0532-740	III	Penangkapan Ikan	OSS	pengisian rekomendasi seharusnya telah memenuhi persyaratan, perbaikan melengkapi sertifikat CPIB masukan dalam analisa hasil pengawasan
47	TONDI MARYONO	202302-0407-0246-2686-644	III	Penangkapan Ikan	OSS	pengisian rekomendasi seharusnya telah memenuhi persyaratan, perbaikan melengkapi sertifikat CPIB masukan dalam analisa hasil pengawasan
48	ALEX NARSISCO	202403-2814-3650-3331-308	III	Penangkapan Ikan	OSS	pengisian rekomendasi seharusnya telah memenuhi persyaratan, perbaikan melengkapi sertifikat CPIB masukan dalam analisa hasil pengawasan
49	HENDRI	202308-1915-0603-1352-514	III	Penangkapan Ikan	OSS	pengisian rekomendasi seharusnya telah memenuhi persyaratan, perbaikan melengkapi sertifikat CPIB, dll masukan dalam analisa hasil pengawasan
50	HENDRI	202308-1916-2328-5932-875	III	Penangkapan Ikan	OSS	pengisian rekomendasi seharusnya telah memenuhi persyaratan, perbaikan melengkapi sertifikat CPIB, dll masukan dalam analisa hasil pengawasan
51	TONDI HARYONO	202302-0319-3525-0905-221	III	Penangkapan Ikan	OSS	rekomendasi tetap diisi walaupun kapal tidak beroperasi

52	TONDI HARYONO	202302-0319-2848-7311-130	III	Penangkapan Ikan	OSS	pengisian rekomendasi seharusnya telah memenuhi persyaratan, perbaikan melengkapi sertifikat CPIB masukan dalam analisa hasil pengawasan
53	WENDY	202402-2009-3441-5702-083	III	Penangkapan Ikan	OSS	pengisian rekomendasi seharusnya telah memenuhi persyaratan, perbaikan melengkapi sertifikat CPIB masukan dalam analisa hasil pengawasan
54	WENDY	202402-2014-0820-6104-708	III	Penangkapan Ikan	OSS	pengisian rekomendasi seharusnya telah memenuhi persyaratan, perbaikan melengkapi sertifikat CPIB masukan dalam analisa hasil pengawasan
55	ALEX NARSISCO	202402-1614-2802-3588-358	III	Penangkapan Ikan	OSS	tidak sesuai
56	ALEX NARSISCO	202402-0614-1742-5932-421	III	Penangkapan Ikan	OSS	tidak sesuai
57	IRWAN	202308-2809-4215-9885-940	III	Penangkapan Ikan	OSS	pengisian rekomendasi seharusnya telah memenuhi persyaratan, perbaikan melengkapi sertifikat CPIB masukan dalam analisa hasil pengawasan
58	ANJLI SYAHPUTRA	202311-2919-2507-2978-189	III	Penangkapan Ikan	OSS	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
59	MAHMUDIN	202405--1711-3104-4243-170	III	Penangkapan Ikan	OSS	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
60	ABDUL MANAN	202405-3010-3539-3134-492	III	Penangkapan Ikan	OSS	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
61	SYAFRUDDIN	202308-1015-5857-9863-165	III	Penangkapan Ikan	OSS	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar

						pelaksanaan kegiatan usaha
62	AZHARI	202401-0916-2521-0674-216	III	Penangkapan Ikan	OSS	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
63	HELLEN DEA REGITA	202307-1811-0839-5263-518	III	Penangkapan Ikan	OSS	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
64	SYAHRUL HUSAINI	202312-2910-4440-1933-797	III	Penangkapan Ikan	OSS	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
65	SYAHRUL HUSAINI	202312-2911-5151-9267-313	III	Penangkapan Ikan	OSS	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
66	MAHMUDIN	202402-2811-5252-1106-551	III	Penangkapan Ikan	OSS	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
67	ELICON	202309-2711-3428-4046-545	III	Penangkapan Ikan	OSS	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
68	H TEO JOHAN PAIDI ALIAS AYATULLAH TEOHAN	202303-2310-4505-7238-727	III	Penangkapan Ikan	OSS	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
69	ONO	202302-0911-3332-3402-551	III	Penangkapan Ikan	OSS	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
70	SITI ZAHARAH	202312-1405-4914-2897-303	III	Penangkapan Ikan	OSS	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
71	WAHANA DEWI	202301-2415-0437-9126-603	III	Penangkapan Ikan	OSS	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha

72	EK CIEN NOVIANTI	2024-1200-00-032-0044	III	Penangkapan Ikan	OSS	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
73	TIONG TOK	202301-1609-3141-4168-117	III	Penangkapan Ikan	OSS	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
74	MAHAL SANUSI	202302-0615-0920-4395-358	III	Penangkapan Ikan	OSS	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
75	ZULFAKRI	202405-0811-4543-0703-204	III	Penangkapan Ikan	OSS	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
76	PAIRAN	202310-3010-2527-5679-376	IV	Penangkapan Ikan	OSS	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
77	SUTARTO SEBASTIAN	201912-1621-2145-2857-138	IV	Penangkapan Ikan	OSS	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
78	FIRZA ALFARIDZI	202312-2215-5921-1798-446	IV	Penangkapan Ikan	OSS	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
79	ZULFAKRI	202308-0918-1431-4474-909	IV	Penangkapan Ikan	OSS	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
80	BELAWAN SAMUDERA ABADI	202405-1415-5028-0023-339	IV	Penangkapan Ikan	OSS	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
81	BELAWAN SAMUDERA ABADI	202407-1914-4717-7182-540	IV	Penangkapan Ikan	OSS	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha



Gambar 6 Pengawasan perizinan berusaha sektor penangkapan ikan

a.2 Kualitas penyelesaian pemeriksaan unit pengolahan ikan

Pengawasan terhadap UPI yang dilaksanakan Tahun 2024 kepada 31 unit usaha dengan metode pengawasan rutin maupun insidental. Berikut disajikan dalam tabel:

Tabel 35. Rekap Pengawasan Pengolahan

N o.	Nama Perusahaan/Perorangan	Nomor Kode Proyek	Status Pelaporan	Subsektor	Jenis Pengawasan	Rekomendasi (BAP)
1	PT MEDAN TROPICAL CANNING AND FROZEN INDUSTRIES	202008-0108-4016-7912-262	I	Pengolahan Hasil Perikanan	OSS	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
2	PT MEDAN TROPICAL CANNING AND FROZEN INDUSTRIES	201912-2322-2137-0901-661	I	Pengolahan Hasil Perikanan	OSS	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
3	PT MEDAN TROPICAL CANNING AND FROZEN INDUSTRIES	202008-0516-2816-8808-392	I	Pengolahan Hasil Perikanan	OSS	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
4	PT FUDA SARI LAUT	201912-3019-5511-8644-612	II	Pengolahan Hasil Perikanan	OSS	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha, Pembinaan dan Perbaikan, Penerapan sanksi
5	PT SEAFOOD SUMATERA PERKASA	201912-3017-1810-7377-415	II	Pengolahan Hasil Perikanan	OSS	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
6	PT SEAFOOD SAMUDERA PACIFIC	202212-0214-0316-3883-564	II	Pengolahan Hasil Perikanan	OSS	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
7	PT FUDA SARI LAUT	201912-3019-5511-8705-870	II	Pengolahan Hasil Perikanan	OSS	Penerapan sanksi

8	PT GOLDEN SEAFOOD INDONESIA	202206-2615-3041-2545-072	II	Pengolahan Hasil Perikanan	OSS	Penerapan sanksi
9	PT CITRADIMENSI ARTHALI	201912-3015-2557-6214-588	III	Pengolahan Hasil Perikanan	OSS	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
10	PT MEDAN TROPICAL CANNING AND FROZEN INDUSTRIES	201912-2322-2137-1177-815	III	Pengolahan Hasil Perikanan	OSS	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
11	PT SEAFOOD SAMUDERA PACIFIC	202406-2019-2853-0396-145	III	Pengolahan Hasil Perikanan	OSS	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
12	ANISA	-	III	Pengolahan Hasil Perikanan	Lainnya	Pembinaan dan Perbaikan
13	RIDWAN	-	III	Pengolahan Hasil Perikanan	Lainnya	Pembinaan dan Perbaikan
14	PARIDA	-	III	Pengolahan Hasil Perikanan	Lainnya	Pembinaan dan Perbaikan
15	MASYITOH	-	III	Pengolahan Hasil Perikanan	Lainnya	Pembinaan dan Perbaikan
16	PT JINGHU BERKAT SAMUDERA	202210-2909-3634-7069-121	IV	Pengolahan Hasil Perikanan	OSS	Pembinaan dan Perbaikan
17	PT GOLDEN SEAFOOD INDONESIA	202201-0515-1519-0506-298	IV	Pengolahan Hasil Perikanan	OSS	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha



Gambar 7 Pengawasan perizinan berusaha sektor pengolahan ikan

a.3 Kualitas penyelesaian pemeriksaan distribusi ikan

Pengawasan terhadap distribusi dilaksanakan pada Tahun 2024 kepada 21 Pelaku usaha yang tersebar di seluruh wilayah kerja Stasiun PSDKP Belawan. Berikut tabel Pengawasan distribusi yang dilaksanakan pada tahun 2024.

Tabel 36 Rekap Pengawasan Distribusi/ Pemasaran

No	Nama Perusahaan/Perorangan	Nomor Kode Proyek	Status Pelaporan	Subsektor	Jenis Pengawasan	Rekomendasi (BAP)
1	PT SEAFOOD SUMATERA PERKASA	202211-2213-2513-8057-017	III	Distribusi dan Pemasaran Hasil Perikanan	OSS	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
2	PT SEAFOOD SAMUDERA PACIFIC	202406-2019-3650-5245-161	III	Distribusi dan Pemasaran Hasil Perikanan	OSS	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
3	JONO	202112-0916-1350-2898-406	III	Distribusi dan Pemasaran Hasil Perikanan	OSS	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
4	ACU BUDI	202312-0710-5204-9346-876	III	Distribusi dan Pemasaran Hasil Perikanan	OSS	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
5	ACU BUDI	202312-1111-2359-5755-675	III	Distribusi dan Pemasaran Hasil Perikanan	OSS	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
6	SOK KIE	202401-1212-1032-6284-574	IV	Distribusi dan Pemasaran Hasil Perikanan	OSS	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
7	BUN KUANG	202402-1508-4726-5671-080	IV	Distribusi dan Pemasaran Hasil Perikanan	OSS	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
8	CV CTK	-	I	Distribusi dan Pemasaran Hasil Perikanan	IMPOR	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
9	CV KARYA LAUT	-	I	Distribusi dan Pemasaran Hasil Perikanan	IMPOR	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
10	CV BAHAGIA	-	II	Distribusi dan Pemasaran Hasil Perikanan	IMPOR	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
11	PT SUNARKHO MEKAR JAYA ABADI	-	I	Distribusi dan Pemasaran Hasil Perikanan	IMPOR	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
12	CV SUMBER LAUT ABADI	-	I	Distribusi dan Pemasaran Hasil Perikanan	IMPOR	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
13	CV SELAT MALAKA FROZEN	-	I	Distribusi dan Pemasaran Hasil Perikanan	IMPOR	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
14	PT PUTRI MANALU BERSAUDARA	-	I	Distribusi dan Pemasaran Hasil Perikanan	IMPOR	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
15	PT ASSA BELAWAN	-	I	Distribusi dan Pemasaran Hasil Perikanan	IMPOR	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha

16	IKI PT KARUNIA SAMUDERA HINDIA	-	I	Distribusi dan Pemasaran Hasil Perikanan	IMPOR	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
17	CV SAMUDERA MARINE FISH	-	I	Distribusi dan Pemasaran Hasil Perikanan	IMPOR	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
18	PT GOLDEN CUP SEAFOOD	-	I	Distribusi dan Pemasaran Hasil Perikanan	IMPOR	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
19	PT PUTRI INDAH	-	I	Distribusi dan Pemasaran Hasil Perikanan	IMPOR	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
20	CV. SELAT MALAKA FROZEN	-	I	Distribusi dan Pemasaran Hasil Perikanan	IMPOR	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
21	PT. Yasuriang Samudera Rezeki	-	I	Distribusi dan Pemasaran Hasil Perikanan	IMPOR	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha

a.4 Kualitas penyelesaian pemeriksaan budidaya perikanan

Pengawasan terhadap budidaya dilaksanakan Tahun 2024 dilaksanakan kepada 48 pelaku usaha budidaya. Berikut data kami disajikan dalam tabel:

Tabel 37 Rekap pengawasan budidaya

No	Nama Perusahaan/Perorangan	Nomor Kode Proyek	Status Pelaporan	Subsektor	Jenis Pengawasan	Rekomendasi (BAP)
1	PT SURYAWINDU PERTIWI	202203-2622-0120-0506-861	TW I	Pembudidayaan Ikan	OSS	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
2	KPB Mas-Deli Serdang	-	TW I	Pembudidayaan Ikan	KPB	Pembinaan dan Perbaikan
3	KPB Patin-Kampar	202207-0410-2455-1111-963	TW I	Pembudidayaan Ikan	KPB	Pembinaan dan Perbaikan
4	KPB Patin-Kampar	202212-0511-5320-4235-843	TW I	Pembudidayaan Ikan	KPB	Pembinaan dan Perbaikan
5	KPB Gurami-Serdang Bedagai	202404-2912-2838-4164-869	TW II	Pembudidayaan Ikan	KPB	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
6	KPB Windu-Aceh Tamiang	202403-0111-5313-0274-710	TW II	Pembudidayaan Ikan	KPB	Pembinaan dan Perbaikan
7	KPB Windu-Aceh Tamiang	20240-3021-2394-2394-1272-4089	TW II	Pembudidayaan Ikan	KPB	Pembinaan dan Perbaikan
8	KPB Gurami-Serdang Bedagai	202404-2912-0735-0553-861	TW II	Pembudidayaan Ikan	KPB	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
9	KPB Mas-Karo	-	TW II	Pembudidayaan Ikan	KPB	Pembinaan dan Perbaikan

10	KPB Mas-Karo	-	TW II	Pembudidayaan Ikan	KPB	Pembinaan dan Perbaikan
11	KPB Patin-Rokan Hilir	202309-1911-3729-4741-936	TW II	Pembudidayaan Ikan	KPB	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
12	KPB Patin-Rokan Hilir	-	TW II	Pembudidayaan Ikan	KPB	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
13	SAPRI FARM	-	TW II	Pembudidayaan Ikan	Insidental	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
14	CINBENG FARM	-	TW II	Pembudidayaan Ikan	Insidental	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
15	MARTIN FARM	-	TW II	Pembudidayaan Ikan	Insidental	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
16	YANTO SAPUTRA FARM	-	TW II	Pembudidayaan Ikan	Insidental	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
17	AHAT STEFANUS FARM	-	TW II	Pembudidayaan Ikan	Insidental	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
18	Taslem	3254	TW II	Pembudidayaan Ikan	Insidental	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
19	SUGIATNO, S.Pi	202309-1113-2617-2256-638	TW II	Pembudidayaan Ikan	Insidental	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
20	PT AQUA FARM NUSANTARA	202311-2308-5007-4376-839	TW III	Pembudidayaan Ikan	OSS	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
21	PT AQUA FARM NUSANTARA	202106-2413-4740-9507-292	TW III	Pembudidayaan Ikan	OSS	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
22	PT AQUA FARM NUSANTARA	202311-2309-4105-9823-092	TW III	Pembudidayaan Ikan	OSS	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
23	PT ISTANAINDO FAMILY AROWANA	202003-2716-1424-7291-088	TW III	Pembudidayaan Ikan	OSS	Penerapan sanksi
24	PT ISTANAINDO FAMILY AROWANA	202003-2716-1424-7292-596	TW III	Pembudidayaan Ikan	OSS	Penerapan sanksi
25	PT ISTANAINDO FAMILY AROWANA	202003-2716-1424-7295-886	TW III	Pembudidayaan Ikan	OSS	Penerapan sanksi
26	PT ISTANAINDO FAMILY AROWANA	202003-2716-1424-7293-303	TW III	Pembudidayaan Ikan	OSS	Penerapan sanksi
27	KPB Bandeng-Aceh Utara	202311-3017-3253-9237-303	TW III	Pembudidayaan Ikan	KPB	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
28	KPB Lele-Binjai	-	TW III	Pembudidayaan Ikan	KPB	Pembinaan dan Perbaikan

29	KPB Lele-Binjai	-	TW III	Pembudidayaan Ikan	KPB	Pembinaan dan Perbaikan
30	KPB Patin-Rokan Hilir	202408-1513-4257-4068-186	TW III	Pembudidayaan Ikan	KPB	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
31	KPB Patin-Rokan Hilir	202408-1506-5442-3824-625	TW III	Pembudidayaan Ikan	KPB	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
32	KPB Mas-Deli Serdang	202302-2321-5209-8914-870	TW III	Pembudidayaan Ikan	KPB	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
33	KPB Nila-Kuantan Singingi	202406-2716-2125-5782-977	TW III	Pembudidayaan Ikan	KPB	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
34	KPB Nila-Kuantan Singingi	202406-2715-1034-8127-290	TW III	Pembudidayaan Ikan	KPB	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
35	PT.NEUHEUN AQUAKULTUR TIMUR	202308-3113-1927-7718-908	TW III	Pembudidayaan Ikan	Insidental	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
36	Robin Bakkara	-	TW III	Pembudidayaan Ikan	Insidental	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
37	-	-	TW III	Pembudidayaan Ikan	Insidental	Pembinaan dan Perbaikan
38	Lena Sapriadi		TW III	Pembudidayaan Ikan	LKR	
39	A.Hamid		TW III	Pembudidayaan Ikan	LKR	
40	MUHAMMAD YATIM		TW III	Pembudidayaan Ikan	LKR	
41	Adham Mirza		TW III	Pembudidayaan Ikan	LKR	
42	Sapriadi		TW III	Pembudidayaan Ikan	LKR	
43	Adham Mirza		TW III	Pembudidayaan Ikan	LKR	
44	PT AQUA FARM NUSANTARA	202103-0314-3939-2791-042	TW IV	Pembudidayaan Ikan	OSS	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
45	PT AQUA FARM NUSANTARA	202103-0315-2657-8329-965	TW IV	Pembudidayaan Ikan	OSS	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
46	PT AQUA FARM NUSANTARA	202103-0316-2629-8523-234	TW IV	Pembudidayaan Ikan	OSS	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
47	PT AQUA FARM NUSANTARA	202103-0315-5911-3406-754	TW IV	Pembudidayaan Ikan	OSS	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
48	-	-	TW IV	Pembudidayaan Ikan	Insidental	Pembinaan dan Perbaikan

6. Sasaran Kegiatan 6: Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas

Sasaran kegiatan ini merupakan sasaran kegiatan yang berorientasi kepada pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan dan menurunkan 2 indikator kinerja utama, IKU tersebut antara lain:

1. Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (Indeks);
2. Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (Indeks).

Secara umum kegiatan pengenaan sanksi administratif dan pemeriksaan hasil analisis sumber daya kelautan dan perikanan lingkup Stasiun PSDKP Belawan dapat terealisasi

a. IKU 9: Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (Indeks)

Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (KP) merupakan pengukuran kinerja atas pelaksanaan pengenaan sanksi administratif di bidang kelautan dan perikanan yang ditetapkan pertama kali oleh pejabat berwenang pada UPT Stasiun PSDKP Belawan untuk;

1. pengenaan sanksi atas pelanggaran SPKP berupa Surat Peringatan-1 (SP1)/Paksaan Pemerintah;
2. pengenaan sanksi administratif pelanggaran perizinan berusaha di bidang kelautan dan perikanan, pemanfaatan ruang laut, importasi komoditas perikanan dan pergaraman, penangkapan ikan terukur dan pengelolaan hasil sedimentasi di laut berupa surat peringatan (SP) atau paksaan pemerintah

Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang KP dihitung berdasarkan rumus berikut:

$$x = \left(\frac{a}{b} \right) \times 100\%$$

- x : Indeks pengenaan sanksi administratif bidang KP
- a : Jumlah pengenaan sanksi administratif bidang KP berdasarkan penetapan pertama
- b : Jumlah keseluruhan kasus pelanggaran administratif yang ditangani berdasarkan hasil ekspose

Tabel 38. kriteria indeks sanksi adm

PERSENTASE	NILAI INDEKS MAKS	KRITERIA INDEKS
>50%	40	Kurang
50% - 75%	60	Cukup
75% - 100%	80	Baik
>100%	100	Sangat Baik

Keterangan pola perhitungan

- TW I = TW I
- TW II = (TW I + TW II)/2
- TW III = (TW I + TW II + TW III)/3
- TW IV = (TW I + TW II + TW III + TW IV)/4

Selama tahun 2024 , Stasiun PSDKP Belawan telah menyelesaikan 47 kasus pengenaan sanksi administrasi baik berupa sanksi administrasi SPKP, Sanksi Administrasi Bidang Kelautan dan Sanksi Administrasi Bidang Perikanan. Berikut rekapitulasi sanksi administrasi Stasiun PSDKP Belawan Tahun 2024.

Tabel 39. Rekapitulasi Sanksi Administrasi Stasiun PSDKP Belawan Tahun 2024

Tahun	SPKP							Sanksi Administratif Non SPKP							
	Selesai Analisis dan Pemeriksaan						Proses Analisis Lanjutan dan Klarifikasi	Kelautan				Perikanan			
	Proses BAP	Ditetapkan Tidak Melanggar	SP1	SP2	Denda	Nilai Denda (Rp)		SP1	SP2	Denda	Nilai Denda (Rp)	SP1	SP2	Denda	Nilai Denda (Rp)
2024	3	2	12	3			20	3		4	194.660.996,00	14	-	6	293.001.300,00

Pada tahun 2024, Stasiun PSDKP Belawan memperoleh nilai 100 atas IKU ini dengan indeks capaian 80. Berikut kami sajikan tabel capaian dan tabel rekapannya.

Tabel 40. Capaian IK 9

Indikator Kinerja	Target		Realisasi				
	2024	2024	2023	2022	2021	2020	Renstra
Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (Indeks)	80	80	80	-	-	-	-

$$\text{Capaian IKU 9} = \left(\frac{12}{12} \right) \times 100\% = 100\% \text{ (80 mengacu kriteria indeks) (baik)}$$

$$\text{Capaian IKU 9} = \frac{tw I + tw II + tw III + tw IV}{4} = \frac{80 + 80 + 80 + 80}{4} = \frac{360}{4} = 80$$

Tabel 41 Perbandingan IKU 9 antar UPT

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Belawan	Cilacap	Biak	Ambon	Pontianak	Kupang	Tarakan	Tahuna
SK.6	Terselenggaranya penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan yang tuntas	IKU 9 Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (Indeks)	80	80	80	80	80	80	80	80

Analisa penyebab keberhasilan IKU dimaksud antara lain:

1. Melakukan internalisasi kepada setiap pengawas perikanan, awak kapal pengawas, maupun polsus PWP3K yang melaksanakan tugas agar professional dalam melakukan pemeriksaan dan penetapan sanksi berdasarkan peraturan yang berlaku, internalisasi dilakukan secara internal sebagai bagian penguatan kompetensi dan sharing session;
2. Melakukan pemeriksaan secara teliti ketika melaksanakan pengawasan baik ketika kedatangan kapal, keberangkatan kapal, pengawasan perizinan berusaha maupun pemeriksaan ketika sedang melaksanakan gelar operasi.
3. Melaksanakan pengawasan dan penginformasian secara merata sehingga pendekatan persuasif telah dibangun sebagai dasar penetapan sanksi administrasi dikemudian hari apabila ditemukan pelanggaran;
4. Memasang jaringan informasi eksternal yang berkontribusi sebagai laporan awal adanya pelanggaran;

Analisa kegiatan yang menunjang adalah Kegiatan pengawasan rutin yang dilaksanakan oleh pengawas perikanan pada saat kedatangan terkait adanya dugaan penggunaan alat tangkap ganda dan akhirnya berhasil memberikan satu sanksi administratif. Pelaksanaan patroli pengawasan kelautan dan perikanan oleh kapal pengawas yang secara rutin dilaksanakan dalam mengawal ketaatan pada saat melaksanakan pengoperasian pasca terbitnya SLO. Kedua aktifitas tersebut menjadi indikator bahwa fungsi pengawasan berjalan dengan baik saat pelaksanaan operasi maupun setelah kedatangan kapal perikanan. Kegiatan ini berhasil memperoleh realisasi anggaran sebesar Rp 312,956,546,- atau 99,99% dari total anggaran Rp313,000,000,-.

b. IKU 10: Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (Indeks)

Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Kapal Sumber Daya Kelautan dan Perikanan merupakan kinerja pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang terhadap orang/pelaku usaha yang berdasarkan hasil analisis sistem pemantauan kapal terdapat dugaan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan. Pemeriksaan dilaksanakan oleh: a). Kepala UPT PSDKP dimana pelaku usaha berdomisili; b).Kepala UPT PSDKP dimana kegiatan berusaha dilaksanakan atau dimana Kapal perikanan berStasiun; atau; c). Ditjen PSDKP Pusat (Dit PP) dalam hal pemeriksaan tidak memungkinkan dilaksanakan oleh Kepala UPT PSDKP sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, atau apabila pelanggaran melibatkan pelaku usaha skala besar/ menjadi perhatian publik.

Formula :

$$X_{TLP} = \sum_{i=1}^n \frac{(X_n)}{n} \times 100\%$$

x_{TLP} : Indeks Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Sistem Pemantauan Kapal Pelaku Usaha KP;
 $x_{n..}$: Jumlah orang/pelaku usaha yang telah selesai diperiksa;
 n : Jumlah dugaan pelanggaran berdasarkan hasil analisis sistem pemantauan

Tabel 42 kriteria indeks

PERSENTASE	NILAI INDEKS MAKS	KRITERIA INDEKS
>50%	40	Kurang
50% - 75%	60	Cukup
75% - 100%	80	Baik
>100%	100	Sangat Baik

Keterangan pola perhitungan

- TW I = TW I
- TW II = (TW I + TW II)/2
- TW III = (TW I + TW II + TW III)/3
- TW IV = (TW I + TW II + TW III + TW IV)/4

Selama Tahunan tahun 2024 Stasiun PSDKP Belawan telah melakukan pemeriksaan terhadap 20 dugaan pelanggaran SPKP menurut data pemantauan yang dilakukan oleh tim pusdal. Data dugaan tersebut kemudian ditindak lanjuti oleh Stasiun PSDKP Belawan dengan melakukan pemeriksaan terhadap Nakhoda maupun pemilik. Berikut hasil tindak lanjut tersebut kami sampaikan dalam bentuk tabel.

Tabel 43 Rekapitulasi SPKP

NO	UPT	HASIL ANALISIS PUSDAL (INDIKASI PELANGGARAN)								ANALISIS LANJUTAN		TINDAK LANJUT						CAPAIAN IKU PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF		
		TRANSSHIPMENT	PELABUHAN PANGKALAN	DPI	JALUR (<12 NM)	IZIN HABIS			JUMLAH	DALAM PROSES	SUDAH	PROSES BAP / SURAT PEMANGGILAN	BUKAN PELANGGARAN	SP1	SP2	DENDA	PIDANA	CAPAIAN KOMPONEN SPKP	CAPAIAN KOMPONEN SELAIN SPKP	RATA-RATA
						<30 hari	>30 hari	Total												
1	BELAWAN	-	-	-	20	-	-	-	20	1	19	2	2	12	3	-	-	100%	100%	100%
	TOTAL	-	-	-	20	-	-	-	20	1	19	2	2	12	3	-	-	100%	100%	100%

$$x = \frac{540}{540} \times 100\% = 1 \times 100\% = 100\% \text{ (80 Baik)}$$

$$\text{Capaian IKU 10} = \frac{tw \text{ I} + tw \text{ II} + tw \text{ III} + tw \text{ IV}}{4} = \frac{80+80+80+80}{4} = \frac{360}{4} = 80$$

Tabel 44 Capaian IKU 10

Indikator Kinerja				Target			Realisasi			
				2024	2024	2023	2022	2021	2020	Renstra
Indeks	Pemeriksaan	Hasil	Analisis	80	80	80	-	-	-	-
Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (Indeks)										

Tabel 45 Perbandingan IKU 10 antar UPT

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Belawan	Cilacap	Biak	Ambon	Pontianak	Kupang	Tarakan	Tahuna
SK.6	Terselenggaranya penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan yang tuntas	IKU 10 Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan lingkup UPT Stasiun PSDKP	80	80	80	80	80	80	80	80

Analisis penyebab keberhasilan disebabkan antara lain:

1. Stasiun PSDKP Belawan menindaklanjuti dengan melaksanakan BAP kepada pelaku usaha yang terindikasi melakukan pelanggaran dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu;
2. Stasiun PSDKP Belawan menyurati UPT Stasiun PSDKP lainnya yang merupakan tempat dimana pemilik kapal terindikasi melakukan pelanggaran berdomisili. Surat tersebut dimaksudkan agar Stasiun PSDKP Belawan mendapatkan bantuan dari UPT PSDKP lainnya sebagai mediator agar kegiatan BAP dapat dilaksanakan;

Indikator kinerja ini memerlukan perhatian ekstra untuk dapat diselesaikan mengingat dugaan pelanggaran yang setiap hari akan bertambah dan kedudukan kapal ketika berlabuh belum tentu pada wilayah kerja Stasiun PSDKP Belawan. Keterlibatan UPT lain juga sangat membantu walaupun sebenarnya belum bisa berjalan dengan optimal mengingat tidak tercapainya waktu yang ideal bagi kedua belah pihak melakukan BAP dikarenakan perbedaan waktu dan UPT PSDKP mitra juga memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Analisa kegiatan yang menunjang tercapainya indikator kinerja dimaksud adalah pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan tindak lanjut kapal yang diindikasikan melakukan pelanggaran. Mengingat dugaan pelanggaran setiap harinya terus bertambah maka berdasarkan evaluasi internal maka Stasiun PSDKP Belawan secara kontinu terus melakukan pemanggilan klarifikasi maupun menyurat kepada UPT PSDKP lainnya agar membantu sebagai mediator terlaksananya proses BA permintaan keterangan.

7. Sasaran kinerja 7: Terselenggaranya penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan yang berkualitas

Sasaran kinerja ini menurunkan 1 indikator kinerja yang telah ditetapkan Stasiun PSDKP Belawan dalam perjanjian kinerja tahun 2024. Indikator kinerja tersebut merupakan indikator kinerja utama yang merupakan salah satu tugas utama Stasiun PSDKP Belawan dalam rangka penegakan hukum. IKU yang dimaksud adalah "Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (Indeks)".

a. IKU 11: Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (Indeks)

Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan dapat dikategorikan selesai apabila berkas telah dinyatakan lengkap oleh JPU (P21), serta barang bukti dan tersangka dilimpahkan ke JPU (Penyerahan Tahap II). Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang dihitung berdasarkan rumus berikut :

$$\text{Indeks Penyelesaian Penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan}(xa) = \left(\frac{a}{\sum b} \right)$$

xa = Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan

a = Jumlah kasus ditahun berjalan yang telah selesai ditangani dari diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan sampai dengan selesai (P-21 dan/atau penyerahan tahap II ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) atau Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan)(SP-3)

$\sum b$ = Total kasus yang dilakukan proses penyidikan pada tahun berjalan

Capaian terhadap IKU ini terhitung dari Surat Perintah Penyidik (SPRINDIK) sampai dengan Surat P-21/SP-3. Pada tahun 2024 Stasiun PSDKP Belawan telah berhasil menangani 5 kasus penyidikan hingga P-21. Adapun Kasus Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang di tangani oleh Stasiun PSDKP Belawan selama tahun 2024 dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 46 Rekapitulasi Kasus TPKP Stasiun PSDKP Belawan Tahun 2024

No	Nama Kapal	GT	Bendera Kapal	Nama Tersangka	Progress
1	KM. KF 5032	63,47 GT	Malaysia	Myo Myin Tun alias Ko Cho	Inckracht
2	KM. SLFA 5178	64,77 GT	Malaysia	Jepri Setiawan	Inckracht
3	KM. PKFB 960	49,80 GT	Malaysia	Zaw Zowl	P-21
4	KM. PKFB 1913	68,56 GT	Malaysia	KHIN MG THWE	P-21
5	KM. PKFB 1916	69,07 GT	Malaysia	YIN HTWE	P-21

Penyelesaian perkara hingga P-21 menandakan IKU ini telah diselesaikan dan mendapat capaian 100 dari target 93. Capain terkait IKU TPKP Stasiun PSDKP Belawan akan kami tampilkan dalam tabel berikut.

Tabel 47. Capaian IKU 11

Indikator Kinerja	Target		Realisasi						
	2024	2024	2023	2022	2021	2020	Renstra		
Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (Indeks)	93	100	93	93	-	-	-		

Tabel 48. Perbandingan IKU 11 antar UPT

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Belawan	Cilacap	Biak	Ambon	Pontianak	Kupang	Tarakan	Tahuna
SK.7	Terselenggaranya penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan yang berkualitas	IKU 11 Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (Indeks)	100	100	100	93	100	100	100	100

Analisa penyebab keberhasilan IKU ini antara lain adalah:

- Stasiun PSDKP Belawan telah memiliki jumlah personal PPNS yang memadai yang berperan aktif dalam penyelesaian TPKP di lingkup Stasiun PSDKP Belawan;
- Sinergitas antara pengawas perikanan dan POLSUS PWP3K dengan PPNS masih terbina dengan baik sehingga proses dan alur TPKP dapat terjaga dengan baik;
- Tim kerja PP dapat mengoptimalkan semua sumber daya baik PPNS dan NON PPNS dalam menyelesaikan TPKP dimulai dari mindik, barbuk, saksi, pelaku, dan semua aspek yang terkait dalam penyidikan;
- Pendekatan kekeluargaan yang digunakan dalam manajemen konflik antara tersangka dan keluarga dapat dicari pemecahan masalah yang terbaik.

Adapun **analisa kegiatan yang menunjang keberhasilan** adalah:

- Perhitungan kebutuhan SDM, pendelegasian, dan penjurusan pegawai yang dilakukan Stasiun PSDKP Belawan dengan mendistribusikan staffnya dalam keikutsertaan sebagai Pengawas Perikanan, Pengawas Kelautan, Polsus, dan PPNS terbukti berjalan baik dalam mengganti kekosongan personil dikarenakan mutas, maupun pemekaran organisasi sebelumnya sehingga kebutuhan aparat penegak hukum dalam organisasi tidak mengalami penurunan ataupun kekosongan;
- Perencanaan terhadap kebutuhan anggaran menjadi salah satu point yang menunjang hampir setiap aspek kinerja termasuk dalam TPKP. Perhitungan akan kebutuhan anggaran atau revisi terhadap kebutuhan menjadi jantung dalam keberhasilan kegiatan yang terkait erat dengan kebutuhan anggaran.

Sepanjang tahun 2024 Stasiun PSDKP Belawan telah melaksanakan kegiatan TPKP dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 306,631,219,- atau sebesar 88,26% dari total pagu Rp. 347,422,000,-.

8. Sasaran Kegiatan 8: Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP

Sasaran kinerja ini menurunkan 14 indikator kinerja yang telah ditetapkan Stasiun PSDKP Belawan dalam perjanjian kinerja Tahun 2024. 14 indikator kinerja tersebut merupakan indikator kinerja yang melekat pada kegiatan penatausahaan dan merupakan kerja administrasi keseharian. 14 indikator kinerja tersebut antara lain:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan;

2. Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan;
3. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (nilai);
4. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (%);
5. Indeks profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan;
6. Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan;
7. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan;
8. Nilai Implementasi Program Budaya Kerja lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan;
9. Inovasi pelayanan publik yang diterapkan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (inovasi);
10. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan;
11. Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan;
12. Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa Lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan;
13. Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan;
14. Nilai kinerja perencanaan anggaran (NKA) lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan;

Selama kurun waktu 2024 Stasiun PSDKP Belawan telah merealisasikan anggaran sebesar Rp 16,314,838,659,- atau sebesar 99,92% dari total pagu Rp16,328,127,000,- pada kegiatan dukungan manajemen. 14 IKM dimaksud merupakan bentuk kinerja yang harus dijalankan atas kegiatan dukman.

a. IK 12: Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan.

Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan adalah suatu ukuran untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Stasiun PSDKP Belawan; Pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Stasiun PSDKP Belawan, yaitu Penerbitan Standar Laik Operasi (SLO).

Formula:

Perhitungan/pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik Ditjen. PSDKP, sebagai berikut:

$$x_{ikm} = x_1$$

x_{ikm} : Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik Ditjen. PSDKP

x_1 : Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO

Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Standar Laik Operasi) Kapal Perikanan merupakan kegiatan pengumpulan data dan informasi terkait pelayanan yang ada di Lingkup Stasiun PSDKP Belawan yaitu SLO. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data tersebut adalah dengan cara survei. Survei kepuasan masyarakat dilakukan pada Tahunan Tahun 2024, Stasiun PSDKP Belawan memperoleh nilai 88,41 dari target 80. **Pencapaian IKU ini dilakukan dengan melaksanakan survey kepuasan masyarakat kepada pengguna jasa di seluruh unit kerja yang ada di Stasiun PSDKP Belawan serta memberikan pelayanan publik yang profesional kepada pengguna jasa.** Berikut kami sampaikan tabel capaian perhitungan indikator kinerja dimaksud.

Tabel 49 Capaian IK 12

Indikator Kinerja	Target		Realisasi				
	2024	2024	2023	2022	2021	2020	Renstra
Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan	80	88,41	79	87,53	88,92	88,02	-

Tabel 50. Perbandingan IK 12 dengan UPT Sejenis

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Belawan	Cilacap	Biak	Ambon	Pontianak	Kupang	Tarakan	Tahuna
SK.8	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP	IKU 12 Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan	88,41	91,52	99,63	96,30	93,88	95,18	89,97	90,51

Analisa penyebab keberhasilan pencapaian IKU dikarenakan beberapa faktor antara lain:

1. Pengawas perikanan sebagai garda terdepan dalam pelayanan SLO telah melaksanakan kegiatan sebagaimana yang diamanatkan UU dan telah memenuhi etika pelayanan publik sehingga pengguna jasa menerima manfaat pelayanan dengan baik;
2. Pengguna jasa telah mendapatkan fasilitas, yang nyaman selama bermitra baik dalam penggunaan aplikasi yang memudahkan seperti e-SLO ataupun ruang tunggu yang nyaman.

Analisa kegiatan yang menunjang keberhasilan antara lain

1. Perawatan Gedung, tersedianya sarana dan prasarana yang memadai adalah salah satu aspek yang secara langsung berdampak kepada kenyamanan para pengguna jasa;
2. Penggunaan aplikasi e-SLO yang mempermudah permohonan keberangkatan kapal perikanan;
3. Internalisasi nilai ASN Ber-AKHLAK kepada para Pengawas Perikanan dan Polsus PWP3K melalui kegiatan apel pagi sehingga memupuk kesadaran dan akBelawanisasi dala melaksanakan pelayanan.

b. IK 13: Nilai Minimal yang Diperyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan

Komponen penilaian Wilayah Bebas Korupsi (WBK) meliputi manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja sesuai dengan PERMEN PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PERMEN PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah dan jika dinilai melalui penilaian mandiri berdasarkan Permen KP Nomor: 62/PERMEN-KP/2017 Tentang Pedoman Pembangunan dan Penetapan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Kriteria:

1. Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75 dengan minimal nilai pengungkit adalah 40;
2. Bobot nilai per area pengungkit minimal 60% untuk semua area pengungkit;
3. Memiliki nilai komponen hasil "Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN" minimal 18,50, dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 13,5 dan sub komponen Persentasi TLHP minimal 5,0.
4. Memiliki nilai komponen hasil "Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat" minimal 15.

Stasiun PSDKP Belawan memperoleh capaian sebesar 82,45 berdasarkan hasil penilaian mandiri dengan eselon I. Hasil ini telah melewati target yang ditetapkan. Sejatinnya Analisa keberhasilan raihan ini dikarenakan **organisasi sudah mempertahankan**

Pembangunan zona integritas sebagai bagian dari sistem organisasi yang berjalan. Secara lazim ketika PERMEN PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019 telah dijalankan maka sebagian besar aspek dalam roda organisasi menjadi aspek penilaian yang berhubungan menjadi penunjang capaian IKU dimaksud. **Kegiatan yang menunjang** kebutuhan organisasi akan sistem yang terukur menjadi landasan internalisasi ZI dalam aktifitas keseharian dikarenakan outout ZI dapat digunakan dan beririsan dengan pemenuhan kebutuhan organisasi lainnya.

Tabel 51 Capaian IK 12

Indikator Kinerja	Target		Realisasi				
	2024	2024	2023	2022	2021	2020	Renstra
Nilai Minimal yang Diperkirakan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan	75	82,45	80,51	77,87	78,98	-	-

Tabel 52 Perbandingan IK 12 antar UPT

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Belawan	Cilacap	Biak	Ambon	Pontianak	Kupang	Tarakan	Tahuna
SK.8	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP	IKU 13 Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas Lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (Indeks)	82,45	89,80	90,40	82,47	84,25	95,51	92,87	87,89

c. IK 14: Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (nilai)

Nilai pengawasan kearsipan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan akan diukur oleh Tim Pengawasan Kearsipan Internal Kementerian Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya hasilnya akan disampaikan melalui surat resmi oleh Kepala Biro Umum dan PBJ. Nilai Pengawasan Kearsipan lingkup Ditjen PSDKP sama dengan Hasil Audit Sistem Kearsipan Internal Unit Kearsipan. Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan pada tahun 2024 Stasiun PSDKP Belawan mendapatkan nilai kearsipan sebesar 81,48 dari target 70. IKM pengawasan kearsipan baru ditetapkan menjadi indeks kinerja yang termuat menjadi perjanjian kinerja pada tahun 2024 sehingga IKM ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Analisa penyebab keberhasilan antara lain:

- Stasiun PSDKP Belawan telah merapikan penataan arsip dengan kodefikasi yang rapi dan lebih tertata;
- Telah melakukan penertiban terhadap penomoran surat yang bersumber dari satu pintu;
- Aktif menyesuaikan kondisi arsip Stasiun PSDKP Belawan dengan ketentuan yang berlaku;
- Melakukan pemusnahan terhadap arsip yang tidak terpakai dengan maksud mengefisienkan gudang penyimpanan arsip.

Analisa kegiatan yang menunjang adalah kegiatan pembinaan dukungan manajemen berupa pengarahan yang dilaksanakan oleh kepala subbagian umum terkait pemenuhan kebutuhan organisasi.

Tabel 53 Capaian IK 14

Indikator Kinerja				Target		Realisasi				
				2024	2024	2023	2022	2021	2020	Renstra
Nilai	Pengawasan	Kearsipan	Internal	70	81,48	-	-	-	-	-
lingkup	UPT	Stasiun	PSDKP Belawan							
(nilai)										

Tabel 54 Perbandingan IK 14 antar UPT

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		Belawan	Cilacap	Biak	Ambon	Pontianak	Kupang	Tarakan	Tahuna
SK.8	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP	IKU 14	Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas Lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (Indeks)	81,48	83,36	83,33	84,80	85,00	80,48	84,14	83,67

d. IK 15: Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (%)

Pengendalian dengan pendekatan Manajemen Risiko dilakukan oleh Pimpinan satuan kerja sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pimpinan satuan kerja sebagai pemilik risiko melakukan pengendalian yang lebih memadai dengan pendekatan manajemen risiko

untuk mencapai tujuan suatu aktivitas/kegiatan apabila kebijakan dan aktivitas/kegiatan yang diperkirakan tidak cukup hanya dengan pengendalian rutin. Penilaian risiko dilakukan melalui Form Penilaian Risiko sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pemantauan dan pengendalian Manajemen Risiko dilakukan melalui Form Pemantauan Risiko yang dilakukan setiap triwulan.

Formula:

$$X = \frac{a}{b} \times 100$$

Keterangan:

- X = Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko
a = Dokumen pengendalian kegiatan berbasis Manajemen Risiko yang dipenuhi
b = Jumlah dokumen Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko

Keterangan pola perhitungan

- TW I = TW I
- TW II = (TW I + TW II)/2
- TW III = (TW I + TW II + TW III)/3
- TW IV = (TW I + TW II + TW III + TW IV)/4

Stasiun PSDKP Belawan telah melakukan pengendalian resiko dan dipantau oleh tim sesdit terkait kelengkapan data dukung dan tahapan pengendalian. Capaian yang diperoleh Stasiun PSDKP Belawan **sebesar 100 dari target 100 pada tahun 2024**. Pencapaian ini dikarenakan seluruh tahapan resiko pada Stasiun PSDKP Belawan telah dilaksanakan dan telah terdokumentasikan serta telah diverifikasi. Capaian indikator kinerja ini kami sajikan dalam tabel berikut.

Tabel 55 Capaian IK 15

Indikator Kinerja	Target			Realisasi				
	2024	2024	2023	2022	2021	2020	Renstra	
Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (%)	100	100	100	-	-	-	-	

Tabel 56 Perbandingan IK 15 antar UPT

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Belawan	Cilacap	Biak	Ambon	Pontianak	Kupang	Tarakan	Tahuna
SK.8	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP	IKU 15 Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas Lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (Indeks)	100	100	100	100	100	100	100	100

$$\text{Capaian IK 15} = \frac{tw I + tw II + tw III + tw IV}{4} = \frac{100 + 100 + 100 + 100}{4} = \frac{400}{4} = 100$$

Analisa penyebab keberhasilan kegiatan ini antara lain:

1. Setiap tim kerja mengidentifikasi setiap skala resiko yang kemungkinan bisa terjadi dalam rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dan dituangkan dalam form kendali yang mendapat perhatian dan arah pimpinan;
2. Menentukan langkah pencegahan yang dilakukan untuk meminimalisir resiko tersebut;
3. Mengarsipkan dokumen manajemen resiko.

Analisa kegiatan yang menunjang keberhasilan adalah evaluasi, kegiatan organisasi berjalan seirama sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan sebagai acuan kerja. Kegiatan yang sama akan berjalan terus sehingga peran evaluasi akan memberikan gambaran terhadap rencana dan pencegahan kedepan atas dasar evaluasi kegiatan sebelumnya.

e. IK 16: Indeks profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan

Pengembangan SDM sebagai sumber daya pengawasan SDKP, menekankan manusia sebagai pelaku pengawasan yang memiliki etos kerja produktif, keterampilan, kreativitas, disiplin, profesionalisme, loyalitas serta memiliki kemampuan memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi maupun kemampuan manajemen. Hal ini harus terus dikembangkan baik secara kualitas maupun kuantitas guna keberhasilan pengawasan SDKP. **Pada tahun 2024 Stasiun PSDKP Belawan memperoleh capaian sebesar 90,97 dari target 82. Analisa keberhasilan capaian ini adalah:**

1. Mengkomunikasikan dan mendelegasikan semua staff Stasiun PSDKP Belawan agar terlibat pada kegiatan yang mendukung dan memperbaiki kompetensi pegawai, baik secara daring maupun luring;

2. Melibatkan pimpinan dalam *controlling* peningkatan IP ASN yang esensinya adalah memenuhi kebutuhan pegawai dalam meningkatkan kapasitas diri dengan diklat 20 JP.

Stasiun PSDKP Belawan telah berhasil melewati target yang ditetapkan dan mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023. Peningkatan disebabkan terdapat beberapa pegawai yang pada tahun 2023 tidak memenuhi hak dan kewajiban untuk mengikuti diklat 20 JP, dimana pada tahun 2024 ini telah memenuhi diklat 20 JP.

Analisa kegiatan yang menunjang keberhasilan ialah evaluasi capaian IP ASN pada semester I dan tahunan sehingga pimpinan dapat memantau progress kenaikan dan siapa saja yang belum melaksanakan diklat 20 JP.

Tabel 57 Capaian IK 16

Indikator Kinerja	Target		Realisasi				
	2024	2023	2022	2021	2020	Renstra	
Indeks profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan	82	90,97	87,76	82,17	81,27	80,48	76

Tabel 58 Perbandingan IK 16 antar UPT

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Belawan	Cilacap	Biak	Ambon	Pontianak	Kupang	Tarakan	Tahuna
SK.8	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP	IKU 16 Indeks profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan	90,97	87,53	86,92	86,08	89,91	88,84	89,14	83,93

f. IK 17: Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan

Dalam penilaian mandiri SAKIP yang dilaksanakan pada tahun 2024 ada empat aspek yang dinilai yaitu:

- Aspek perencanaan
- Aspek pengukuran
- Aspek pelaporan
- Aspek evaluasi

Dimana hasil pengukuran merupakan pemenuhan data LKE pada aplikasi kinerjaku dengan upload bukti dukung yang sesuai kriteria penilaian. Stasiun PSDKP Belawan memperoleh nilai **85,45 dengan target 84**. Capaian pada tahun 2024 ini lebih tinggi bila di bandingkan

dengan capaian tahun 2023 yang sebesar **82,15**. **Analisa keberhasilan** terhadap IKU ini dikarenakan

1. Pemenuhan data dukung sesuai ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/PERMEN-KP/2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
2. Melakukan tindak lanjut terhadap koreksi ketika *self assessment*.

Sedangkan analisa kegiatan yang menunjang tercapainya IKU ini adalah

1. Kegiatan perencanaan kinerja Stasiun PSDKP Belawan, baik berupa dokumen maupun kegiatan rapat;
2. Kegiatan pengukuran, seperti penginputan capaian pada aplikasi kinerjaku, bukti asistensi penilaian;
3. Pelaporan kinerja Stasiun PSDKP Belawan;
4. Kegiatan evaluasi penilaian capaian kinerja;

Tabel 59 Capaian IK 17

Indikator Kinerja					Target		Realisasi				
					2024	2024	2023	2022	2021	2020	Renstra
Penilaian	Mandiri	SAKIP	lingkup	UPT	84	85,45	82,15	-	-	-	87,75
Stasiun PSDKP Belawan											

Tabel 60. Perbandingan IK 17 antar UPT

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Belawan	Cilacap	Biak	Ambon	Pontianak	Kupang	Tarakan	Tahuna
SK.8	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP	IKU 17 Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan	85,45	87,25	85,85	86,40	86,75	86,45	83,45	87,20

g. IK 18: Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan

Sebagai bentuk pengawasan dari APIP lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal KKP maka telah dirumuskan IK “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan lingkup Stasiun UPT PSDKP Belawan yang Dokumen

Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan”. Selama tahun 2024 Stasiun PSDKP Belawan memiliki rekomendasi hasil sebanyak 32 rekomendasi yang harus ditindak lanjuti, berdasarkan surat SESDITJEN PSDKP Nomor B.141/PSDKP.1/TU.140/I/2025 tanggal 8 Januari 2025. Stasiun PSDKP Belawan telah menindaklanjuti 32 rekomendasi tersebut sehingga capaian Stasiun PSDKP Belawan untuk indikator kinerja dimaksud adalah 100%. Perhitungan capaian tahunan merupakan rata-rata capaian setiap triwulan yang dirata-ratakan.

Keterangan pola perhitungan

- TW I = TW I
- TW II = (TW I + TW II)/2
- TW III = (TW I + TW II + TW III)/3
- TW IV = (TW I + TW II + TW III + TW IV)/4

Capaian tahun 2024 akan kami tampilkan dalam tabel berikut.

Tabel 61 Capaian IK 18

Indikator Kinerja	Target		Realisasi				
	2024	2024	2023	2022	2021	2020	Renstra
Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	80	100	100	100	-	-	80

Tabel 62. Perbandingan IK 18 antar UPT

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Belawan	Cilacap	Biak	Ambon	Pontianak	Kupang	Tarakan	Tahuna
SK.8	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP	IKU 18 Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	100	100	100	100	100	100	100	100

Analisa penyebab keberhasilan yang mendukung capaian ini adalah mendelegasikan pihak yang bertanggung jawab jika terdapat rekomendasi untuk ditindaklanjuti, dan pimpinan yang proaktif untuk memantau sejauh mana progress tindaklanjut sudah diselesaikan.

Analisa kegiatan yang menunjang adalah kegiatan monitoring internal setelah rekomendasi disampaikan, yang dipimpin langsung oleh kasubag umum agar tindak lanjut dapat segera disampaikan.

h. IK 19: Nilai Implementasi Program Budaya Kerja lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan

Nilai implementasi program budaya kerja adalah indikator yang menunjukkan keberhasilan implementasi program budaya kerja di lingkungan Satker. Nilai implementasi program budaya kerja diperoleh dari hasil pengukuran mandiri oleh Komite dan Tim Budaya Kerja Satker, menggunakan LKE Pelaksanaan Program Budaya Kerja

Unsur Budaya Kerja yang dinilai implementasinya terdiri dari:

1. Tim Satker (6)
2. Hasilkan Inovasi Unit Kerja (12)
3. Lima Menit Sebelum Jadwal (2)
4. Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin (2)
5. Upayakan Data Terkini (2)
6. Organisasikan, Catat, Aksi, dan Arsipkan (3)
7. Tegakan Aturan dengan Akuntabel dan Transparan (1)
8. Belanjakan Anggaran secara Realistis, Akuntabel dan Amanah (1)
9. ASN PSDKP Produktif Kerja (1)
10. Menyelesaikan Tugas dengan Tepat (3)
11. Hargai, Motivasi, dan Inisiatif (2)
12. Gelorakan Gerakan hemat Energi (3)

Formula:

$$N = \sum n$$

N = Nilai Implementasi Program Budaya Kerja UPT Stasiun PSDKP Belawan

n = Unsur Budaya Kerja yang dinilai (terdiri dari 12 unsur)

Penilaian terhadap IKU ini diperoleh capaian sebesar 75,11 atau 107,30%. IKU ini dinilai dengan LKE yang dipandu oleh pihak sesdit PSDKP. Penilaian optimal yang didapat dikarenakan ke 12 aspek yang dijadikan indikator telah dilaksanakan dengan baik.

Analisa keberhasilan indeks kinerja ini adalah

- Internalisasi point budaya kerja dalam kegiatan organisasi baik dalam apel pagi maupun dengan kegiatan dan menjadi bagian sistem.

Kegiatan yang mendukung tercapainya indikator ini adalah

- Keterlibatan pimpinan dalam setiap kegiatan yang mengimplementasikan budaya kerja;
- Memberikan reward bagi pegawai yang memahami nilai budaya kerja.

Terdapat perubahan target dari 21 menjadi 70. Perubahan target ini kemudian disesuaikan dalam PK. Berikut kami sajikan data capaian beberapa tahun terakhir dalam tabel, perbedaan nilai yang jauh bukan dikarenakan perbedaan kualitas capaian melainkan hanya terjadi perubahan target.

Tabel 63 Capaian IK 19

Indikator Kinerja	Target		Realisasi				
	2024	2024	2023	2022	2021	2020	Renstra
Nilai Implementasi Program Budaya Kerja lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan	70	75,11	25,34	26,67	-		-

Tabel 64 Perbandingan IK 19 antar UPT

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Belawan	Cilacap	Biak	Ambon	Pontianak	Kupang	Tarakan	Tahuna
SK.8	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP	IKU 19 Nilai Implementasi Program Budaya Kerja lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan	75,11	83,57	81,05	73,58	73,27	81,72	76,23	81,24

i. **IK 20: Inovasi pelayanan publik yang diterapkan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (inovasi)**

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2021, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat konteks Belawan baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada.

- Kriteria Inovasi: memiliki kebaruan, efektif, bermanfaat, dapat ditransfer/direplikasi, berkelanjutan
- Kelompok inovasi: umum, replikasi, khusus

Stasiun PSDKP Belawan berhasil menghasilkan 1 buah inovasi pelayanan publik yang berjudul SIKAT (Sistem Informasi Kontrol Aktivitas Kapal Di Tangkahan). Inovasi ini dikembangkan dengan maksud sebagai tindaklanjut dan komitmen Stasiun PSDKP Belawan dalam memberikan pelayanan prima kepada seluruh stakeholder dan membantu pengawas perikanan dalam melakukan pengawasan kapal perikanan yang pada umumnya melaksanakan kegiatan aktivitasnya di tangkahan.

Analisa penyebab keberhasilan dari IK ini adalah komitmen dari seluruh pegawai Stasiun PSDKP Belawan untuk mengkampanyekan semangat pelayanan prima. Berikut kami sajikan datanya dalam bentuk tabel.

Tabel 65 Capaian IK 20

Indikator Kinerja	Target		Realisasi				
	2024	2024	2023	2022	2021	2020	Renstra
Inovasi pelayanan publik yang diterapkan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (inovasi)	1	1	1	1	1	1	1

Tabel 66 Pebandingan IK 20 antar UPT

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Belawan	Cilacap	Biak	Ambon	Pontianak	Kupang	Tarakan	Tahuna
SK.8	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP	IKU 20 Inovasi pelayanan publik yang diterapkan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (inovasi)	1	1	1	1	1	1	1	1

j. IK 21: Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah maupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari.

Terdapat 2 Komponen yang dijadikan sebagai tolak ukur, yaitu:

- Keikutsertaan: Pimpinan UPT Stasiun PSDKP Belawan, Kepala Subbagian Umum, dan seluruh KaTimja;

- Keaktifan: Pimpinan UPT Stasiun PSDKP Belawan, Kepala Subbagian Umum, dan seluruh KaTimja.

Pengukuran capaian indikator kinerja ini menggunakan Aplikasi coffice dengan target 94% pada tahun 2024. Capaian IK Stasiun PSDKP Belawan sebesar 130%. Perhitungan capaian Persentase unit kerja Stasiun PSDKP Belawan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar pada tahun 2024 mengadopsi perhitungan data yang diberikan oleh Eselon I. Capaian pada Tahunan Ini sangat optimal dan memenuhi unsur 5w1h, hal ini dikarenakan keaktifan akun coffice dipantau secara berkala dengan memberikan notes atas serangkaian kegiatan yang memenuhi kriteria agar dapat diposting. Berikut kami sajikan data capaian dalam bentuk tabel.

Tabel 67 Capaian IK 21

Indikator Kinerja	Target		Realisasi				
	2024	2024	2023	2022	2021	2020	Renstra
Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan	94	130	123,33	97,78	98,89	100	90

Tabel 68. Perbandingan IK 21 antar UPT

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Belawan	Cilacap	Biak	Ambon	Pontianak	Kupang	Tarakan	Tahuna
SK.8	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP	IKU 21 Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan	130,00	133,33	132,50	122,50	131,25	133,33	130,42	133,33

Analisa keberhasilan pencapaian indeks kinerja ini antara lain:

- Mendukung pencapaian indeks kinerja dengan melakukan monitoring keaktifan internal oleh operator Coffice yang diinformasikan melalui WAG agar ditindaklanjuti oleh pemegang akun;

- Memberikan catatan atas kegiatan yang telah terlaksana lingkup Stasiun PSDKP Belawan baik kegiatan teknis maupun majerial agar history kegiatan dapat dituangkan ke dalam aplikasi coffice;
- Keterlibatan pimpinan yang aktif dalam memantau dan memacu keaktifan pemegang akun untuk melaporkan segala bentuk kegiatan yang telah dilaksanakan.

Kegiatan yang menunjang dalam pencapaian IK ini adalah

- Keaktifan Stasiun PSDKP Belawan dalam berpartisipasi dalam kegiatan eksternal dalam mendukung kinerja organisasi;
- Melaksanakan kegiatan internal yang aktif dalam mendukung capaian kinerja.

k. IK 22: Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan

IKU ini merupakan Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN lingkup Unit Pelaksana Teknis yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Stasiun PSDKP Belawan berhasil memperoleh capaian 100% dari target 80% yang ditetapkan pada Tahun 2024. Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Stasiun PSDKP Belawan tercapai berdasarkan beberapa **analisa penyebab keberhasilan** antara lain:

- 1). Pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2024;
- 2). Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga triwulan 4 Tahun 2024 baik ke pengguna barang dan pengelola barang;
- 3). Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2024 didukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian;
- 4). Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu.

Analisa kegiatan yang menunjang keberhasilan antara lain;

1. Kegiatan pengadministrasian BMN meliputi persuratan yang telah dilaksanakan secara tertib, dengan memperbaiki system pengelolaan BMN setiap tahunnya;
2. Pendistribusian BMN yang tepat guna.

Tabel 69 Capaian IK 22

Indikator Kinerja	Target		Realisasi				
	2024	2024	2023	2022	2021	2020	Renstra
Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan	80	100	100	100	100	-	-

Tabel 70. Perbandingan IK 22 antar UPT

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Belawan	Cilacap	Biak	Ambon	Pontianak	Kupang	Tarakan	Tahuna
SK.8	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP	IKU 22 Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan	100	100	100	95	100	100	95	100

I. IK 23: Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa Lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan

IK Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/ Jasa Lingkup Stasiun PSDKP Belawan yaitu suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengadaan Barang/Jasa lingkup Unit Stasiun PSDKP Belawan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Analisa keberhasilan IK :

- 1). Rencana umum pengadaan telah diupload ke dalam aplikasi SIRUP, kegiatan ini telah dipenuhi tapi belum optimal dikarenakan banyaknya revisi yang dijalankan;
- 2). Pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE oleh Stasiun PSDKP Belawan;
- 3). Kelengkapan laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Stasiun PSDKP Belawan;
- 4). Kesesuaian tahap pelaksanaan.

Stasiun PSDKP Belawan berhasil memperoleh raihan 89,11 untuk Tahun 2024 melewati target yaitu 80. Kendala sehingga capaian tidak optimal karena pelaksanaan kontrak yang dilaksanakan pada Triwulan III, sehingga tidak bisa memperoleh nilai maksimal pada factor penilaian tersebut.

Kegiatan yang mendukung pencapaian IKU ini antara lain:

1. Melakukan updating data revisi;
2. Melengkapi administrasi pengadaan pada setiap tahapan;
3. Melaksanakan evaluasi terhadap kegiatan pengadaan barang dan jasa.

Berikut kami sampaikan capaian IK 23 dalam bentuk tabel.

Tabel 71 Capaian IK 23

Indikator Kinerja			Target		Realisasi				
			2024	2024	2023	2022	2021	2020	Renstra
Tingkat	kepatuhan	pengadaan	80	89,11	95,04	100	96,29	-	-
barang/jasa Lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan									

Tabel 72 Perbandingan IK 23 antar UPT

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Belawan	Cilacap	Biak	Ambon	Pontianak	Kupang	Tarakan	Tahuna
SK.8	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP	IKU 23 Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa Lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan	89,11	96,29	88,75	100,00	94,64	100,00	92,23	83,49

m. IK 24: Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan

Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (Nilai) merupakan Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran dengan memperhatikan 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran. Target IKPA Tahun 2024 sebesar 93.76 (nilai). Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain

- Sangat Baik, apabila nilai IKPA ≥ 95 ;
- Baik, apabila $89 \leq \text{nilai IKPA} < 95$;
- Cukup, apabila $70 \leq \text{nilai IKPA} < 89$; atau
- Kurang, apabila nilai IKPA < 70

Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah sebagai evaluasi dan *spending review* terhadap optimalisasi peran belanja Kementerian/Lembaga dalam rangka ketahanan fiskal dan ekonomi dengan berdasarkan 13 (tiga belas) Indikator Pelaksanaan Anggaran yaitu; Capaian Output, Revisi DIPA, Halaman III DIPA, Pengelolaan UP, Rekon LPj Bendahara, Data Kontrak, Penyelesaian Tagihan, Penyerapan Anggaran, Retur SP2D, Perencanaan Kas, Pengembalian SPM, Dispensasi Penyampaian SPM, dan Pagu Minus. Penghitungan capaian kinerja diperoleh dari hasil penghitungan yang dilakukan dalam aplikasi Sistem Online

Monitoring SPAN (OMSPAN) Kementerian Keuangan. **Pada Tahun 2024 Stasiun PSDKP Belawan mendapatkan nilai IKPA sebesar 93,98 dan memenuhi target yaitu 93,76.** Analisa keberhasilan IK :

- 1). Adanya monitoring dari Kepala Stasiun dan Kepala Urusan Umum terhadap pelaksanaan kegiatan dan keuangan di Stasiun PSDKP Belawan;
- 2). Kesesuaian tahap pelaksanaan.

Tabel 73 Capaian IKPA Stasiun PSDKP Belawan

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP					
1	123	032	440831	STASIUN PENGAWASAN SDKP BELAWAN	Nilai	100.00	86.89	92.67	98.67	100.00	89.49	94.40	93.98	100%	0.00	93.98
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.03	18.53	9.87	10.00	8.95	23.60				
					Nilai Aspek	93.45		95.21				94.40				

Tabel 74 Capaian IK 24

Indikator Kinerja		Target		Realisasi				
		2024	2024	2023	2022	2021	2020	Renstra
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan		93,76	93,98	92,67	93,77	91,02	96,92	90

Tabel 75 Perbandingan IK 24 antar UPT

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Belawan	Cilacap	Biak	Ambon	Pontianak	Kupang	Tarakan	Tahuna
SK.8	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP	IKU 24 Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa Lingkup UPT Stasiun PSDKP	93,98	97,56	95,94	88,40	90,57	99,04	96,10	93,78

n. IK 25: Nilai kinerja perencanaan anggaran lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan

Nilai kinerja perencanaan anggaran diperoleh melalui pengukuran atas:

1. Variabel efektivitas (bobot 75%) yang didasarkan pada capaian Rincian Output (RO) pada level satuan kerja, capaian Indikator Kinerja Program pada level Unit Eselon I, dan capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis pada level K/L; dan

2. Variabel efisiensi (bobot 25%) yang didasarkan pada hasil perbandingan antara indeks realisasi anggaran dengan indeks standar biaya keluaran (SBK) sesuai PMK Nomor 113 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2024.

Pada tahun 2024 Stasiun PSDKP Belawan telah mentergetkan IK 25 sebesar 71 dengan capaian sebesar 84,49. Adapun **analisa penyebab keberhasilan** adalah:

1. CRO Stasiun PSDKP Belawan yang melebihi target, dalam realisasi RO Stasiun PSDKP Belawan telah optimal melaksanakan kegiatan yang efektif sehingga capaian yang dihasilkan lebih optimal;
2. Perbandingan antara indeks realisasi anggaran dengan indeks standar biaya keluaran (SBK) sesuai PMK Nomor 113 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2024 pada Stasiun PSDKP Belawan telah sesuai dengan ketentuan perhitungan yang berlaku.

Analisa kegiatan yang menunjang monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja setiap RO dan mengoptimalkan kinerja baik terhadap kegiatan utama dan manajerial. Berikut kami sampaikan capaian NKPA Stasiun PSDKP Belawan dalam bentuk tabel.

Tabel 76 Capaian IK 25

Indikator Kinerja	Target			Realisasi			
	2024	2024	2023	2022	2021	2020	Renstra
Nilai kinerja perencanaan anggaran lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan	71	84,49	-	-	-	-	-

Tabel 77 Perbandingan IK 25 antar UPT

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Belawan	Cilacap	Biak	Ambon	Pontianak	Kupang	Tarakan	Tahuna
SK.8	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP	IKU 25 Nilai kinerja perencanaan anggaran lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan	84,49	98,08	96,18	93,99	98,89	93,83	95,34	84,95

C. Analisa atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Secara sederhana analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya adalah pemanfaatan sumber daya ekonomi yang minimal untuk perbaikan proses sehingga menghasilkan output yang maksimal. Efisiensi didefinisikan sebagai suatu hubungan antara hasil (output) yang ingin dicapai dengan sumber daya (input) yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dalam pencapaian output tersebut menggunakan input seminimal mungkin.

Stasiun PSDKP Belawan selama tahun 2024 telah menyelesaikan anggaran yang diamanatkan dengan capaian nilai kinerja organisasi sebesar 106,43 dengan realisasi sebesar 99,78% sebagaimana akan dijabarkan pada pembahasan selanjutnya. Stasiun PSDKP Belawan sudah berhasil melaksanakan prinsip efisiensi sumberdaya yaitu, dengan anggaran yang ada mampu memperoleh capaian kinerja yang lebih, walaupun belum optimal. Pengoptimalan dalam anggaran dengan pencapaian target yang besar harus dilaksanakan dan terus dibenahi.

Upaya yang telah dilaksanakan Stasiun PSDKP Belawan antara lain:

1. Melakukan kontroling terhadap pelaksanaan kegiatan dengan mengutamakan asas prioritas dan melakukan penggabungan kegiatan yang dapat dilaksanakan secara bersama sehingga output yang didapat optimal dengan anggaran yang terbatas;
2. Melakukan perhitungan kembali atas penyimpangan anggaran sehingga dapat memenuhi target yang dicapai, sebagai contoh perencanaan kembali pemenuhan hari operasi kapal pengawas setelah BBM mengalami kenaikan. Perhitungan dilaksanakan sehingga kekurangan anggaran dalam pencapaian target dapat dihitung dilakukan penambahan kemudian terjadi optimalisasi hari operasi;
3. Melakukan optimalisasi dalam kegiatan pengawasan maupun operasi seperti penggabungan kegiatan pengawasan yang memiliki rentang kendali jauh sehingga dapat dilaksanakan bersamaan dengan gelar operasi;
4. Melakukan internalisasi terkait kemampuan SDM dalam pelaksanaan kegiatan, seperti pendelegasian Pengawas Perikanan, Polsus PWP3K, PPNS, dalam kegiatan bimbingan teknis ataupun penguatan kapastitas pengawas agar para petugas dapat meningkatkan kemampuan dalam pelaksanaan tugas;
5. Stasiun PSDKP Belawan telah melaksanakan kegiatan core value ASN Ber-Akhlak kepada para pegawai sebagai wujud peningkatan kapasitas ASN.

6. Melakukan reformulasi terhadap penugasan agar pembagian tugas dapat merata disaat Stasiun PSDKP Belawan memiliki sejumlah personel yang sedang dalam tugas belajar.

D. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran tahun 2024 yang telah dicapai oleh Stasiun Pengawasan SDKP Belawan sampai 31 Desember 2024 sebesar 99,78% atau sebesar Rp 39.139.606.512,- (Tiga Puluh Sembilan Milyar Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Enam Ribu Lima Ratus Dua Belas Rupiah) dari total anggaran yang di alokasikan yaitu Rp. 39.223.972.000,- (Tiga Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Dua Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah).

Tabel 78. Realisasi Anggaran Stasiun PSDKP Belawan Tahun 2024

No	Nama Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
1	Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan	20,590,716,000	20,561,705,982	99,86%
2	Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	720,422,000	679,586,765	94,33%
3	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	512,707,000	512,398,719	99,94%
4	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	1,072,000,000	1,071,076,387	99,91%
5	Dukungan Manajemen	16,328,127,000	16,314,838,659	99,92%
Total		39,223,972,000	39,139,606,512	99,78%

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sampai dengan akhir Tahun 2024, kinerja Stasiun PSDKP Belawan telah mencapai hasil yang baik. Penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian Sasaran Program, diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Manajerial (IKM). Pada Tahun 2024, terdapat 25 Indikator Kinerja yang menjadi komitmen kinerja UPT Stasiun PSDKP Belawan. Pencapaian IKU Tahunan tahun 2024 dengan nilai NKO sebesar 106,43. Selama kurun waktu tahun 2024 UPT Stasiun PSDKP Belawan telah melakukan penilaian terhadap 25 Indikator Kinerja. 10 IK biru (istimewa) 15 IK lainnya berstatus hijau (baik).

B. Saran dan Rekomendasi

Memperhatikan analisis capaian kinerja sebagaimana diuraikan pada bagian – bagian sebelumnya dan dalam rangka upaya untuk meningkatkan kinerja Stasiun PSDKP Belawan pada periode Triwulan I Tahun 2025. Saran dan rencana perbaikan tersebut kami tampilkan dalam tabel berikut :

Tabel 79 Saran dan Rencana Tindak Lanjut atas pencapaian kinerja Stasiun PSDKP Belawan Periode Tahun 2024

No	Saran	Rencana Aksi	Waktu
1	Melaksanakan kontrol terhadap IKU Tahun 2025	Melakukan rapat perencanaan dan rapat evaluasi	• Triwulan I - IV



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520346
LAMAM www.kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
STASIUN PENGAWASAN SDKP BELAWAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhamad Syamsu Rokhman
Jabatan : Kepala Stasiun Pengawasan SDKP Belawan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Adin Nurawaluddin
Jabatan : Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

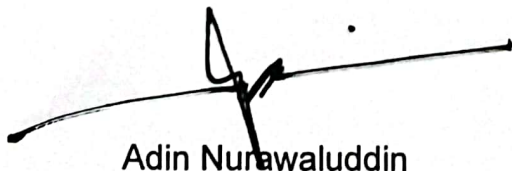
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 3 Januari 2024

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



Adin Nurawaluddin

PIHAK PERTAMA
Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan Belawan



Muhamad Syamsu Rokhman

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
STASIUN PSDKP BELAWAN

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
SK1	Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif	1. Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas (indeks)	81
SK2	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif	2. Indeks kinerja operasi kapal pengawas (indeks)	91
		3. Indeks kinerja operasi speedboat pengawas (indeks)	91
		4. Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas (%)	100
SK2	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	5. Persentase sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	100
		6. Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP (%)	100
SK4	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan	7. Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (Nilai)	100
SK5	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan	8. Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (Nilai)	100
SK6	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas	9. Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (Indeks)	80
		10. Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (Indeks)	80
SK7	Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang berkualitas	11. Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan PerikananLingkup Stasiun PSDKP Belawan (Indeks)	93
SK8	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP	12. Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (Indeks)	80
		13. Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (nilai)	75
		14. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Ditjen. PSDKP (nilai)	70
		15. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	100

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
		16. Indeks profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (indeks)	82
		17. Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (nilai)	84
		18. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	80
		19. Nilai implementasi program budaya kerja Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (nilai)	21
		20. Inovasi Pelayanan Publik Yang Diterapkan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (inovasi)	1
		21. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	94
		22. Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	80
		23. Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	80
		24. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (nilai)	93,76
		25. Nilai kinerja anggaran (NKA) Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (nilai)	82

Data Anggaran:

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan	17.966.612.000
2.	Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	849.000.000
3.	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	546.500.000
4.	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	1.097.000.000
5.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	16.210.857.000
Total Anggaran Stasiun PSDKP Belawan Tahun 2024		36.669.969.000

Jakarta, 3 Januari 2024

PIHAK KEDUA

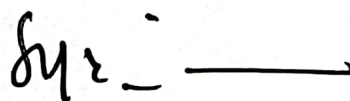
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



Adin Nurawaluddin

PIHAK PERTAMA

Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan Belawan



Muhamad Syamsu Rokhman

3



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520346
LAMAM www.kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
STASIUN PENGAWASAN SDKP BELAWAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Muhamad Syamsu Rokhman**
Jabatan : Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Pung Nugroho Saksono**
Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

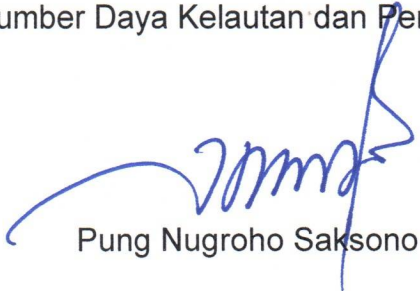
Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

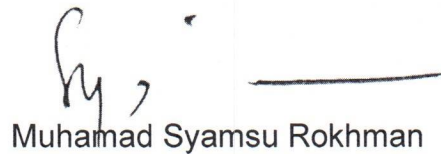
Jakarta, 15 Februari 2024

PIHAK KEDUA
Plt. Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



Pung Nugroho Saksono

PIHAK PERTAMA
Kepala Stasiun Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan



Muhamad Syamsu Rokhman

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
STASIUN PSDKP BELAWAN

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
SK1	Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif	1. Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas (indeks)	81
SK2	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif	2. Indeks kinerja operasi kapal pengawas (indeks)	91
		3. Indeks kinerja operasi speedboat pengawas (indeks)	91
		4. Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas (%)	100
SK3	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	5. Persentase sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	100
		6. Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP (%)	100
SK4	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan	7. Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (Nilai)	100
SK5	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan	8. Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (Nilai)	100
SK6	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas	9. Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (Indeks)	80
		10. Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (Indeks)	80
SK7	Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang berkualitas	11. Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan PerikananLingkup Stasiun PSDKP Belawan (Indeks)	93
SK8	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP	12. Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (Indeks)	80
		13. Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (nilai)	75
		14. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Stasiun PSDKP Belawan (nilai)	70
		15. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	100

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
		16. Indeks profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (indeks)	82
		17. Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (nilai)	84
		18. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	80
		19. Nilai implementasi program budaya kerja Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (nilai)	21
		20. Inovasi Pelayanan Publik Yang Diterapkan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (inovasi)	1
		21. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	94
		22. Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	80
		23. Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	80
		24. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (nilai)	93,76
		25. Nilai kinerja anggaran (NKA) Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (nilai)	82

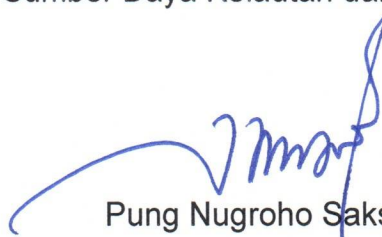
Data Anggaran

NO	KEGIATAN/SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Kegiatan Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	546.500.000
2	Kegiatan Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	1.097.000.000
3	Kegiatan Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan	17.966.612.000
4	Kegiatan Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	849.000.000
5	Kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	16.210.857.000
Total Anggaran Stasiun PSDKP Belawan Tahun 2024		36.669.969.000

Jakarta, 15 Februari 2024

PIHAK KEDUA

Plt. Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



Pung Nugroho Saksono

PIHAK PERTAMA

Kepala Stasiun Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan



Muhamad Syamsu Rokhman



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NO. 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON: (021) 3519070 FAKSIMILE: (021) 3520346
WEBSITE: www.djpsdkp.kkp.go.id EMAIL: ditjenpsdkp@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 STASIUN PENGAWASAN SDKP BELAWAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Muhamad Syamsu Rokhman**
Jabatan : Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Pung Nugroho Saksono**
Jabatan : Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

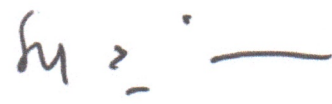
Jakarta, 8 Oktober 2024

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



Pung Nugroho Saksono

PIHAK PERTAMA
Kepala Stasiun Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan



Muhamad Syamsu Rokhman

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
STASIUN PSDKP BELAWAN

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
SK1	Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif	1. Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas (indeks)	81
SK2	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif	2. Indeks kinerja operasi kapal pengawas (indeks)	91
		3. Indeks kinerja operasi speedboat pengawas (indeks)	91
		4. Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas (%)	100
SK3	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	5. Persentase sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	100
		6. Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP (%)	100
SK4	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan	7. Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (Nilai)	100
SK5	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan	8. Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (Nilai)	100
SK6	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas	9. Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (Indeks)	80
		10. Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (Indeks)	80
SK7	Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang berkualitas	11. Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan PerikananLingkup Stasiun PSDKP Belawan (Indeks)	93
SK8	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP	12. Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (Indeks)	80
		13. Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (nilai)	75
		14. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Stasiun PSDKP Belawan (nilai)	70
		15. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	100

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
		16. Indeks profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (indeks)	82
		17. Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (nilai)	84
		18. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	80
		19. Nilai implementasi program budaya kerja Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (nilai)	21
		20. Inovasi Pelayanan Publik Yang Diterapkan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (inovasi)	1
		21. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	94
		22. Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	80
		23. Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	80
		24. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (nilai)	93,76
		25. Nilai kinerja anggaran (NKA) Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (nilai)	71

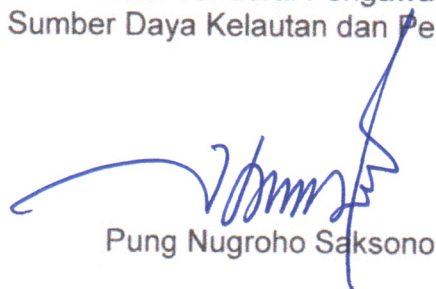
Data Anggaran

NO	KEGIATAN/SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Kegiatan Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	546.500.000
2	Kegiatan Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	1.097.000.000
3	Kegiatan Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan	21.466.612.000
4	Kegiatan Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	849.000.000
5	Kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	16.210.857.000
Total Anggaran Stasiun PSDKP Belawan Tahun 2024		40.169.969.000

Jakarta, 8 Oktober 2024

PIHAK KEDUA

Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



Pung Nugroho Saksono

PIHAK PERTAMA

Kepala Stasiun Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan



Muhamad Syamsu Rokhman



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NO. 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON: (021) 3519070 FAKSIMILE: (021) 3520346
WEBSITE: www.djpsdkp.kkp.go.id EMAIL: ditjenpsdkp@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
STASIUN PENGAWASAN SDKP BELAWAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhamad Syamsu Rokhman

Jabatan : Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Belawan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Pung Nugroho Saksono

Jabatan : Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 27 Desember 2024

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Pung Nugroho Saksono

PIHAK PERTAMA
Kepala Stasiun Pengawasan SDKP
Belawan

Muhamad Syamsu Rokhman

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
STASIUN PSDKP BELAWAN

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
SK1	Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif	1. Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas (indeks)	81
SK2	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif	2. Indeks kinerja operasi kapal pengawas (indeks)	91
		3. Indeks kinerja operasi speedboat pengawas (indeks)	91
		4. Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas (%)	100
SK3	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	5. Persentase sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	100
		6. Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP (%)	100
SK4	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan	7. Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (Nilai)	100
SK5	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan	8. Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (Nilai)	100
SK6	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas	9. Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (Indeks)	80
		10. Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (Indeks)	80
SK7	Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang berkualitas	11. Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan PerikananLingkup Stasiun PSDKP Belawan (Indeks)	93
SK8	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP	12. Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (Indeks)	80
		13. Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (nilai)	75
		14. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Stasiun PSDKP Belawan (nilai)	70
		15. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	100

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
		16. Indeks profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (indeks)	82
		17. Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (nilai)	84
		18. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	80
		19. Nilai implementasi program budaya kerja Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (nilai)	70
		20. Inovasi Pelayanan Publik Yang Diterapkan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (inovasi)	1
		21. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	94
		22. Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	80
		23. Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	80
		24. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (nilai)	93,76
		25. Nilai kinerja pelaksanaan anggaran Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (nilai)	71

Data Anggaran

NO	KEGIATAN/SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
Kegiatan 1	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	546.500.000
Kegiatan 2	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	1.097.000.000
Kegiatan 3	Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan	23.830.534.000
Kegiatan 4	Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	720.422.000
Kegiatan 5	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	16.396.857.000
Total Anggaran Stasiun Pengawasan SDKP Belawan		40.227.391.000

Jakarta, 27 Desember 2024

PIHAK KEDUA

Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Pung Nugroho Saksono

PIHAK PERTAMA

Kepala Stasiun Pengawasan SDKP
Belawan
Muhamad Syamsu Rokhman